



YUDHAGAMA

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI TNI AD

PENGABDIAN *TNI AD* UNTUK BANGSA DAN NEGARA



EDISI SEPTEMBER 2020



**PENANGANAN COVID-19 DI PUSAT PENDIDIKAN
SATUAN JAJARAN KODIKLAT TNI AD**



**PERINGATAN 15 TAHUN PERJANJIAN DAMAI HELSINKI: PERAN KODAM
ISKANDAR MUDA DALAM MENJAGA STABILITAS GUNA MEWUJUDKAN ACEH
DAMAI, BANGKIT, DAN MAJU**

ISSN 2086-9312



9772086931295

LAWAN COVID-19

**KENALKAN PROTOKOL
KESEHATAN SEJAK DINI**





BRIGJEN TNI NEFRA FIRDAUS, S.E., M.M

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya Tim redaksi dapat menerbitkan Jurnal *Yudhagama* Volume 40 Nomor III Edisi September 2020. Dalam isi jurnal ini terdapat beberapa tulisan dari kalangan Militer yang berhasil dihimpun oleh Tim redaksi, dari para Perwira TNI AD yang bertugas di Kotama/Balakpus jajaran TNI AD.

Terdapat tulisan yang membahas tentang penanganan *Covid-19*, peran TNI AD dalam penanggulangan bencana, implementasi fungsi pembinaan teritorial serta beberapa tulisan yang mengangkat topik sesuai fungsi kecabangan masing-masing, sehingga isi Jurnal *Yudhagama* semakin menarik untuk dibaca. Para pembaca di mana pun berada, terutama prajurit dan PNS TNI AD serta keluarga dapat mengambil manfaat dari tulisan-tulisan yang ada ini untuk menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan.

Disadari bahwa dalam jurnal ini masih terdapat kekurangan, harapan kami para pembaca sekalian dapat memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan Jurnal *Yudhagama* edisi berikutnya, sehingga menjadi lebih baik lagi.

Selamat membaca.

Penanggung Jawab

Brigjen TNI Nefra Firdaus, S.E., M.M

Wakil Penanggung Jawab

Kolonel Inf Drs. Mu'tamar, M.Sc

Pemimpin Redaksi

Letkol Inf Piter Dwi Ardianto

Sekretaris Redaksi

Letkol Inf Drs. Abdon H Tampilang

Redaktur Pelaksana

Mayor Inf Dodi Fahrurozi, S.Sos., M.M.

Redaktur Pracetak

Letkol Caj (K) Yeni Triyeni

Redaktur Bahasa

Kapten Caj (K) Besarah

Koordinator Liputan

Lettu Inf Moch Holil

Desain Grafis

Serka Herlambang

Serda Eko Darmawan

Editor

Mayor Inf Candra Purnama, S.H.

Serda (K) Intan Indah

Reporter

Kapten Inf Hartono

PNS Listin Andriani

Fotografer

PNS Bambang Sutiyono

Alamat Redaksi

Dinas Penerangan Angkatan Darat

Jl. Veteran No. 5 Jakarta Pusat

Telp. (021) 3456838, 3811260

Fax. (021) 3848300

Email

palaganyudhagama@gmail.com
dispenad@mabasad.mil.id

Facebook

<https://www.facebook.com/AngkatanDaratTNI>

Instagram

https://www.instagram.com/tni_angkatan_darat

Website

<http://www.tniad.mil.id>

Twitter

https://twitter.com/TNI_AD_Official

DAFTAR ISI

PENANGANAN COVID-19
DI PUSAT PENDIDIKAN
SATUAN JAJARAN KODIKLAT
TNI AD

Hal 4



Oleh:
Letjen TNI AM. Putranto, S. Sos.

PERENCANAAN
STRATEGIS DAN
PENINGKATAN KEMAMPUAN
ALUTSISTA ARHANUD TNI AD
SEBAGAI KUNCI MEWUJUDKAN
PERTAHANAN UDARA TERPADU

Hal 24



Oleh: Brigjen TNI Elman Nawendro, M.Sc

PERINGATAN 15 TAHUN
PERJANJIAN DAMAI HELSINKI:
PERAN KODAM ISKANDAR MUDA
DALAM MENJAGA STABILITAS
GUNA MEWUJUDKAN ACEH
DAMAI, BANGKIT, DAN MAJU

Hal 8



Oleh:
Mayjen TNI Hassanudin, S.I.P., M.M.

TANTANGAN KOREM 011
LILAWANGSA, POLRI, DAN
MASYARAKAT DALAM
MEMBERANTAS NARKOBA
DI BUMI SERAMBI MEKAH

Hal 28



Oleh: Kol Inf Sumirating Baskoro, S.E.

KAPABILITAS DIVISI
INFANTERI 2 KOSTRAD
DALAM PENANGGULANGAN
BENCANA ALAM DI
INDONESIA

Hal 12



Oleh: Mayjen TNI Tri Yuniarto, S.Ap., M.St., M.Tr., (Han)

PERAN KOREM SEBAGAI
PENGGERAK DAN
KOLABORATOR PADA
PENANGGULANGAN BENCANA
ALAM DI WILAYAH

Hal 32



Oleh: Kol Inf Djon Afriandi, S.I.P, MS.DA

KONFLIK PAPUA:
BAGAIMANA “ENDGAME”
YANG DIHARAPKAN?

Hal 16



Oleh: Brigjen TNI Joko P. Putranto, M.Sc.

OPTIMALISASI PERAN
KOREM 082/CPYJ
DALAM MENERAPKAN PROTOKOL
KESEHATAN PENCEGAHAN
PENYEBARAN COVID-19 GUNA
MEMBANTU PEMERINTAH DAERAH
DI WILAYAH

Hal 36



Oleh: Kol Inf M. Dariyanto

KONSEPSI PENGUATAN
POSTUR PUSSANSIAD
DALAM MENGHADAPI
FENOMENA ANCAMAN
DAN SERANGAN SIBER

Hal 20



Oleh: Brigjen TNI Iroth Sonny Edhie

OPTIMALISASI LEMBAGA
PENDIDIKAN DALAM
MENCETAK SUMBER DAYA
PRAJURIT TNI AD YANG
HANDAL DI ERA 4.0

Hal 40



Oleh: Kol Chb M.Soleh, S.H. M.M



MENINGKATKAN PERAN AKTIF DINAS PENGADAAN ANGKATAN DARAT PADA PENYELENGGARAAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DALAM RANGKA Mendukung TUGAS POKOK TNI AD

Hal 43



Oleh: Kol Inf Ida Idewa Agung Hadisaputra, S.H.

KETAHANAN PANGAN KODIM 1302/MINAHASA DALAM RANGKA MEMBANTU PEMDA DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Hal 60



Oleh: Letkol Inf Slamet Raharjo, S.Sos., M.Si.

OPTIMALISASI DUKUNGAN SATUAN PERALATAN DALAM PEMELIHARAAN ALUTSISTA TNI AD GUNA KESIAPAN OPERASIONAL SATUAN

Hal 48



Oleh: Kol Cpl Anwar Zaelani, S.E.

OPTIMALISASI SATUAN TERHADAP ANCAMAN DI ERA MODERN KHUSUSNYA DI WILAYAH PAPUA

Hal 64



Oleh:
Letkol Rofi Inf Irwansyah, S.I.P., M.Si.

DENGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI MENGUBAH KONFLIK SAPI MENJADI POTENSI PEMBERDAYAAN KEKUATAN EKONOMI MASYARAKAT MASNI, MANOKWARI

Hal 51



Oleh: Kol Arm Airlangga

SATUAN KAVALERI TNI AD MENYONGSONG KONSEP "ARMY FUTURES COMMAND"

Hal 67



Oleh:
Letkol Kav Yudhi Prasetyo Purnomo,
S.Sos., M.I.Pol.

KODIM 1311/MOROWALI BERSAMA PEMERINTAH DAERAH, POLRES MOROWALI DAN POLRES MOROWALI UTARA BERSINERGI MENYIAPKAN DAPUR UMUM UNTUK MASYARAKAT YANG TERDAMPAK COVID-19

Hal 54



Oleh:
Letkol Inf Raden Yoga Raharja, S.E.,
M.M., M.Ipol.

PERAN YONPOMAD DALAM Mendukung SATUAN POMAD YANG BERSINERGI DENGAN POLRI

Hal 71



Oleh: Letkol Cpm Laksono Puji Lisdyanto

IMPLEMENTASI **LESSONS LEARNED** SUSOPSGAB AUSTRALIA MELALUI UJI COBA DOKTRIN PROSEDUR PENENTUAN SASARAN (*TARGETING PROCESS*) PADA LATIHAN POSKO 1 & 2 YONARMED-17/KOMPOSIT RENCONG CAKTI TA. 2019

Hal 59



Oleh: Letkol Arm Oke Kistiyanto, S.A.P

PEMANFAATAN TEKNOLOGI DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PRAJURIT TNI AD

Hal 74



Oleh : Mayor Inf Didik Dwi Utomo

PENANGANAN COVID-19 DI PUSAT PENDIDIKAN SATUAN JAJARAN KODIKLAT TNI AD

Oleh : Letnan Jenderal TNI AM. Putranto, S. Sos.
(Komandan Kodiklat Angkatan Darat)



Upaya TNI dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Indonesia berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4/ 2019 tentang Keamanan Hayati alias *Bio Security*. Inpres tersebut berisi tentang peningkatan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespons wabah penyakit, pandemi global, kedaruratan nuklir, biologis dan kimia yang termuat instruksi umum dan instruksi khusus terhadap 24 kementerian, lembaga, dan kepala daerah termasuk TNI.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dalam perintah hariannya pada bulan April yang lalu, memerintahkan agar seluruh prajurit TNI beserta

Pegawai Negeri Sipil untuk menyikapi situasi pandemi Covid-19 dengan mendukung kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan menumbuhkan kesadaran masyarakat di lingkungan sekitar untuk turut serta menjalankan hidup sehat dan bersih dalam upaya melawan Covid-19. TNI Angkatan Darat selama ini sudah memiliki mekanisme yang diterapkan untuk menghadapi Covid-19, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa juga telah menyiapkan langkah antisipasi dengan memerintahkan kepada seluruh Prajurit dan PNS TNI AD beserta keluarganya untuk menerapkan protokol kesehatan baik di lingkungan kesatuan maupun institusi pendidikan.

Lembaga pendidikan TNI Angkatan Darat terus melaksanakan operasional pendidikan di tengah pandemi Covid-19 sesuai dengan program dan anggaran pendidikan yang sudah ditetapkan dari Mabesad. Namun demikian, dalam penyelenggaraan operasional pendidikan harus direncanakan dan dipersiapkan secara cermat, teliti, dan terkoordinasi

dengan berbagai pihak terkait, serta dilaksanakan dengan tertib, aman dan dalam pengendalian serta pengawasan yang baik sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat (Kodiklatad) merupakan satuan yang berkedudukan langsung di bawah Kasad, mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan pembinaan doktrin dan organisasi satuan jajaran TNI Angkatan Darat, pembinaan pendidikan dan latihan TNI Angkatan Darat, dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat. Pusat Pendidikan (Pusdik) di bawah jajaran Kodiklat Angkatan Darat, tetap menyelenggarakan pendidikan keprajuritan di tengah situasi pandemi Covid-19, namun prosedur dan protokol kesehatan menjadi perhatian utama, dengan tetap melaksanakan *physical distancing* (pembatasan fisik) selama pendidikan berlangsung.

Dankodiklatad, Letjen TNI AM. Putranto, S.Sos telah menginstruksikan kepada



▶ *Rapid Test di Makodiklatad*

seluruh Komandan Satuan Pendidikan Jajaran Kodiklatad untuk bekerja secara maksimal dengan berpedoman pada ketentuan dan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan dari Kasad maupun pemerintah. Pentingnya kesiapan Pusat Pendidikan (Pusdik) pada saat pandemi Covid-19 menjadi perhatian Kodiklatad selaku penanggung jawab terselenggaranya pendidikan di TNI AD. Salah satu contoh kepedulian tersebut yakni sebelum dilaksanakannya pembukaan pendidikan, Dankodiklatad pada tanggal 25 April 2020 yang lalu, langsung meninjau kesiapan Pusdik dalam melaksanakan Pendidikan Kejuruan Tamtama (Dikjurta) Abit Dikmata TNI AD Gel II TA 2019 (OV).

Pengaturan fasilitas pendidikan dan beberapa komponen pendidikan seperti kesiapan *video conference*, fasilitas kelas, alat instruksi serta kesiapan fasilitas pendidikan lainnya

selama proses pengajaran telah dipersiapkan dengan matang oleh setiap Pusdik di Jajaran Kodiklatad. Untuk mengakomodasi pelajaran teori, instruktur atau guru militer memberikan pelajaran melalui *video conference* di ruangan yang terpisah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh setiap Pusdik, agar tetap dapat melaksanakan pendidikan dengan baik dengan harapan prajurit keluaran dari seluruh Pusdik jajaran Kodiklatad dapat profesional dan siap menjalankan tugas di satuan.

Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 baik di Makodiklatad maupun Pusdik jajaran, penanganannya dilakukan secara sistematis sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku seperti dengan melaksanakan *Rapid Test* dan *Swab Test*, jika terdapat personel

maupun siswa terpapar Covid-19. Perhatian secara serius tidak hanya diberikan kepada personel Kodiklatad tetapi juga terhadap keluarganya. Kodiklatad melaksanakan *Rapid Test* sebagai upaya satuan dalam melakukan *screening* terhadap keluarga dari personel jajaran Kodiklatad yang mendiami Rumah Dinas.

Pelaksanaan *Rapid Test* yang sudah dilaksanakan Kodiklatad di antaranya pada 6 s/d 8 April 2020 yang lalu, dengan total pengecekan sampel data dari anggota organik 1.000 personel dan 1.071 siswa di jajaran Kodiklatad. Pengambilan sampel darah tersebut dilakukan di Pusdik masing-masing bekerja sama dengan tim medis dari Kesehatan Kodam III/Siliwangi. Khusus untuk warga Kodiklatad yang mendiami rumah dinas pelaksanaan *Rapid Test* dilaksanakan di Makodiklatad pada 1 Juli 2020. Untuk seluruh hasil *Rapid Test*



▶ *Kegiatan belajar di salah satu Pusdik*

tersebut langsung diumumkan dan jika ada yang reaktif maka akan ditindaklanjuti oleh pihak kesehatan Kodiklat TNI AD, sehingga diharapkan bisa mencegah penyebaran Covid-19.

Protokol kesehatan juga diberlakukan sebelum siswa mengikuti pendidikan yakni, setiap calon peserta didik (Serdik) harus melampirkan hasil pemeriksaan kesehatan dengan uji *Swab Test* atau *Rapid Test* di wilayah masing-masing. Selain itu juga, selama mengikuti pendidikan setiap siswa harus melaksanakan protokol kesehatan yakni jaga jarak, gunakan masker dan mencuci tangan, serta jujur melaporkan kondisi kesehatannya. Pelaksanaan jaga jarak di lingkungan Pusdik dilaksanakan dengan menata ulang bangku dan meja di setiap kelas. Selanjutnya juga setiap Pusdik memastikan bahwa ruangan tidak diisi terlalu penuh oleh peserta didik,

serta menjaga sirkulasi udara dengan membuka jendela kelas. Adanya penataan bangku ini mengurangi paparan virus antar peserta didik.

Penggunaan masker merupakan kewajiban bagi seluruh anggota dan juga peserta didik di Pusdik. Sebagian besar masker yang digunakan adalah masker kain, serta dapat dioptimalkan dengan penggunaan kaca mata serta pelindung muka. Para pembina memastikan bahwa Serdik memiliki beberapa buah masker kain sehingga dapat dicuci setiap harinya guna memastikan kebersihannya. Selain itu, mencuci tangan merupakan kewajiban setiap peserta didik sebelum dan sesudah masuk kelas. Setiap Pusdik wajib memasang tempat cuci tangan atau menempatkan wastafel portabel dekat dengan tempat kegiatan para Serdik.

Perhatian khusus juga diberikan kepada tenaga kesehatan di setiap Pusdik. Dankodiklatad memerintahkan agar setiap sumbangan

Alat Pelindung Diri

baik masker

kesehatan

ataupun

berupa baju

hazmat

harus

dapat

dibagikan

secara

merata

kepada

tenaga

kesehatan

di Pusdik.

Selain itu

juga, melalui Kakes Kodiklatad, Letkol Ckm dr. Saharun Iso, Sp.KO menekankan kepada setiap tenaga kesehatan jangan sampai lengah dan memperhatikan kondisi tubuh sehingga tidak tertular Covid-19.

Menjaga kebugaran diri di tengah pandemi Covid-19 ini juga merupakan salah satu kunci agar tetap sehat. Kegiatan olahraga baik secara mandiri ataupun dipimpin masih terus dilakukan. Khususnya bagi siswa, kegiatan olahraga melalui pembinaan fisik memastikan agar dirinya tetap bugar dan sehat. Pelaksanaan pembinaan fisik dilakukan dengan melaksanakan senam pagi, latihan lari, latihan beban serta olahraga lain dengan intensitas rendah sampai sedang. Dengan berolahraga, maka daya imun tubuh akan meningkat sehingga dapat membentengi diri dari wabah Covid-19.

Adanya penderita positif Covid-19 di Pusat Pendidikan Polisi Militer Kodiklatad di Cimahi, menunjukkan bahwa Prajurit TNI tidak kebal terhadap Covid-19. Hal ini menjadi evaluasi bagi penanganan Covid-19 di jajaran Pusdik Kodiklatad. Munculnya pasien pertama yang positif segera dapat dilacak, sehingga tidak menyebar dan dapat segera diisolasi. Untuk memutus mata rantai virus Covid-19, Pusdikpom langsung bertindak cepat dengan melakukan isolasi mandiri terhadap 100 orang

➤ Sebelum berolahraga dilakukan pengecekan tensi

yang terpapar Covid-19 baik organik maupun siswa yang sedang mengikuti pendidikan di Pusdikpom. Selama isolasi mandiri, Pusdikpom memperketat protokol kesehatan kepada siswa dan personelnya, ditambah dengan melaksanakan gaya hidup sehat yakni istirahat cukup, makan makanan bergizi dengan nutrisi yang baik serta berolahraga. Setelah menjalani isolasi mandiri, pada tanggal 13 Juli yang lalu berdasarkan hasil tes Swab tercatat 100 pasien Covid 19 Pusdikpom dinyatakan negatif.

Selain itu juga, dari 1.198 siswa Abit Diktukpa Secapa AD yang beberapa waktu yang lalu terpapar Covid-19, mulai mengikuti pendidikan Pendidikan Kecabangan di Pusdik Jajaran Kodiklatad. Tercatat 32 pasien yang telah sembuh dari Covid-19 kluster Secapa AD yang kini mengikuti Dikcabpa, pada 3 Agustus 2020 mulai mendonorkan plasma darahnya di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto. Seluruh siswa yang sudah dinyatakan sembuh Covid-19 akan mengikuti terapi plasma darah konvalesen yang dapat membantu dalam penyembuhan pasien yang masih dalam keadaan positif Covid-19.

Hal ini menjadi perhatian khusus dari Kasad dan Dankodiklatad, Pusdik Jajaran Kodiklatad terus berbenah untuk menyiapkan diri melaksanakan pendidikan sambil terus mengupayakan pencegahan penularan Covid-19. Dirdik Kodiklatad,

Brigjen TNI Budi Eko Mulyono, S.Sos, M.M, terus memberikan evaluasi dan mendorong Pusdik melalui berbagai upaya sebagai berikut:

- Pelaksanaan upacara pembukaan dan penutupan pendidikan menggunakan protokol kesehatan, sehingga peserta didik mengambil sendiri ijazah dan juga tanda siswa.
- Proses belajar mengajar menggunakan daring (program CloudX) dan mengoptimalkan penggunaan *video conference* dengan menggunakan aplikasi berbasis internet guna melaksanakan pelajaran.
- Membuat revisi kurikulum untuk mengakomodir pelaksanaan praktek lapangan sehingga tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan tidak mengabaikan mutu keluaran pendidikan.
- Mengakomodir Serdik yang melakukan karantina

mandiri dengan fasilitas yang berbeda namun tetap mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

- Pemasangan jaringan internet dan penambahan *bandwidth* oleh Pusat Perhubungan Angkatan Darat di seluruh Pusdik jajaran Kodiklatad, dengan fokus terbesar di Pusdik Infanteri, Cipatat.

Kesiapan Pusdik di dalam melaksanakan pencegahan penyebaran Covid-19 ini perlu mendapatkan perhatian khusus dan dorongan dari Komando Atas. Selain itu juga, adanya kerja sama dengan satuan tugas penanganan Covid-19 di wilayah, memberikan dampak yang positif bagi penanganan dan pencegahan Covid-19. Kemampuan Pusdik Jajaran Kodiklatad dalam merespons penanganan Covid-19 harus terus dikawal, sehingga meski di tengah wabah pandemi Covid-19 ini, Pusdik tetap dapat menghasilkan Prajurit TNI yang unggul, berkarakter, serta siap membela nusa dan bangsa.



► Penyemprotan disinfektan menggunakan kendaraan

PERINGATAN 15 TAHUN PERJANJIAN DAMAI HELSINKI: PERAN KODAM ISKANDAR MUDA DALAM MENJAGA STABILITAS GUNA MEWUJUDKAN ACEH DAMAI, BANGKIT, DAN MAJU

Oleh : Mayjen TNI Hassanudin, S.I.P., M.M.
(Panglima Kodam Iskandar Muda)



Di tengah pandemi Covid-19 yang tengah melanda dunia, Indonesia menandai 15 tahun kesepakatan damai dan bermartabat, Pemerintah RI dengan GAM melalui *Memorandum of Understanding (MoU)* di Helsinki, Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005. Kehidupan masyarakat Aceh yang sudah damai, siap bangkit dan maju ekonominya perlu terus dijaga stabilitasnya di tengah kritik dan evaluasi masih adanya butir-butir kesepakatan yang belum dapat diimplementasikan dengan berbagai alasan/



pertimbangan, antara lain: **(1)** Aceh memiliki hak menggunakan simbol-simbol wilayah, termasuk bendera, lambang dan hymne; **(2)** Perbatasan Aceh (dengan Sumatera Utara) merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956; **(3)** Pemerintah RI akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai kepada Pemerintah Aceh untuk diberikan kepada semua mantan pasukan GAM, semua tahanan politik yang memperoleh amnesti dan rakyat sipil yang dapat menunjukkan kerugian jelas akibat konflik; **(4)** Pasukan GAM akan memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan sebagai polisi dan tentara organik di Aceh tanpa diskriminasi dan sesuai dengan standar Nasional; **(5)** Semua kejahatan sipil yang dilakukan oleh aparat militer di Aceh akan diadili pada pengadilan sipil di Aceh; **(6)** Permasalahan persenjataan ex-GAM di luar 840 pucuk yang diserahkan dan telah dimusnahkan sesuai kesepakatan; dan lain-lain.

Kodam Iskandar Muda tentu mencermati kondisi yang ada untuk bergiat dan berbuat melalui kerja nyata yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat Aceh. Pertanyaan yang diajukan adalah : **apa dan bagaimana peran Kodam Iskandar Muda**

dalam menjaga stabilitas guna mewujudkan Aceh yang damai, bangkit, dan maju pada peringatan 15 tahun Perjanjian Damai Helsinki?

Peran Kodam IM Dalam Mewujudkan Aceh Damai, Bangkit, dan Maju



Dalam kaitan kesepakatan Perjanjian Damai Helsinki, Kodam Iskandar Muda adalah satuan terdepan TNI AD untuk memastikan implementasinya dalam kerangka produktif dengan kepentingan dan posisi yang sangat jelas yaitu “Bingkai NKRI”. Dari hal tersebut, maka peran yang telah, sedang, dan akan dilanjutkan oleh Kodam Iskandar Muda dalam menjaga stabilitas wilayah dan Ipoleksosbudhankam masyarakat Aceh melalui kampanye “**to win the heart and mind: ACEH DAMAI, BANGKIT, DAN MAJU**” sesuai dengan doktrin TNI AD, yaitu melalui: Fungsi Intelijen; Fungsi Tempur; Fungsi Pembinaan Teritorial (Binter); dan Fungsi Dukungan.

Fungsi Binter yang didukung Intelijen dalam Mewujudkan Aceh Damai, Bangkit, dan Maju

Binter dan Intelijen akan selalu menjadi andalan dari Kodam Iskandar Muda dalam menjaga stabilitas wilayah guna mewujudkan Aceh yang damai, bangkit dari keterpurukan konflik dan maju pembangunan ekonominya. Langkah nyata fungsi Binter yang sudah dilakukan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di wilayah Aceh, di mana dalam kurun waktu 6 tahun terakhir saja, telah diselenggarakan 15 kali TMMD secara serentak di seluruh wilayah Aceh yang diisi dengan serangkaian kegiatan Binter dengan sasaran Fisik maupun Non-Fisik. Secara Fisik dilakukan dengan pembuatan/perbaikan infrastruktur di pedesaan, rehabilitasi rumah tidak layak huni, perbaikan tempat ibadah, perbaikan sekolah, pengobatan gratis dan lain-lain. Adapun kegiatan Non-Fisik diisi dengan penyuluhan/pelatihan bela negara, kesehatan, KB dan ASI Eksklusif, bahaya Narkoba, pertanian, peternakan, pengajian dan lain-lain. Dari pucuk pimpinan Kodam Iskandar Muda sampai dengan Danramil dan Babinsa turut aktif bertemu dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, pemuda dll untuk terus melaksanakan komunikasi sosial (Komsos) dalam rangka menjaga stabilitas wilayah Aceh yang sebelumnya menjadi daerah konflik bersenjata



berkepanjangan menuntut guna mewujudkan Aceh yang selalu damai, bangkit, dan maju ekonominya.

Melalui Binter yang terencana, kreatif, dan inovatif dilaksanakan secara serentak dan berkelanjutan akan menjadi solusi nyata atas belum maksimalnya implementasi Perjanjian Damai MoU Helsinki seperti: “Pemerintah RI akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai kepada Pemerintah Aceh untuk diberikan kepada semua mantan pasukan GAM, semua tahanan politik yang memperoleh amnesti dan rakyat sipil yang dapat menunjukkan kerugian jelas akibat konflik”. Kodam Iskandar Muda akan terus memberdayakan program dan kegiatan “**Serbuan Teritorial**”-nya dalam memberikan perbaikan kondisi ekonomi dan sosial khususnya bagi masyarakat Aceh yang sebelumnya terdampak konflik melalui program ketahanan pangan, program pelatihan kerja, program pembangunan

rumah ex-GAM/terdampak konflik, program pemberian santunan dan bantuan sekolah/beasiswa anak korban konflik dan lain-lain.

Fungsi Binter di atas tidak terlepas dari dukungan fungsi khusus Intelijen untuk memastikan stabilitas wilayah dapat terjaga melalui penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Pada isu “bendera dan lambang Aceh”, Kodam Iskandar Muda melalui Apintel dan Apter terkait terus memberikan pertimbangan kepada semua elemen masyarakat Aceh tentang dampak kerawanan karena masih menampilkan simbol-simbol separatisme yang bertentangan dengan substansi dari Perjanjian Damai Helsinki. Apintel dibantu Apter Kodam Iskandar Muda terus mendorong dengan langkah-langkah persuasif melalui sosialisasi intel, dialog, penggalangan tokoh dan komunikasi sosial guna memberikan penyadaran/pemahaman dalam bingkai NKRI bahwa penaikan bendera dan lambang perjuangan separatisme GAM, sudah tidak ada tempat lagi/tidak relevan lagi di tengah situasi damai di Aceh pasca penandatanganan MoU Helsinki.

Demikian juga dengan permasalahan senjata, amunisi, dan bahan peledak ex-GAM di luar 840 pucuk yang sudah diserahkan dan dimusnahkan sesuai kesepakatan. Kodam Iskandar Muda bersama seluruh Apintel dan Apter terus menggiatkan

penggalangan dan Binter agar ex-GAM beserta simpatisan masyarakat Aceh melalui pendekatan humanis, edukatif dan solutif, bahwa tidak ada gunanya lagi menyimpan senjata, amunisi, dan bahan peledak dari sisa-sisa konflik. Sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020, yang berhasil dihimpun Kodam Iskandar Muda jumlah tersebut di luar 840 pucuk yang sudah diserahkan dan dimusnahkan sesuai MoU Helsinki sejumlah: 807 pucuk senjata campuran (554 pucuk standar dan 253 pucuk rakitan); 27.724 butir amunisi (campuran); dan 344 buah bahan peledak (campuran).

Fungsi Tempur dan Dukungan dalam Mewujudkan Aceh Damai, Bangkit, dan Maju

Kesiapan operasional semua satuan tempur (Satpur), satuan bantuan tempur (Satbanpur), satuan teritorial (Satter) dan satuan pendukung/bantuan administrasi (Banmin) organik Kodam Iskandar Muda sangat mutlak diperlukan untuk mewujudkan stabilitas wilayah Aceh. Aceh yang damai, bangkit dari keterpurukan konflik bersenjata, dan maju pembangunan ekonominya perlu terus dijaga dari gangguan dan ancaman internal/dalam negeri maupun

eksternal/ kepentingan asing atau dari luar negeri.

Hal di atas juga bagian untuk membuktikan bahwa TNI/TNI AD khususnya Kodam Iskandar Muda siap melaksanakan tugas pokoknya tanpa menunggu implementasi Perjanjian Damai MoU Helsinki yang salah satu butirnya mengamanatkan : “Pasukan GAM akan memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan sebagai polisi dan tentara organik di Aceh tanpa diskriminasi dan sesuai dengan standar Nasional”. Aspek pertahanan dan keamanan Aceh guna mewujudkan Aceh yang damai, bangkit, dan maju dapat diserahkan kepada TNI/TNI AD dalam hal ini satuan-satuan organik Kodam Iskandar Muda dibantu Polri dalam hal ini Polda Aceh bersama komponen pendukung yang lain. Bela negara dalam bingkai NKRI dari ex-GAM beserta simpatisannya dalam bentuk nyata telah diakomodasi oleh Kodam Iskandar Muda dan Polda Aceh yang terus menggalakkan dan menyiapkan keterlibatan putra/putri daerah Aceh agar menjadi anggota TNI dan Polri sesuai dengan standar nasional dan tanpa diskriminasi sesuai amanah MoU Helsinki.

Dalam fungsi dukungan, Kodam Iskandar Muda telah dan akan selalu siap memberikan dharma bhaktinya melalui Badan Pelaksana Kodam (Balakdam) terkait. Pada pasal MoU Helsinki, yaitu: “Perbatasan Aceh (dengan Sumatera Utara) yang merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956”, yang tidak bisa diimplementasikan karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka posisi dan sikap Kodam Iskandar Muda telah mengantisipasi dengan kesiapan data pendukung perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara sepanjang **387,94 km** di arsip Topografi Kodam (Topdam) Iskandar Muda untuk selanjutnya selaras dengan kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemda Aceh dan Pemerintah Pusat.

Terkait dengan salah satu pasal krusial pada MoU Helsinki, yaitu: “Semua kejahatan sipil yang dilakukan oleh aparat militer di Aceh akan diadili pada pengadilan sipil di Aceh”, TNI dan lebih khusus TNI AD beserta Kodam Iskandar Muda dengan mengedepankan ahli-ahli hukum dari Hukum Kodam (Kumdam) dan Polisi Militer Kodam (Pomdam) Iskandar Muda dengan supervisi Sinteldam dan Spersdam, telah bersikap sesuai dengan



amanah Undang-Undang (Pasal 203 ayat 1 dan 2 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sehingga Peradilan Militer sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 1997 tidak berseberangan dengan pasal 1.4.5 MoU Helsinki).



Fungsi dukungan yang saat ini sangat penting dalam mewujudkan stabilitas wilayah adalah ketahanan dan kesiapan menghadapi bencana Pandemi Covid-19. Untuk itu, jajaran Kodam Iskandar Muda terus menyiapkan pencegahan dan penanggulangan pandemi tersebut di wilayah Aceh. Beberapa hal yang telah disiapkan Kodam Iskandar Muda untuk kontijensi:

- (1) Rumah Sakit Rujukan Covid-19 (Rumkit Tk. II/IM Banda Aceh, Denkesyah 04-01/Lsw dan Denkesyah 04-02/Mbo);
- (2) Posko Covid-19 (Kesdam Banda Aceh, Kesrem Lhokseumawe dan Kesrem Meulaboh);
- (3) Fasilitas isolasi Covid-19;
- (4) SDM tenaga medis dokter, perawat dan pendukung serta sukarelawan dari satuan-satuan TNI AD di Kodam Iskandar Muda; dan
- (5) Alkes dan APD Covid-19 serta bersama Pemda dan Polda Aceh terus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Aceh tentang bahaya dan pencegahan Pandemi Covid-19.

Last but not least....
Peran dukungan Kodam Iskandar Muda yang paling maksimal dan nyata dirasakan masyarakat Aceh serta berdampak langsung pada stabilitas guna terwujudnya Aceh yang damai, bangkit, dan maju adalah sumbangsih semua satuan dan anggota Kodam Iskandar Muda pada penanganan bencana alam di wilayah Aceh seperti: gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lain-lain. Bersama dengan Pemda, Polda, dan semua elemen masyarakat Aceh, Kodam Iskandar Muda menjadi yang terdepan dalam penanggulangan bencana alam di Aceh mulai dari mitigasi, pencegahan, penanganan, rekonstruksi dan *recovery*, baik fisik maupun non-fisik. Balak Kodam seperti Perhubungan Kodam (Hubdam), Zeni Kodam (Zidam), Pembekalan dan Angkutan Kodam (Bekangdam), Peralatan Kodam (Paldam) sangat efektif digunakan untuk mendukung satuan operasional (Satpur dan Satbanpur) dan satuan kewilayahan (Korem, Kodim dan Koramil) dalam penanggulangan bencana serta Binter Non-Kowil.

Peringatan 15 Tahun Perjanjian Damai Helsinki dalam Mewujudkan Aceh Damai, Bangkit dan Maju

Puncak dari peran Kodam Iskandar Muda dalam mewujudkan Aceh yang damai, bangkit, dan maju adalah melalui serangkaian kegiatan Binter Kreatif yang dilaksanakan secara masif di seluruh wilayah Aceh dari agenda kampanye “**to**

win the heart and mind” atau “**memenangkan hati dan pikiran masyarakat Aceh**”, yaitu peringatan 15 tahun Perjanjian Damai MoU Helsinki yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 15 Agustus 2020. Adapun rangkaian kegiatannya melibatkan Kodam Iskandar Muda dengan semua elemen masyarakat Aceh: cara Dialog & Aspirasi Aceh Damai, Bangkit dan Maju dengan Keynote Speaker H.E. Bapak Dr (H.C.) Drs. H. Yusuf Kalla; Pemberian bantuan kepada anak korban konflik; Penanaman pohon di areal Istana Wali Nanggroe; Joy Flight, Muspida, Wali Nanggroe dan Mualem; Perayaan Aceh Damai, Bangkit dan Maju di Desa Langkahan, Aceh Utara; Pemberian Bantuan Perumahan kepada keluarga ex-GAM; Dialog Kebangsaan dengan elemen masyarakat Aceh Utara dan lain-lain.

Penutup

Demikian uraian singkat peran Kodam Iskandar Muda dalam memperingati 15 tahun Perjanjian Damai Helsinki guna menjaga stabilitas wilayah dan Ipolek sosbud hankam masyarakat Aceh menuju terwujudnya Aceh yang damai, bangkit, dan maju. Menutup tulisan ini kami kutip salah satu indahnyanya berkah dari proses dan hasil perdamaian, yaitu “**Tidak siapa pun yang mampu mewujudkan perdamaian, kecuali atas niat dan upaya kita bersama**”.

KAPABILITAS DIVISI INFANTERI 2 KOSTRAD DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI INDONESIA

Oleh: Mayjen TNI Tri Yuniarto, S.AP., M.Sc., M.Tr., (Han)
(Pangdiv-2/Kostrad)



Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang berbentuk kepulauan terbesar di dunia, di mana penduduknya terbagi dalam beberapa wilayah dengan kehidupan sosial budaya serta kepentingan yang berbeda. Letak geografis Indonesia yang berada pada lempeng Indo-Australia, Asia dan Pasifik disertai dengan banyaknya gunung-gunung berapi sangat rawan dan berpotensi besar untuk kemungkinan terjadinya bencana alam. Kondisi alam, keanekaragaman penduduk dan budaya yang dimiliki dapat

mendorong timbulnya risiko bencana alam, bencana ulah manusia dan kedaruratan kompleks¹. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, menyebutkan **Indonesia memiliki 12 jenis ancaman bencana berisiko tinggi, diantaranya gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, gerakan tanah (tanah longsor), banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrem (puting beliung), gelombang ekstrem dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, epidemi serta wabah penyakit dan gagal teknologi.**



► Dapur lapangan

Berbagai langkah telah dijalankan oleh pemerintah guna menyiapkan cara dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana alam di Indonesia, termasuk penyusunan konsep dan pada akhirnya pengesahan Undang-undang tentang penanggulangan bencana.

Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga implementasinya pada tingkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) baik di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten yang menyertai penyusunan dan pengesahan Undang-undang tentang penanggulangan bencana tersebut. Demikian pula tiap-tiap instansi yang terkait berupaya mempersiapkan diri, menyusun dan memperbaiki prosedur pelibatan mereka dalam penanggulangan bencana yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut beserta turunan-turunannya. Dalam hal ini termuat juga pelibatan kekuatan militer yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI). Keterlibatan TNI dalam

1. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

penanggulangan bencana telah diatur dalam Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam Undang-Undang ini, selain Operasi Militer untuk Perang (OMP), TNI juga dituntut untuk melaksanakan tugas pokoknya dalam melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang salah satu poinnya adalah membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan.

Divisi Infanteri 2 Kostrad merupakan satuan jajaran di bawah Kostrad, yang memiliki tugas pokok membina kesiapan operasional satuan-satuan tempur di bawah komandonya agar senantiasa siap dihadapkan kepada kemungkinan pelaksanaan tugas pada tingkat strategis. Selain melaksanakan tugas pokoknya sebagai salah satu Komando Pelaksana Operasional Kostrad yang berkemampuan tinggi untuk melaksanakan operasi-operasi militer strategis secara mandiri, Divisi Infanteri 2 Kostrad juga memiliki tugas lain yaitu melaksanakan perbantuan-perbantuan pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Wilayah Operasional Divisi Infanteri 2 Kostrad. Berdasarkan Perpang No. 35/XI/2007 Tanggal 21 Nopember 2007, Divisi Infanteri 2 Kostrad ditunjuk sebagai satuan yang terlibat dalam PRCPB TNI (Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana TNI) yang memiliki tugas pokok untuk mengatasi

dampak bencana alam yang terjadi dengan melakukan kegiatan proses evakuasi dan hospitalisasi serta penyaluran dan pendistribusian logistik secara cepat dan tepat guna selama tanggap darurat agar jalannya roda pemerintahan yang mengalami bencana segera dapat normal kembali². PRCPB TNI dibagi menjadi dua wilayah yaitu wilayah Barat dan wilayah Timur. Divisi Infanteri 2 Kostrad bertugas menjadi bagian dari satuan PRCPB TNI Wilayah Indonesia Timur, yaitu mencakup dari wilayah Jawa Timur, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua.

Sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas PRCPB di Medan Tugas Penanggulangan Bencana, Divisi Infanteri 2 Kostrad menyiapkan 4 Satuan yang siap digerakkan guna menanggulangi bencana di Wilayah Indonesia Timur yaitu:

- Yonzipur 10/JP/2 Kostrad;
- Yonbekang 2/MWJ/2 Kostrad;
- Yonkes 2/YBH/2 Kostrad; dan
- Denhub Divif 2 Kostrad.

Yonzipur 10/JP/2 Kostrad bertugas untuk melaksanakan pencarian, dan pertolongan, evakuasi korban serta memiliki kemampuan untuk mengerahkan Alat Khusus Zeni (Alsuszi) untuk melaksanakan evakuasi korban bencana dan pemulihan kondisi wilayah yang tertimpa bencana dengan kemampuan konstruksi yang dimiliki. **Yonbekang 2/MWJ/2 Kostrad** bertugas untuk melaksanakan distribusi bahan bantuan, menyiapkan logistik bagi korban bencana, serta membantu evakuasi korban bencana menggunakan kendaraan angkut personil serta memiliki kemampuan dapur lapangan yang dapat memasak hingga 10.000 porsi makanan dalam satu hari. **Yonkes 2/YBH/2 Kostrad** bertugas untuk melaksanakan fungsi rumah sakit lapangan, evakuasi korban, dan perawatan sementara serta mampu melayani 50 pasien rawat inap dalam 1 Tenda Modul Kesehatan. **Denhub Divif 2 Kostrad** memiliki tugas untuk melaksanakan penyediaan jaring komunikasi



 Prajurit Kostrad memadamkan kebakaran hutan

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 44 Ayat 1



antar Gugus Tugas Penanggulangan Bencana, dan memulihkan jaringan komunikasi bersifat temporer di wilayah yang tertimpa bencana.

Dalam kesiapan operasional penanggulangan bencana alam seperti gempa bumi, banjir bandang dan kebakaran hutan maupun lahan, **Yonzipur 10/JP/2 Kostrad** menyiapkan 1 SSK (Satuan Setingkat Kompi) yang dilengkapi dengan materiil di antaranya 10 unit *Excavator PC 70*, 2 unit *Excavator PC 200*,

14 unit *Dump Truck 2,5 Ton*, 6 unit *Dump Truck 8 Ton*, 6 unit *Backhoe Loader*, 6 unit *Dozer*, 1 unit *Grader*, 2 unit *Crane Cargo*, 3 unit *Spider Excavator*, 3 unit *Lighting Tower*, 2 unit *Mobile Reservoir Osmosis* dan 6 unit *Life Thermal Detector*. Adapun dalam penanganan bencana berupa kebakaran hutan dan lahan, disiapkan beberapa materiil di antaranya 10 unit Alat Konstruksi Pompa Air (*Water Pump*), 10 unit Generator Set 10 KVA dan 2 unit Truk Tangki Air (*Water Tank Truck*) kapasitas 8000 liter serta beberapa *Toolkit* seperti *Toolkit* Tukang Kayu, *Toolkit* Tukang Batu dan *Toolkit* Tukang listrik. Sedangkan untuk alkap perorangan

dibekali dengan sepatu *boots*, masker, *google glass* dan sarung tangan. Untuk satuan **Yonkes 2/YBH/2 Kostrad** menyiapkan 1 SSK dengan Material 1 Set Modul Gadar Lapangan, 1 Set Modul Bedah Lapangan, 1 Set Modul Poliklinik umum Lapangan, 1 Set Modul perawatan dan

Akomodasi Lapangan, 1 Set Modul Farmasi Lapangan, 1 Unit Truk disinfektan, 1 Unit Motor Roda 3 disinfektan dan 18 Set Alat Gendong Penyemprotan Disinfektan.

Satuan Yonbekang 2/2 Kostrad menyiapkan 1 SSK dengan Material 12 Set Dapur Lapangan Tenda, dan 25 Unit Kendaraan Angkut Personil. Serta untuk satuan **Denhub Divif 2 Kostrad** menyiapkan 1 SST (Satuan Setingkat Peleton) dengan Material 17 Set Radio Rig Icom, 1 Set Radio SSB Yaesu, 375 Set Radio HT UHF Icom, 67 Set Harris SSB, 6 Set Repieter Icom IC dan 2 Set GTA Bekker.

Kiprah Divisi Infanteri 2 Kostrad dalam pelaksanaan tugas penanggulangan bencana alam telah terbukti berhasil di Wilayah Operasional tugasnya, antara lain **Penanggulangan Bencana Alam Erupsi Gunung Merapi di Yogyakarta tahun 2010**, **Erupsi Gunung Kelud di Kasembon Jawa Timur tahun 2014**, **Kebakaran Hutan di Kalimantan Selatan tahun 2016**, **Banjir Bandang di Kota Bima tahun 2017**, **Gempa Bumi Lombok tahun 2018**, **Likuifaksi di Palu tahun 2018**, **Angin Puting Beliung di Kota Batu, Jawa Timur tahun 2019** dan **Percepatan penanganan Wabah Pandemi Covid 19 di Wilayah Kota dan Kabupaten Malang tahun 2020**

Selain pengalaman tugas yang telah terbukti berhasil, kesiapan satuan Divisi Infanteri 2 Kostrad dalam penanggulangan bencana senantiasa diasah



dan dipelihara dengan cara melaksanakan latihan-latihan parsial, guna memelihara kemampuan dan kesiapan personel, kondisi alat dan perlengkapan penanggulangan bencana alam. **Beberapa latihan penanggulangan bencana alam yang telah diselenggarakan oleh Divisi Infanteri 2 Kostrad antara lain:**

- Latihan Penanggulangan Bencana Alam oleh Satuan Jajaran Divisi Infanteri 2 Kostrad pada bulan Juli tahun 2019 yang bertempat di Pantai Sendang Biru, Pantai Teluk Asmara, Pantai Clungup, Pantai Teluk Asmara, dan Pantai Goa China Malang Selatan.
- Latihan Evakuasi Medan Sulit (EMS) oleh Yonkes 2/ YBH/2 Kostrad pada bulan November tahun 2019 yang bertempat di Mayonkes 2/ YBH/2 Kostrad Karang Ploso Kab. Malang.
- Latihan Mitigasi Bencana oleh Satuan Jajaran Divisi Infanteri 2 Kostrad bersama BPBD Jawa Timur dan Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) pada bulan Februari tahun

2020 bertempat di Pantai Tamban, Malang Selatan.

- Latihan Penerjunan Perbekalan dan Material oleh Batalyon Bekang 2/ MWJ/2 Kostrad pada bulan Maret tahun 2020 yang bertempat di Gudang Payung Perbekud Yonbekang 2/MWJ/2 Kostrad dan Daerah Latihan Grati Kompleks.
- Latihan penanggulangan wabah Pandemi Covid-19 oleh Ton Nubika Yonzipur 10/JP/2 Kostrad pada bulan Maret tahun 2020 yang bertempat di kota Pasuruan.
- Latihan penanganan dan penanggulangan Pandemi Covid-19 oleh Unit Disinfektasi Denpal Divif 2 Kostrad pada bulan April tahun 2020 yang bertempat di Kota dan Kabupaten Malang.

Selain pelaksanaan latihan yang dilaksanakan dalam rangka memelihara dan meningkatkan kemampuan prajurit, Divisi Infanteri 2 Kostrad turut melaksanakan pemeriksaan kesiapan Personel maupun Materiil



secara berkala sehingga diyakinkan bahwa kesiapan Divisi Infanteri 2 Kostrad dalam kondisi yang optimum dan siap digerakkan kapan saja mengingat kita semua tidak ada yang mengetahui atau dapat memprediksi kapan saat bencana alam tiba

Tanggap darurat terhadap penanganan bencana alam merupakan bagian dari sinergitas antara TNI dan Pemerintah Daerah setempat dalam rangka percepatan pemulihan akibat dari bencana alam yang terjadi di suatu wilayah agar roda pemerintahan dapat segera pulih kembali, serta menjadi wujud nyata dari bentuk kepedulian sosial kemanusiaan yang dilakukan oleh seluruh prajurit Divisi Infanteri 2 Kostrad sebagaimana tertuang dalam 8 Wajib TNI. Oleh karena itu, Divisi Infanteri 2 Kostrad senantiasa siap sedia membantu masyarakat maupun pemerintah dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana alam di wilayah operasional Divisi Infanteri 2 Kostrad.



KONFLIK PAPUA: BAGAIMANA “*ENDGAME*” YANG DIHARAPKAN?

Oleh: Brigjen TNI Joko P. Putranto, M. Sc.
(Kasdam Iskandar Muda)



*“The guerilla must move amongst the people as a fish swims in the water”
- Mao Tse Tung -*

Konflik di Papua telah berlangsung lebih dari lima dekade jika dihitung sejak berdirinya OPM (Organisasi Papua Merdeka) pada 1 Desember 1965. Versi lain menyebutkan OPM berdiri antara tahun 1963 sampai 1964. Namun, yang pasti selama konflik itu pula ribuan warga sipil tidak berdosa telah menjadi korban. Hingga kini konflik tersebut belum menunjukkan akan mereda. Aksi kekerasan bahkan terus meningkat dan korban pun kembali berjatuhan.

Operasi militer untuk menumpas OPM digelar TNI sejak awal berbentuk operasi lawan gerilya atau *counter insurgency*. Operasi semacam ini memang memerlukan waktu amat panjang, karena sifat perang gerilya sendiri yang cenderung berlarut (*protracted war*). Sedangkan strategi yang digunakan lawan berupa serangan-serangan kecil, *hit and run* dan menghindari pertempuran yang menentukan (*decisive battle*) membuat upaya untuk

menaklukkan seluruh kekuatan lawan menjadi sangat sulit. Inilah yang dikenal dengan konflik *assymetric*, antara pasukan yang besar dan kuat melawan pasukan gerilya yang kecil namun lincah. Pasukan pemerintah dalam hal ini gabungan TNI serta Polri sebagai pihak yang kuat dan OPM sebagai pihak yang lemah. Sejarah mencatat bahwa konflik seperti ini memberi peluang kemenangan bagi pihak yang lemah yang menggunakan strategi gerilya. Contohnya dalam Perang Vietnam, Amerika Serikat dikalahkan oleh Vietcong, dalam perang Afghanistan, Uni Soviet dikalahkan oleh Mujahiddin, dan TNI sendiri dalam konflik melawan GAM di Aceh dan Fretilin di Timor-Timur boleh dikatakan tidak menang secara militer, dan tidak bisa pula dikatakan kalah.

Pemerintah Indonesia di sisi lain, tidak hanya mengandalkan pendekatan keamanan dalam menangani konflik di Papua. Pembangunan infrastruktur yang *massive* beberapa tahun belakangan ini selalu menjadi fokus di Indonesia bagian

timur, terutama Papua. Namun ironisnya, pembangunan infrastruktur konektivitas yang memang diperlukan oleh wilayah NKRI paling timur ini tidak sebanding dengan harapan akan meredanya konflik di Papua. Kasus-kasus kekerasan yang mengakibatkan korban jiwa aparat dan rakyat sipil seolah menafikan upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini. Lalu, muncul pertanyaan apakah pendekatan kesejahteraan selama ini tidak efektif untuk meredam konflik? Apakah pendekatan keamanan selama ini juga tidak mampu mengurangi kekuatan bersenjata OPM? Suatu hal yang pasti tujuan akhir dari penanganan konflik Papua tentunya adalah menciptakan Papua yang aman dan damai dalam bingkai NKRI. Oleh sebab itu, pertanyaan yang ingin dibahas melalui tulisan ini adalah: **Bagaimana implementasi penyelesaian konflik Papua? Apakah melalui pendekatan kesejahteraan yang populer dengan istilah “*winning the hearts and minds of the*”**

people” atau pendekatan keamanan/opsi militer, atau gabungan antara pendekatan militer dan pendekatan kesejahteraan?

Pada dasarnya semua opsi di atas sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pembangunan infrastruktur untuk merebut hati rakyat, pemberian status otonomi khusus, bagi hasil antara pusat dan daerah dengan persentase yang lebih besar untuk daerah juga sudah dilakukan. Aktivitas militer oleh aparat gabungan TNI-Polri juga masih dilanjutkan. Semuanya demi menciptakan Papua yang aman dan damai. Namun, mengapa harapan itu belum kunjung nyata? Guna menjawab pertanyaan di atas perlu pertimbangan mendalam, karena tidak ada penyebab tunggal konflik ini. Oleh karenanya, tidak ada *silver bullet* untuk menyelesaikannya.

Memahami sejarah konflik Papua tidak bisa dipisahkan dari sejarah NKRI itu sendiri. Pemahaman sejarah menjadi penting karena dasar itulah yang menjadi justifikasi kelompok OPM untuk melakukan perlawanan. Mereka meyakini bahwa sejarah integrasi Papua masuk dalam NKRI memiliki cacat hukum. Pemahaman sejarah ini juga penting bagi pasukan pemerintah (TNI-Polri) untuk tidak ragu lagi sebagai alat negara yang berdaulat untuk menyelesaikan permasalahan separatisme di Papua, meskipun harus menggunakan opsi militer, karena negara berhak untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayahnya. Papua adalah



wilayah NKRI yang sah yang diakui seluruh dunia internasional, kecuali kelompok separatisme OPM itu sendiri.

Sejarah Integrasi Papua ke Dalam NKRI

Wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat sesuai dengan Pasal 1 Konstitusi Belanda tahun 1938 dulunya termasuk wilayah yang dikuasai Hindia Belanda. Oleh sebab itu, sesuai dengan asas *uti possidetis juris* wilayah bekas pendudukan Hindia Belanda setelah merdeka menjadi wilayah bekas pendudukan atau jajahan seutuhnya (Rosandry 2019). Namun, Belanda tidak rela melepas begitu saja seluruh wilayah Nusantara. Hal itu ditunjukkan dengan dua kali Agresi Militer Belanda tahun 1947 dan 1948, untuk kembali menguasai Indonesia.

Kekuatan militer Republik Indonesia yang saat itu belum memadai tidak menyurutkan niat para anak bangsa untuk

mempertahankan kemerdekaan yang sudah diraih (Kuswandi 2015). Hasilnya, pada tahun 1949 melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) “*transfer of sovereignty*” atau pemindahan kekuasaan pun terjadi, dari Kerajaan Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia atas wilayah yang pernah dijajah oleh Belanda, kecuali Papua bagian barat. Wilayah ini masih dipertahankan oleh Hindia Belanda dengan argumen bahwa Papua mempunyai perbedaan etnik dengan wilayah Republik Indonesia lainnya (Leirissa, *et al.* 1992). Belanda juga ingin tetap mempunyai kekuasaan untuk mengelola Papua bagian barat hingga wilayah ini dipandang mampu untuk memerintah sendiri (*self determination*). Namun, setelah KMB beberapa kali upaya perundingan dengan Belanda soal Irian Barat (nama yang diberikan oleh Presiden Soekarno) selalu menemui jalan buntu.

Karena opsi diplomatik untuk merebut Irian Barat selalu gagal, dipilahlah opsi militer melalui Operasi Trikora. Di era itu, militer Indonesia sangat disegani, bahkan dipandang sebagai yang terkuat di bumi bagian selatan (Amin 2013). Dengan kekuatan ini, Belanda sulit untuk mengungguli Indonesia dalam konflik militer. Saat itu dunia diselimuti Perang Dingin, dan Amerika Serikat tidak ingin Indonesia makin dekat dengan blok Timur, sehingga menekan Belanda agar melepas Papua Barat kepada Republik Indonesia. Operasi Trikora akhirnya tidak menjadi konflik militer skala besar, namun berhasil menyeret Belanda ke meja perundingan.

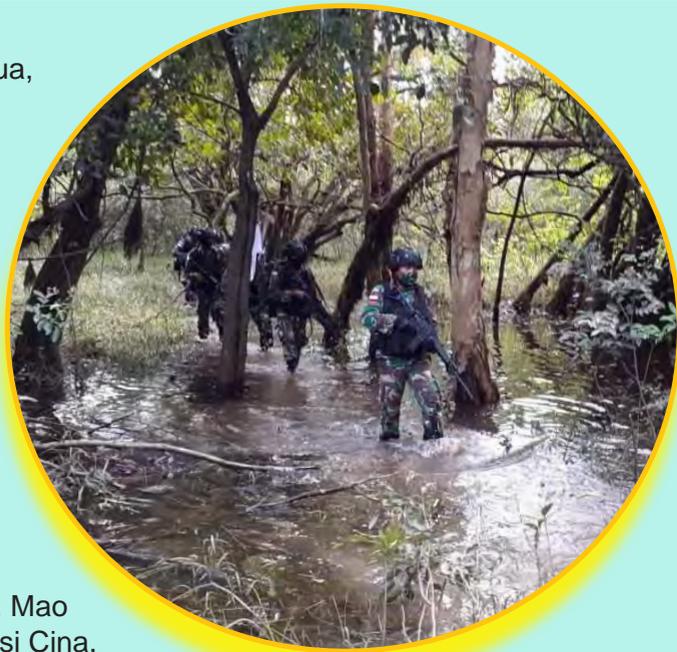
Pada tahun 1962, melalui Perjanjian New York, Belanda akhirnya menyerahkan Irian Barat kepada RI. Pelaksanaan perjanjian ini diwujudkan dalam Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat)/ *the Act of Free Choice*. Pepera dilaksanakan sebelum akhir tahun 1969 dan disaksikan oleh utusan PBB, utusan Australia, dan utusan Belanda. Hasil dari Pepera tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Irian Barat menghendaki bergabung dengan NKRI. PBB menerima hasil Pepera dengan mengesahkan Resolusi 2504 dalam Majelis Umum. Dengan keluarnya Resolusi PBB tersebut maka status Papua Barat masuk NKRI adalah final dan mengikat, serta tidak bisa diganggu gugat karena sudah melalui semua proses politik dan hukum yang sah (Hariandja 2019).

Winning the Hearts and Minds of the People Versus “Pisah, Giring dan Hancurkan”

Dalam konflik lawan insurjensi seperti di Papua, masyarakat seharusnya ditempatkan di posisi paling penting, karena kelompok insurjen muncul, hilang, dan kembali muncul dari dalam masyarakat Papua sendiri. Tokoh separatis yang sudah menua, tertangkap, atau tewas dalam operasi militer akan melahirkan generasi berikutnya yang juga berasal dari masyarakat. Mao Tse Tung, Bapak Revolusi Cina, pernah mengatakan bahwa hubungan antara masyarakat dan insurjen ibarat ikan dan air (Tse-tung 1989). Ikan selalu membutuhkan air untuk hidup, sedangkan air tanpa ada ikan tidak masalah.

Sederhananya, operasi lawan insurjensi sebagian besar adalah upaya untuk memisahkan ikan dari air, atau insurjen dari masyarakat. Namun, hal tersebut jelas bukan pekerjaan ringan bagi pemerintah. Cara pemisahan ini dapat dilakukan dengan pendekatan lunak/*soft approaches* dan pendekatan keras/*hard approaches*. Pendekatan lunak lazimnya berupa upaya peningkatan kesejahteraan, penghormatan HAM, keadilan, pemberian status otonomi dan sebagainya. Sedangkan pendekatan keras dilakukan melalui operasi kinetik (operasi tempur) menggunakan pasukan tempur untuk menumpas insurjensi.

Dalam sejarah konflik di Indonesia sejak era Orde Baru, seluruh operasi militer TNI hampir selalu menggunakan operasi kinetik, *direct strategy* atau strategi langsung untuk



menekan pihak lawan. Ide untuk membuat lawan hancur, ditangkap, disita senjatanya, atau terbunuh diyakini akan dapat mengalahkan lawan. Seperti dalam konflik Aceh, TNI selalu menargetkan penghancuran kekuatan GAM sebagai kunci untuk mengalahkannya. Strategi “pisah, giring, dan hancurkan” juga menjadi doktrin standar dalam operasi lawan insurjensi untuk menumpas Fretilin di Timor Timur.

Hasil akhir atau *endgame* dari operasi-operasi militer itu, TNI tetap tidak mampu mengalahkan GAM maupun Fretilin, akhirnya kedua konflik harus diselesaikan melalui perundingan dan referendum. GAM yang awalnya hanya beranggotakan ratusan orang, akhirnya mampu mewakili rakyat Aceh untuk melakukan perundingan damai dengan pemerintah Indonesia. Fretilin juga pada akhirnya mampu membuat masalah Timor Timur menjadi urusan internasional hingga PBB turun tangan mengawasi referendum dengan hasil Timor Timur menjadi

negara merdeka. Di sini jelas, operasi lawan insurjensi yang dilakukan oleh TNI tidak mampu merebut hati rakyat. Yang terjadi justru sebaliknya, ekses negatif tentang aksi-aksi militer TNI di Papua terus terjadi.

Jika kita mau jujur, harus diakui bahwa strategi yang digunakan TNI di Aceh dan Timor Timur terbukti kurang efektif untuk mengalahkan lawan. Lalu, mengapa strategi yang sama tetap digunakan untuk menangani konflik sejenis di Papua dan berharap sukses? Yakinkah strategi 'klasik' operasi lawan insurjensi yaitu "pisah, giring dan hancurkan" akan sukses diterapkan di Papua? Lima dekade konflik Papua sudah dijalankan dengan strategi yang mirip dengan yang diterapkan di Aceh dan Timor-Timor.

Padahal selama tiga dekade operasi militer di Aceh dan Timor Timur, TNI tetap tidak mampu mengalahkan secara telak lawan insurjennya. Jelas tidak masuk akal jika strategi yang sama diterapkan lagi untuk menumpas OPM. Karena itu, Pemerintah dalam hal ini TNI, Polri, Kementerian, dan Lembaga Negara lainnya yang terkait harus melakukan upaya bersama untuk menyelesaikan konflik ini dan terhindar dari kesalahan di masa lalu.

Langkah Pemerintah untuk membangun Papua adalah salah satu langkah yang tepat. Dimulai dari pemberian otonomi khusus, pembangunan infrastruktur secara *massive*, dan penghormatan adat terutama hukum adat di Papua. Memang diakui bahwa upaya ini bersifat jangka panjang, dan

harus dilakukan oleh setiap pemerintahan yang berkuasa. Strategi *winning the hearts and minds* pada dasarnya adalah juga upaya memisahkan rakyat dari insurjen. Jika rakyat berpihak kepada pemerintah, maka alasan untuk memberontak atau memisahkan diri tidak lagi layak diperjuangkan. Dengan sendirinya, seiring waktu, insurjensi akan melemah karena tidak ada lagi penerus yang melanjutkan perjuangan mereka.

Jika keinginan untuk melepaskan diri dari NKRI sudah tidak lagi rasional, maka membangun negeri dalam bingkai NKRI menjadi pilihan terbaik. Buktinya, bisa dilihat dari kondisi Timor Leste sekarang. Apakah kemakmuran yang dikampanyekan oleh para pejuangnya 20 tahun lalu sudah tercapai? Apakah lepas dari NKRI lantas menjadikan negaranya makmur dan damai tanpa konflik? Apalagi hingga saat ini, OPM sendiri tidak bisa menyatukan semua unsur yang resisten pada NKRI di Papua. Dengan kata lain OPM bukan lagi representasi rakyat Papua.

Kesimpulan dan Saran

Gabungan strategi *hard* dan *soft* yang didasarkan atas analisis intelijen secara terus-menerus dan dievaluasi secara periodik dapat menjadi kunci yang menentukan kapan menggunakan *hard approaches* dan kapan menggunakan tindakan lunak, beserta seberapa besar takaran yang diperlukan guna membantu operasi mencapai sasaran dan progres yang positif.

Disarankan kepada pimpinan agar mengevaluasi lagi doktrin operasi lawan insurjensi untuk lebih disesuaikan dengan kondisi terkini. Jika pendekatan keras dalam menumpas insurjen sudah terbukti gagal, maka sudah waktunya doktrin yang lebih rasional digunakan, yaitu bagaimana merebut hati rakyat untuk memisahkan gerilya dan rakyat. Sudah menjadi tugas dan tekad TNI sejak awal negara ini terbentuk, jika dulu mampu merebut Papua dari Belanda, kini tugas generasi muda TNI untuk mempertahankan Papua agar tetap dalam NKRI.

Referensi

- Amin, Al. 2013. *Merdeka.com*. September 3 . Accessed May 25, 2020. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-armada-ri-sangat-disegani-terkuat-di-belahan-bumi-selatan.html>.
- Hariandja, Fetra. 2019. *Okenews*. September Minggu . Accessed May 25, 2020. <https://nasional.okezone.com/read/2019/09/15/337/2104998/keputusan-pbb-soal-referendum-papua-sudah-final>.
- Kuswandi, H. 2015. "Pengaruh Perang Kemerdekaan II Terhadap Pengakuan Kedaulatan RI Tanggal 27 Desember 1949." *Jurnal Artefak Vol.3 Agustus 2015 207-208*.
- Leirissa, R.Z, Gamar Azaini Ohorella , Pius Suryo Haryono, and Mohammad Wasith. 1992. *Sejarah Proses Integrasi Irian Jaya*. Jakarta: Depdikbud Dirjen Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Rosandry, Indra. 2019. "Separatism in Papua From the Lens of International Law." *Jurnal Hukum dan Perjanjian Internasional (Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu RI)* 24: 24-25.
- Tse-tung, Mao. 1989. *Guerilla Warfare*. Washington: Departemen of the Navy.

KONSEPSI PENGUATAN POSTUR PUSANSIAD DALAM MENGHADAPI FENOMENA ANCAMAN DAN SERANGAN SIBER

Oleh: Brigjen TNI Iroth Sonny Edhie
(Komandan Pusat Sandi dan Siber Angkatan Darat)

“Kita juga harus mampu mengatasi lompatan teknologi militer dalam jangka 50 tahun ke depan, terutama teknologi yang mengarah ke sistem penginderaan jarak jauh, serta teknologi informasi yang mengarah pada sistem senjata yang otonom serta pertahanan siber.”

Presiden Joko Widodo – pada saat meninjau proyek pengembangan kapal selam KRI Alugoro-405 di PT PAL Indonesia (Persero) di Kota Surabaya, Jawa Timur, Januari 2020



Salah satu tren ancaman terhadap pertahanan negara yang berkembang saat ini yaitu ancaman *5th Generation Warfare* (5GW) atau peperangan generasi kelima. Ada empat unsur yang menjadi pokok kekuatan dari 5GW tersebut, yaitu pertempuran multi domain (*multi domain battle*), perang fusi (*fusion warfare*), berbasis pada jaringan internet (*network*), dan pusat *server virtual* pertempuran (*combat cloud*).¹ Dalam konteks 5GW, maka perang saat ini dan mendatang tidak lagi bertumpu pada kekuatan

senjata konvensional, namun memberdayakan segala cara, baik kekuatan militer atau nonmiliter, maupun peralatan *lethal* (mematikan) atau *non lethal* untuk menekan pihak musuh agar musuh mengikuti kehendak yang telah kita tentukan.² Pada gilirannya 5GW ini menjadi penopang utama dari konsep perang masa depan yang disebut sebagai *hybrid warfare* atau perang hibrida. Perang hibrida mengolahyudha-kan nuansa permusuhan yang simultan dan adaptif, memakai kombinasi alutsista konvensional dan nonkonvensional, taktik *irregular*, termasuk aksi teror, tindakan kriminal serta kegiatan lainnya yang dilakukan dalam pertempuran guna meraih tujuan politik dari perang yang dilaksanakan.³

Tren ancaman dan perang hibrida menjadi semakin kritical seiring dengan maraknya revolusi industri 4.0 yang telah menghadirkan teknologi 4.0, di antaranya yang lazim

disebut dengan *Internet of Things* (IoT) sehingga menjadi salah satu *Centre of Gravity* (COG) dari perang masa depan.⁴ Seiring dengan era teknologi 4.0 tersebut maka dewasa ini berkembang teknologi “persenjataan” siber (*cyber weapon*) yang memanfaatkan jaringan internet sebagai *domain* atau medan operasi yang dinamakan ruang siber (*cyber space*). Dengan teknologi di ruang siber tersebut, muncul suatu strategi perang baru di mana perang tidak dilakukan secara konvensional tetapi dengan memanfaatkan *domain* internet yang berkarakter tidak terbatas dengan jarak/ruang dan waktu, namun berakibat atau berdampak signifikan terhadap aspek psikis (berupa konten-konten hoaks atau propaganda) maupun fisik yang sifatnya mengganggu atau bahkan merusak secara permanen terhadap Infrastruktur Informasi Kritical (IIK) yang dimiliki oleh suatu negara. Serangan yang dilakukan di dalam ruang siber

1. Mirza Satria Buana, 2007, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Nusamedia, Bandung, halaman 33.
2. Qiao Liang and Wang Xiangsui, 1999, *Unrestricted Warfare*, PLA Literature and Arts Publishing House, Beijing, halaman 7.
3. Frank G. Hoffman, 2009, *Hybrid Warfare and Challenges*, NDU Press, Online di <https://smallwarsjournal.com/documents/jfqhoffman.pdf>.
4. Andreja Rojko, 2017, *Industry 4.0 Concept: Background and Overview*. ECPE European Center for Power Electronics, E.V. Nuremberg, Germany, Online di <https://online-journals.org/index.php/i-jim/article/viewFile/7072/4532>.

tersebut dinamakan dengan serangan siber (*cyber attack*). Jika skala serangan dan dampaknya meluas ke berbagai bidang kehidupan secara signifikan maka serangan siber itu bertransformasi menjadi Perang Siber (*cyber war*), di mana aktor serangan dapat berupa perorangan atau kelompok/ organisasi (*nonstate actors*) atau negara (*state actors*)⁵.



Berapa peristiwa yang tercatat sebagai bukti terjadinya fenomena *cyber war* di dunia di antaranya yaitu serangan dalam bentuk DDoS (*Distributed Denial of Service*) di Estonia pada tahun 2007, serangan siber dalam bentuk DDoS dan injeksi SQL (*Structured Query Language*) di Georgia pada tahun 2008 serta serangan siber yang sangat fenomenal pada bulan Juni 2010 dengan menggunakan *malicious software (malware)* “Stuxnet” terhadap fasilitas nuklir Iran di Natanz yang menginfeksi setidaknya 50-100 ribu komputer dan berakibat rusaknya 2000 mesin pemutar (*centrifuge*) pengayaan uranium. Setelah Stuxnet, pada akhir Desember 2015 di Ukraina di mana penyerang (*attacker*) melakukan serangan tersinkronisasi (*synchronized*) dari jarak jauh terhadap *circuit breakers* di *substation* sehingga listrik menjadi padam, termasuk operasional listrik cadangan di ruang pengendali juga dimatikan dari jarak jauh. Akibat dari serangan tersebut sekitar 225 ribu

orang pengguna jasa listrik kehilangan layanan. Di sisi lain, media sosial (medsos) yang lahir karena perkembangan teknologi internet saat ini telah “menyimpang” dari penggunaan awalnya hingga dijadikan sebagai alat komunikasi dan mobilisasi politik dengan menyebarkan konten-konten berupa hoaks dan propaganda, sebagaimana yang memicu gerakan rakyat untuk menumbangkan kekuasaan rezim pemerintah di negara-negara Timur Tengah pada akhir Desember tahun 2010 yang dikenal dengan peristiwa “*Arab Spring*”.

Lalu, bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Berdasarkan data yang ada saat ini, fenomena Perang Siber (*Cyber War*) atau Serangan Siber (*Cyber Attacks*) yang terjadi di Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan dalam 2 aspek. Aspek pertama yaitu aspek Infrastruktur Informasi Kritisal/IIK (*Critical Information Infrastructure/CII*) yang meliputi *hardware* dan *software*. Aspek

kedua adalah aspek konten (*content*) informasi yang ditransmisikan oleh media dalam hal ini medsos dan/atau media *online*.

Salah satu contoh Serangan Siber pada aspek pertama (IIK) yaitu serangan *malware* jenis *ransomware* bernama “WannaCry” yang menyerang sistem informasi dan data para pasien RS Dharmais dan RS Harapan Kita di Jakarta pada tahun 2017 lalu⁶. Kemudian baru-baru ini Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional (Pusopskamsinas) BSSN mencatat sebanyak 88.414.296 serangan siber pada aspek IIK di Indonesia yang terjadi pada 1 Januari hingga 12 April 2020. Jenis serangan yang paling banyak adalah *trojan activity* sebanyak 56% dan aktivitas *information gathering* (pengumpulan informasi) sebanyak 43%, sedangkan 1% sisanya merupakan *web application attack*⁷. Kejadian terkini di lingkungan TNI AD, yaitu terjadinya serangan

5. Steve Winterfeld dan Jason Andress, *The Basics of Cyber Warfare: Understanding The Fundamentals of Cyber Warfare in Theory and Practice*, (Amsterdam: Syngress, 2013), halaman 13.

6. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170513191519-192-214642/dua-rumah-sakit-di-jakarta-kena-serangan-ransomware-wannacry>

7. <https://bssn.go.id/rekap-serangan-siber-januari-april-2020/>



siber terhadap *website* Seskoad pada tanggal 24 Juli 2020 dengan katagori *Web Defacement Attack* di mana pada tampilan laman depan situs menjadi hitam dan terpampang tulisan “Pwndz By Pray666host”⁸. Kejadian-kejadian ini membuktikan bahwa ancaman siber sudah menjadi ancaman nyata. Ancaman pada infrastruktur kritis TNI AD lainnya dimonitor oleh Pussansiad melalui sensor yang terpasang pada Data Center Disinfohtad, di mana dalam seminggu pernah terjadi 1.150 ancaman keamanan (periode 14 Juli 2020–19 Juli 2020).

Sementara pada aspek kedua (konten informasi), Perang Siber di medsos mencuat dan marak di berbagai lapisan masyarakat termasuk di lingkungan TNI AD. Beberapa kali Pussansiad menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit dan keluarga besar prajurit sebanyak 16 kasus serta konten yang bersentimen kepada TNI AD dari pihak eksternal sebanyak

114 kasus pada periode waktu Januari–Desember 2019. Di samping itu, terjadi juga Perang Siber yang bermotif separatisme di Provinsi Papua dan Papua Barat sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Pada peperangan siber tersebut, sudah banyak digunakan konten berisi informasi-informasi palsu atau bohong (hoaks) serta ujaran-ujaran bernada kebencian (*hate speech*) sebagai “amunisi” serangan siber yang dilakukan.

Terkait dengan fenomena tersebut di atas, dalam Permenhan RI Nomor 82 Tahun 2014 dinyatakan bahwa serangan siber (*cyber attack*) adalah “Segala bentuk perbuatan, perkataan, pemikiran, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh pihak mana pun, dengan motif dan tujuan apa pun, yang dilakukan di lokasi mana pun, yang disasarkan pada sistem elektronik atau muatannya (informasi) maupun peralatan yang sangat bergantung pada teknologi dan jaringan dalam

skala apa pun, terhadap objek vital maupun non-vital dalam lingkup militer dan nonmiliter, yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa”⁹. Sejalan dengan pengertian tersebut, dalam Doktrin Siber TNI telah dijelaskan juga bahwa definisi Perang Siber (*cyber war*) adalah “Semua tindakan yang dilakukan secara sengaja, sistematis dan terkoordinasi serta berorientasi pada kedaulatan negara, keutuhan wilayah, kehormatan, keselamatan bangsa dan keamanan nasional, termasuk kepentingan dan aset-aset militer yang terkait siber”¹⁰. Selain itu, masih dalam Doktrin Siber TNI, ditegaskan bahwa **ancaman dan serangan siber merupakan ancaman militer**¹¹, mengingat para pelaku ancaman dan serangan siber dapat dikategorikan sebagai kombatan yang melakukan tindakan ofensif di ruang siber dengan tujuan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, kehormatan dan keselamatan bangsa. Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa Perang Siber atau Serangan Siber tidaklah dipandang semata-mata sebagai ancaman atau tindakan kejahatan (*crime*). Hal ini dipertegas lagi pada Pasal 4 ayat (3) dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang menyatakan bahwa serangan siber merupakan salah satu wujud ancaman terhadap negara.

Dihadapkan pada kondisi demikian, TNI AD memiliki peran sebagai alat negara di bidang pertahanan di darat yang

8. <https://inet.detik.com/security/d-5106045/website-seskoad-empat-di-hack-sekarang-under-maintenance>

9. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 82 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pertahanan Siber, halaman 5.

10. Keputusan Panglima TNI Nomor 1355/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Doktrin Siber TNI halaman 35.

11. Ibid, halaman 32.



dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara serta menjalankan fungsi TNI sebagai penangkal maupun penindak setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar serta dalam negeri, terhadap keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dan yang membahayakan kedaulatan negara serta pemulih terhadap kondisi keamanan negara di darat yang terganggu akibat kekacauan keamanan¹². Mengalir dari peran tersebut, TNI AD menjabarkan tugasnya melalui fungsi-fungsi di mana salah satunya adalah Fungsi Teknis Militer Khusus yaitu Siber. Fungsi ini menyelenggarakan operasi khusus dengan menggunakan kemampuan telematika, meliputi pengamanan sumber daya telematika dan manuver *offensive cyber*¹³. Sebagai pelaksana fungsi ini maka pada tanggal 21 April 2020 Kasad telah meresmikan Pusat Sandi dan Siber Angkatan Darat (Pussansiad) sebagai salah satu Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) di jajaran TNI AD yang berkedudukan langsung di bawah Kasad.

Pembahasan

Berdasarkan analisis empiris yang dilakukan belakangan ini maka dapat diketahui dan dipetakan bahwa ancaman siber yang terjadi dan diprediksi akan terus berlangsung di lingkungan TNI AD meliputi 4 jenis ancaman, yaitu ancaman terhadap perangkat/piranti keras (*hardware*), piranti lunak/aplikasi (*software*), data/informasi (*dataware*) dan *mindset* (*brainware*). Menurut

Mcdonnell dan Sayers¹⁴, ancaman perangkat/piranti keras yaitu ancaman yang disebabkan oleh pemasangan peralatan tertentu yang berfungsi untuk melakukan kegiatan ilegal dalam suatu sistem di mana peralatan tersebut menjadi instrumen pengganggu terhadap sistem jaringan dan perangkat keras lainnya, contohnya: *computer/network intrusion*, dan sebagainya. Sementara ancaman piranti lunak, yaitu ancaman yang disebabkan oleh masuknya *software* tertentu ke dalam suatu sistem informasi yang berfungsi untuk melakukan kegiatan ilegal seperti pencurian informasi (*information theft*), perusakan informasi/sistem (*information/ sistem destruction*), manipulasi informasi (*information corruption*) dan lain sebagainya, contohnya: *malware*, *worm*, *trojan* (*virus*, *spyware*). Sedangkan ancaman data/informasi adalah ancaman yang diakibatkan oleh penyebaran data/informasi tertentu yang bertujuan untuk kepentingan tertentu, contohnya hoaks dan propaganda. Terakhir ancaman *mindset* (*brainware*) yaitu ancaman terhadap pola pikir¹⁵ dan kesadaran/kewaspadaan siber (*cyber awareness*).

Dalam menghadapi ke-4 jenis ancaman siber tersebut, sejatinya Pussansiad telah berupaya melaksanakan tugas dan fungsi sesuai yang diembannya. Namun sayangnya upaya tersebut belum memberikan hasil yang optimal. Oleh karena

itu, dipandang perlu adanya konsepsi penguatan Postur Pussansiad secara integral holistik meliputi **aspek Kekuatan** yang meliputi Organisasi, Personel/SDM, Teknologi/materiel khusus (*matsus*) siber dan sandi, peranti lunak (*tata kelola*), kegiatan/operasi, anggaran, dan pangkalan berikut infrastrukturnya. Selanjutnya, **aspek Kemampuan** yang meliputi kemampuan persandian, penangkal siber, penindakan siber, pemulihan siber, perbantuan siber, dan analisis, serta **aspek Gelar Kekuatan** meliputi kekuatan yang digelar secara terpusat maupun tersebar. Penguatan Postur Pussansiad melalui 3 (tiga) aspek ini diharapkan dapat diadopsi ke dalam Renstra TNI AD agar sejalan dengan visi *Making Indonesia 4.0* yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi di mana proses digitalisasi akan dilakukan pada semua sektor, termasuk dalam hal ini sektor pertahanan, khususnya pertahanan siber di lingkungan TNI AD.

Penutup

Konsepsi yang diuraikan di atas pada gilirannya diharapkan dapat menjadi solusi bagi upaya penguatan Postur Pussansiad dalam menghadapi fenomena ancaman dan serangan siber. Penguatan pada aspek Kekuatan, Kemampuan dan Gelar Kekuatan Pussansiad diyakini dapat menjadi jawaban bagi tantangan dan tuntutan tugas TNI AD dan TNI pada umumnya di era revolusi Industri 4.0 pada masa kini dan pada masa mendatang.

12 Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/184/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi

13 Ibid

14 Loc.Cit, Permenhan RI No.82 Tahun 2014, halaman 12

15 Desain Sistem Pertahanan Siber dalam Menghadapi Perang *Mindset* Menggunakan Big Data Analytic di Pushan Siber Kemhan RI, Permadi-Gultom-Simbolon, 2020



PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENINGKATAN KEMAMPUAN ALUTSISTA ARHANUD TNI AD SEBAGAI KUNCI MEWUJUDKAN PERTAHANAN UDARA TERPADU

Oleh: Brigjen TNI Elman Nawendro, M.Sc.
(Danpusdik Arhanud Kodiklatad)

Perkembangan teknologi militer khususnya dalam bidang persenjataan, telah merubah spektrum ancaman konvensional berupa ancaman invasi militer asing menjadi multidimensional. Ancaman tersebut berkembang dari yang bersifat kasat mata berupa teknologi senjata tanpa awak dan teknologi Nano sampai dengan yang tidak kasat mata berupa ancaman dunia maya (*Cyber Threat*) dan perang Hibrida (*Hybrid Warfare*). Negara-negara maju telah berhasil menciptakan berbagai jenis senjata antara lain sistem senjata Rudal (peluru kendali)/Misil yang dilengkapi dengan teknologi modern dengan daya hancur yang besar, jarak capai yang jauh serta kecepatan dan presisi tinggi. Perubahan tersebut terlihat pada perkembangan teknologi sistem senjata pesawat tempur dengan kecepatan tiga kali kecepatan suara (*3 Mach*) serta kemampuan bombardemen dan Rudal yang akurat. Persenjataan udara tersebut di antaranya adalah *Ballistic Missile (BM)*, *Cruise Missile (CM)* dan *Unmanned Aerial Vehicle (UAV)*.

Arhanud TNI-AD merupakan salah satu fungsi teknis militer

umum dalam organisasi TNI-AD dengan tugas pokok pertahanan udara aktif. Pada pelaksanaan tugas pertahanan udara nasional, Arhanud TNI AD, TNI AL dan TNI AU bersama dalam wadah Hanudnas memerlukan *Service Control Command Center (SCCC)* antara Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) kekuatan Hanud dari semua matra. Belum padunya Alutsista unsur Hanudnas dari semua matra, kemampuan Alutsista yang terbatas, termasuk alat komunikasi satuan Arhanud yang bermacam-macam jenis saat ini masih menjadi kendala dalam mewujudkan *SCCC*.

Keterpaduan operasi harus senantiasa adaptif dan seiring dengan tantangan di setiap fungsi kecabangan dan lebih mengutamakan interoperabilitas antar kecabangan di TNI AD. Berdasarkan referensi dari beberapa literatur, keterpaduan pertahanan udara dapat diukur dari Rencana Strategis Pertahanan Udara, sistem dan alat komunikasi yang terintegrasi, sistem Komando dan Pengendalian Operasi (Kodalops) yang terpadu, dan peningkatan kemampuan Alutsista, dari beberapa

tolak ukur ini menimbulkan suatu pertanyaan “*Apakah modernisasi Alutsista yang dilakukan oleh Arhanud TNI-AD telah dapat mewujudkan pertahanan udara terpadu ?*”.

Rencana Strategis Pertahanan Udara

Rencana Strategis Pertahanan Udara merupakan suatu upaya pembangunan kekuatan pertahanan udara yang didasarkan pada Rencana Strategis Pertahanan Negara. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Kebijakan Umum Pertahanan negara sehingga dapat operasional, efektif dan efisien selayaknya pembangunan kekuatan mempertimbangkan Operasi Gabungan TNI dalam pertahanan negara. Satu dari beberapa operasi gabungan TNI adalah operasi udara gabungan, maka Alutsista TNI dalam Opshanud diharapkan memenuhi persyaratan fungsi dan operasional (persyaratan umum, taktis, dan teknis). Rencana Strategis dalam menentukan sistem dan Alutsista pertahanan udara harus memenuhi kebijakan pembangunan pertahanan negara yang berpedoman pada kebijakan *essential*

forces (EF) dan *proportional growth personnel (PGP)* serta *right sizing*¹ dengan tujuan terciptanya totalitas kinerja yang diperoleh melalui pengoptimalan sumber daya namun tetap dapat memenuhi kebutuhan satuan pemakai yaitu operasional dalam segala medan dan cuaca serta terjamin keberlangsungan operasionalnya.

Upaya untuk memenuhi tuntutan *EF* tersebut dilakukan dengan sistem kombinasi *Top-down* dan *Bottom-up*. Wilayah Indonesia yang luas, pada posisi silang dengan bentuk kepulauan serta obyek vital yang tersebar dihadapkan dengan kemungkinan serangan udara lawan dari segala arah, maka dibutuhkan Perencanaan pembangunan sistem Hanud unsur TNI yang efektif dengan melibatkan semua matra. Sistem Hanud yang terpadu saling mendukung dan menutup setiap celah kosong pertahanan udara Nasional.

Celah Pertahanan udara dari unsur TNI AU dan TNI AD dapat diisi oleh pertahanan udara dari TNI AL dhi KRI, demikian juga celah pada Lapisan pertahanan udara terluar oleh TNI AU dapat diisi oleh Pertahanan udara unsur TNI AD dengan program pengadaan Alutsista baru dengan jenis rudal jarak sedang maupun rudal jarak jauhnya. Hal ini menjadi perhatian karena serangan udara lawan akan datang dari segala arah pada spektrum yang tak terbatas. Hilangnya celah serangan udara merupakan pertahanan udara terbaik.



► Ilustrasi Link 16

Alutsista pada tiap matra harus dapat menjawab kebijakan umum pertahanan negara dan memenuhi kebutuhan satuan pengguna. Satu sisi Alutsista Arhanud harus sesuai dengan kebijakan pemerintah sebagai pemegang kebijakan pertahanan negara, dan selaras dengan kebutuhan pengguna. Satuan memerlukan sistem Hanud dan Alutsista yang mudah dan cepat dioperasikan (*user friendly*) serta kuat di segala macam medan dan cuaca khususnya di daerah tropis. Alutsista harus mampu beroperasi dan bertahan di medan perkotaan, hutan gunung, maupun medan berpasir dengan kelembapan udara cukup tinggi. Persyaratan kemampuan harus dipenuhi untuk memperoleh keunggulan dalam penyelenggaraan pertahanan udara yang efektif dan efisien.

Keberlangsungan Alutsista harus menjadi perhatian sangat penting bagi penentu kebijakan dalam pengadaan. Meskipun perang menggunakan kekuatan militer secara terbuka masih belum terlihat akan terjadi, kemampuan pertahanan

udara harus terus dijaga agar mampu menghadapi setiap bentuk ancaman kapanpun dan dimanapun. Dengan demikian dibutuhkan Alutsista yang mempunyai usia pakai cukup panjang, ketersediaan suku cadang dan jaminan pemeliharaan secara terus menerus untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi militer terakhir serta mampu melakukan operasi secara gabungan. Semakin siap menghadapi segala macam ancaman, semakin *survive* suatu negara.

Sistem dan Alat Komunikasi yang Terintegrasi

Penggunaan berbagai Alutsista dalam penyelenggaraan pertahanan udara memerlukan suatu sistem dan perangkat yang dapat menghubungkan *voice* dan data pada level taktis maupun sampai level strategis. Alat komunikasi ini diharapkan memiliki kriteria ketahanan dalam berbagai kondisi cuaca serta menjamin keamanan. Hal ini tentunya dibutuhkan oleh satuan Arhanud terutama dalam

1. Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi, Kep Panglima TNI, no. Kep/184/II/2018 tanggal 28 Februari 2018, Hal. 68



► Terminal High Attitude Area Defense (THAAD)

menghadapi perang elektronika dewasa ini. Ragam Alutsista Arhanud yang dimiliki sekarang terdiri dari jenis Alutsista Meriam dan Rudal dimana komunikasi yang digunakan berbeda baik komunikasi radio data maupun *radio voice*. Radio data digunakan untuk bertukar dan berkirim informasi mengenai data objek sasaran yang ditangkap oleh Radar sampai dengan unit satuan penembakan baik Meriam maupun Rudal, sedangkan *radio voice* digunakan sebagai sarana bertukar informasi suara dari tingkat pimpinan satuan Arhanud sampai dengan pimpinan unit satuan penembakan.

Pada masa yang akan datang selain kebutuhan alat komunikasi yang terintegrasi, Arhanud diproyeksikan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna mengefektifkan dan mengintegrasikan sistem komunikasi seperti penggunaan BMS (*Battlefield Management Sistem*). Pada era perang modern dituntut suatu pertahanan yang mendekati

waktu nyata (*real time*) atas keadaan taktis dan mampu mengkomunikasikan secara *on-line* ke seluruh unsur kekuatan pertahanan nasional yang ada. Dengan penggunaan BMS tersebut seluruh unsur-unsur dalam pertempuran yang terdiri dari seluruh matra TNI dapat terhubung dalam satu arus komunikasi data sasaran antara Kohanudnas dengan unsur-unsur Hanud dari ketiga matra. Contoh sistem komunikasi yang telah dimiliki oleh negara lain seperti NATO yaitu Link 16. Link 16 merupakan sistem komunikasi standar yang digunakan oleh U.S., NATO dan Pasukan Koalisi dalam mengirim dan saling menukar data taktis secara langsung (*real time*) menggunakan saluran komunikasi dari negara-negara sekutu yang dikenal juga sebagai TADIL J.²

Komando dan Pengendalian yang Terpadu

Perang modern juga menuntut suatu kesatuan komando yang jelas dan tertata rapi. Kesatuan komando dan pengendalian sampai dengan

tingkat taktis khususnya dalam penyelenggaraan pertahanan udara dikaitkan dengan operasi-operasi militer yang melibatkan satuan Arhanud TNI AD memerlukan sistem Komando, Kendali, Komunikasi, Komputer, Intelijen, Pengamatan dan Penginderaan (K4IPP) yang modern dan dapat dioperasikan sampai dengan satuan taktis di lapangan. Sistem K4IPP diperlukan oleh pimpinan dalam perencanaan, pengerahan dan pengendalian di dalam pelaksanaan operasi.

Rudal Jarak Sedang dan Rudal Jarak Jauh TNI AD

Sesuai perkembangan teknologi militer dunia, maka kebutuhan akan rudal jarak sedang dan rudal jarak jauh bagi Arhanud TNI AD menjadi hal yang sangat krusial untuk dipenuhi. Pertahanan udara nasional tidak hanya dilakukan oleh satu matra tetapi keterpaduan (*interoperability*) unsur TNI matra Darat, Laut, dan Udara. Pada sisi lain, Serangan udara lawan dapat dilakukan dari jarak yang sangat jauh dengan menggunakan pesawat atau Rudal berkecepatan tinggi serta akurasi tinggi dari segala macam arah. Karena itu perlu pertahanan udara yang mampu mendeteksi, mengidentifikasi, menjejaki dan menghancurkan sedini mungkin setiap serangan udara. Pada setiap lapis/jarak capai pertahanan udara disusun berkesinambungan menutup celah serangan udara dari berbagai arah yang mendekati

2. <https://www.baesystems.com/en-us/definition/what-is-link-16> . Diakses pada tanggal 21 Juli 2020 pukul 22.35 WIB.

ke wilayah dan obyek vital yang dilindungi. Selain itu obyek vital yang harus dilindungi tidak semuanya bersifat statis.

Rudal Jarak sedang dan rudal jarak jauh dapat mengisi *gap* atau celah kosong pertahanan udara dan menghancurkan serangan udara lawan lebih dini dari pada Rudal yang dimiliki Arhanud TNI AD saat ini. Pada realitas pertahanan udara masih terdapat celah penghancuran sasaran udara yang berada pada jarak puluhan sampai dengan ratusan kilometer. Hal ini tergambar pada kemampuan unsur matra udara seperti pesawat tempur yang dapat terbang jauh sampai ratusan km dari objek vital untuk menghancurkan sasaran udara atau darat musuh dibandingkan dengan unsur Arhanud TNI AD yang hanya memiliki jenis Rudal jarak pendek dengan efektifitas penghancuran sasaran udara pada jarak 7 s.d. 8 km.

Kebutuhan akan rudal jarak sedang dan rudal jarak jauh guna menutup celah pertahanan udara dan untuk melindungi beberapa objek vital strategis lainnya yang jumlahnya relatif banyak, perlu diperkuat dengan kekuatan Hanud unsur darat dan laut. Perkembangan strategi penguasaan suatu negara, dilakukan guna menghancurkan kekuatan udara musuh untuk memperoleh keunggulan udara, dengan demikian bila keunggulan udara tidak dapat dicapai, maka Hanud unsur darat menjadi sangat vital untuk menangkal serangan udara sedini mungkin dengan menggunakan Rudal jarak

sedang dan Rudal jarak jauh. Negara yang memiliki kekuatan militer yang cukup kuat seperti Amerika Serikat, juga melengkapi satuan Arhanud matra daratnya dengan Rudal jarak sedang seperti Rudal *Patriot* dan rudal jarak jauh seperti *Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)*. Hal disadari bahwa pertahanan udara sangat krusial sehingga harus melibatkan semua sumber daya yang dimilikinya demi melindungi kepentingan nasionalnya, bahkan pada akhir tahun 2019, Amerika telah meresmikan angkatan kelimanya yaitu *United States Space Force* yaitu salah satu matra yang bertanggung jawab tentang penguasaan ruang luar angkasanya.

Rudal jarak sedang dan rudal jarak jauh memiliki keunggulan dalam menyesuaikan dinamika perkembangan suatu peperangan. Dinamika perang memerlukan fleksibilitas semua unsur yang terlibat, agar kemenangan dapat tercapai. Selain fleksibilitas sistem pertahanan, diperlukan juga Alutsista yang mempunyai mobilitas tinggi untuk menghadapi setiap perubahan situasi peperangan. Rudal Jarak sedang memiliki dimensi yang tidak terlalu besar dan dapat diangkut dengan *platform* diatas kendaraan serta kemampuan penghancuran sasaran udara sampai dengan 100 km, maka Rudal jarak sedang adalah jawaban dari tuntutan fleksibilitas dan mobilitas tersebut. Selain itu, guna memenuhi tuntutan kemampuan penghancuran sasaran udara lebih cepat dan lebih dini maka diperlukan

Rudal jarak jauh yang memiliki kecepatan sampai dengan 4 *Mach* dan jarak jangkauan lebih dari 100 km dengan ketinggian lebih dari 20 km serta mampu bergerak atau berpindah gelar dengan mudah (*mobile*) Kemampuan teknis dan taktis dari Rudal jarak menengah dan dan rudal jarak jauh merupakan kunci utama dalam keberhasilan pertahanan udara.

Objek Vital Nasional yang harus dilindungi oleh satuan Arhanud tidak semuanya bersifat statis. Objek yang bersifat dinamis contohnya pasukan tempur, aset-aset militer dan Pos Komando yang bernilai strategis. Dengan demikian semakin jauh jarak tembak Alutsista semakin terjamin objek vital yang bergerak untuk tetap terus terlindungi.

Memahami elaborasi di atas, dapat kita mengerti bahwa pelaksanaan modernisasi Alutsista Arhanud TNI AD tetap terus dilakukan guna mewujudkan pertahanan udara yang efektif. Beberapa rekomendasi kritis guna meningkatkan keterpaduan pertahanan udara melalui jalan Akurasi Perencanaan Strategis yang memenuhi *EF*, mewujudkan sistem dan alat komunikasi yang terintegrasi dalam sistem komando pengendalian efektif dan efisien serta didukung peningkatan kemampuan Alutsista pada upaya menaikkan jarak tembak Alutsista dengan Rudal jarak sedang dan rudal jarak jauh. Arhanud adalah bagian dari TNI AD yang tidak boleh tertinggal dalam teknologi dan kemampuannya untuk kepentingan Nasional.

TANTANGAN KOREM 011 LILAWANGSA, POLRI, DAN MASYARAKAT DALAM MEMBERANTAS NARKOBA DI BUMI SERAMBI MEKAH

Oleh: Kol Inf Sumirating Baskoro, S.E.
(Danrem 011/Lilawangsa Dam IM)



Adanya berbagai bentuk spektrum ancaman dan gangguan nasional khususnya yang berbentuk ancaman non-militer, maka dituntut sebuah konsepsi pelibatan tugas TNI AD. Pelibatan TNI AD dalam tugas-tugas operasional selain perang (OMSP) merupakan suatu tugas yang perlu dilandasi legitimasi politik dan payung hukum, sehingga dalam menghadapi berbagai masalah ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dapat diarahkan sesuai dengan peran, tugas, dan fungsinya yang diimplementasikan dalam regulasi tugas OMSP TNI AD dalam membantu Kepolisian guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (UU RI

Nomor 34, Tahun 2004 tentang TNI, pasal 7, ayat 2 b, nomor urut 10).

Aceh selain dikenal sebagai daerah dengan pelaksanaan hukum syariat Islam, juga dikenal dengan wilayah peredaran ganja dan Narkoba terbesar di Indonesia. Penyalahgunaan Narkoba, dari hasil penelitian pihak BNNP Aceh, di kalangan generasi muda di Aceh semakin meningkat. Barang yang diharamkan negara dan agama ini, justru semakin diminati, terutama di kalangan milenial. Jika permintaan terhadap Narkoba meningkat, tentu pasokan Narkoba ikut meningkat, sehingga semakin tinggi pula tingkat penyelundupan barang haram ini. Lalu, bagaimana dengan penjara? Penjara juga dipenuhi dengan manusia pecandu dan mafia Narkoba. Empat tahun terakhir, peningkatan Napi Narkoba menunjukkan grafik kenaikan.

Kembali pada data penyalahguna Narkoba di Aceh, yang didominasi kaum lelaki (87,13%) dibandingkan perempuan (12,87%), dengan rentang usia rata-rata antara 21

s.d 30 tahun (35,64%) dan 31 s.d 40 tahun (34,65%). Penangkapan Narkoba di Provinsi Aceh pada periode Januari s.d Juli tahun 2020, sesuai dengan data Staf Intelijen Kodam IM yaitu **jenis Sabu dengan total ± 235 Kg dan jenis Ganja ± 2.675,5 Kg**, hasil dari penangkapan di beberapa Kabupaten di Aceh dan bandar/pengedar Narkoba dari Aceh yang tertangkap di provinsi lain. Selanjutnya Pil Ekstasi **± 35.500 butir**, hasil penangkapan di Jl. Boulevard Bintaro Jaya Sektor 7 Jakarta Selatan yang dibawa dari Aceh dan penangkapan oleh SatNarkoba Poltabes Medan bertempat di Jalan Simalingkar tepatnya di dekat Medan Zoo, Provinsi Sumatera Utara yang diselundupkan dari Aceh. **Penemuan ladang Ganja ± 16 Ha**, di Kabupaten Aceh Besar 14 Ha dan Bireuen 2 Ha.

Dampak dari peredaran Narkoba tentu sangatlah luar biasa, seakan menghilangkan identitas Aceh. Aksi pencurian meningkat, saling mencurigai kerap kali terjadi. Dahulu orang Aceh sangatlah memuliakan tamu, memuliakan sahabat, mereka saling membantu. Dahulu, bila ada anak masyarakat

kurang mampu, akan sama-sama dididik, dan masyarakat lain ikut memperhatikannya. Sementara Guru sangat dihormati, ketika anak-anak melihatnya dari jauh, sudah menyapa dan mendekatinya, mencium tangannya sebagai tanda hormat yang begitu tinggi. Sekarang budaya itu sudah semakin terkikis, karena pengaruh Narkoba.

Akibat pengaruh Narkoba penjara penuh sesak, bahkan over kapasitas. Walaupun penyalahgunaan dan pensuplai Narkoba semakin diburu, semakin banyak yang nekat melakoninya. Saat ini di Aceh sudah ± 73.000 pengguna Narkoba, khususnya jenis sabu dan ganja (berdasarkan data BNN Prov. Aceh tahun 2019). Walau tantangannya hukuman mati, dan hidup dalam penjara, masih banyak orang di Aceh yang mau melakukannya.

Maraknya Narkoba di Aceh tidak terlepas dari jalur masuk yang sangat strategis yang menghubungkan Selat Malaka dan Samudra India, serta akses darat melalui pintu perbatasan Aceh Tenggara. Jalur Laut, mulai dari Seunuedon ke jalur-jalur kuala, seperti Kuala Idi, Kuala Langsa, hingga ke aliran sungai di Aceh Tamiang. Penyelundupan Narkoba di Aceh jika dicermati, masuk melalui jalur masuk peredaran senjata saat konflik berlangsung di Aceh. Modus dan polanya beragam, mulai dari penyimpanan Narkoba di bawah dek kapal, melalui penyimpanan di kayu, serta sejumlah modus operandi lainnya. Patroli keamanan di



► TNI - Polri bersinergi tangkap pengedar sabu di Aceh Timur

laut masih lemah, sehingga sangat memudahkan penyelundup memasukkan Narkoba ke Aceh. Untuk saat ini alat utama sistem patroli dan alat utama sistem komunikasi, baik di Kepolisian Airud dan TNI AL masih kurang memadai.

Soal jalur masuk Narkoba dan menjadi pintu gerbang di Indonesia, Kepala Badan Narkotika Provinsi Aceh menjelaskan lebih detil tentang peredaran barang haram itu. Menurutnya 80% peredaran Narkoba di Indonesia masuk melalui Aceh. Terdapat 29 jalur tikus yang tersebar di sepanjang pantai timur Aceh di jalur Selat Malaka. Jalur ini merupakan pintu masuk barang haram dari Eropa, Cina, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan lain-lain. Di pesisir timur Aceh mulai dari Pidie ke Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Timur dan Aceh Tamiang yang pantainya merupakan kedua terpanjang di dunia. Jalur tikus ini sebagai rute masuknya kapal kecil, yang sulit dijangkau pengawasan. Nelayan Aceh juga banyak terjebak dengan sindikat Narkoba. Modus penyelundupan Narkoba biasanya melalui pengiriman

berupa gula, bawang, dan kebutuhan pokok lainnya. Kapal-kapal pengangkut barang ini akan dijemput oleh kapal lain, sebelum masuk ke jalur pelabuhan tikus. Tujuannya untuk menghilangkan jejak barang titipan narkoba.

Berbagai upaya dilakukan dalam menangkal maraknya Narkoba di generasi milenial dan berupaya menyadarkan mereka yang sudah terlanjur hanyut dalam pusaran benda haram nan mematikan ini. Pihak Korem 011/LW, Kepolisian, dan BNN Prov. Aceh mengedepankan penegakan hukum dengan tetap mempertahankan kearifan lokal, melibatkan semua pihak. Bukan hanya membentuk organisasi mencegah Narkoba, namun seluruh elemen masyarakat digerakkan untuk melawan Narkoba dan Pemerintah Aceh punya kekuatan untuk melakukannya. Keterlibatan SKPA (Satuan Kerja Perangkat Aceh) yang langsung bersentuhan dengan generasi muda sangat menentukan untuk mencegah peredaran Narkoba. Peran dinas ini sangat besar. Misalnya Dinas Sosial, Dinas Pendidikan,



➤ Penemuan dan pemusnahan ladang ganja di Kab. Bireuen

Dayah (Pesantren) dan Dinas Olah Raga. Berbagai kegiatan di dinas-dinas ini langsung bersentuhan dengan generasi muda dan masyarakat, sehingga senantiasa mengkampanyekan bahaya Narkoba, menyadarkan masyarakat yang sudah terlanjur memakainya. Sekolah-sekolah dalam berbagai kegiatan harus senantiasa mengkampanyekan bahaya Narkoba. Kaum wanita melakukan kampanye melalui PKK dan kegiatan sosial lainnya. Demikian dengan MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama), lembaga adat dan berbagai elemen lainnya, juga senantiasa memberikan pemahaman tentang bahaya Narkoba dan harus diperangi secara bersama-sama.

Jajaran Korem 011/LW bersama pihak Kepolisian, Kesbangpol di Kota dan Kabupaten dan beberapa organisasi yang aktif terus mengadakan pertemuan untuk membahas perkembangan Narkoba dan upaya-upaya apa yang akan dilakukan. Adapun organisasi yang selalu mengkampanyekan bahaya Narkoba tersebut antara lain:

IKAN (Ikatan Keluarga Anti Narkoba), GAAN (Generasi Aceh Anti Narkoba), GANA (Generasi Anti Narkoba Aceh) dan LAN (Lembaga Anti Narkoba) yang tersebar di seluruh Aceh. Para relawan ini aktif mengadakan kampanye di sekolah-sekolah, kampus-kampus, dan organisasi sosial masyarakat lainnya.

Memutus mata rantai mafia Narkoba tidaklah semudah membalik telapak tangan. Ada kendala-kendala di lapangan yang menjadi penghambat bagi jajaran Korem 011/Lilawangsa dalam pemberantasan Narkoba di Aceh. Di antara kendala tersebut adalah sebagai berikut:

- TNI tidak memiliki payung hukum dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, hanya sebatas berkoordinasi dengan Kepolisian maupun BNNP/BNNK;
- Personel TNI yang ada di wilayah teritorial memiliki kemampuan yang berbeda dalam membina masyarakat di desanya, sehingga tidak semua masyarakat dengan sukarela memberi informasi adanya penyalahgunaan Narkoba;

- Kemampuan pendeteksian peredaran Narkoba bagi aparat Intelijen di lapangan belum maksimal;
- Dalam pelaksanaan pemberantasan Narkoba di lapangan lebih bersifat koordinasi. Adapun kegiatan pengungkapan oleh Polri dan BNNP/K cenderung dilaksanakan sendiri dengan pertimbangan SOP dan kerahasiaan;
- Terlalu luasnya perairan di wilayah kerja Lanal Lhokseumawe dihadapkan dengan jumlah personel dan Alutsista yang dimiliki;
- Banyaknya pelabuhan tikus dan alur laut yang dapat digunakan oleh para penyelundup dalam melaksanakan aksinya;
- Keterbatasan personel dalam hal penggunaan bahasa daerah, sehingga kurang maksimal dalam berkoordinasi.

Walaupun dihadapkan pada berbagai kendala tersebut, jajaran Korem 011/LW bersama pihak Kepolisian dan instansi terkait lainnya pantang menyerah dan senantiasa berupaya dengan melakukan berbagai langkah nyata untuk memberantas barang haram ini. Langkah-langkah itu di antaranya:

- TNI/Polri dan BNNK secara intens melakukan kegiatan sosialisasi serta melakukan razia Narkoba terhadap pengguna jalan raya untuk mencegah masuknya Narkoba ke wilayah Aceh;
- Ketika masuk informasi tentang adanya ladang Ganja, pihak TNI/Polri melakukan penggerebekan

ladang Ganja tersebut secara bersama-sama;

- TNI/Polri beserta Muspika melakukan kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat di tiap-tiap desa secara intens dan berkelanjutan;
- Anjingsana ke berbagai pondok pesantren dan tokoh agama serta tokoh masyarakat dalam rangka mendorong dan memotivasi untuk menjadi pelopor masyarakat agar terbebas dari Narkoba;
- Kerja sama TNI, Polri, BNNK dan Toga, Tomas, Todat dengan membentuk *gampung-gampung* mandiri bebas Narkoba serta mengoptimalkan peran pemuda setempat yang dibentuk menjadi relawan anti Narkoba sehingga dengan mudah mereka dapat memantau secara langsung setiap aktivitas di lingkungan masyarakat;
- Kerja sama dengan LSM anti Narkoba untuk selalu mensosialisasikan tentang dampak dan bahaya Narkoba secara terus menerus dengan menggandeng para Babinsa dan Bhabinkamtibmas di wilayah;
- TNI, Polri dan BNNK bekerja sama menutup jalur peredaran Narkoba melalui jalan-jalan tikus khususnya di wilayah pesisir Pantai serta melakukan patrol rutin dengan memanfaatkan sarana yang ada.

Sebagai upaya menghancurkan jaringan Narkoba, masyarakat harus



► Penemuan dan pemusnahan ladang ganja di Kab. Aceh Besar

disadarkan untuk bersatu memberantasnya, karena persoalan Narkoba bukan hanya tanggungjawab TNI dan Polri saja, namun juga seluruh elemen masyarakat. Bila masyarakat Aceh mau berjihad memberantas Narkoba, negeri Serambi Makkah ini akan mengalami perubahan.

Dalam melaksanakan perjuangan melawan dan memberantas Narkoba di Aceh maka disarankan kepada Komando atas dan pengambil kebijakan sebagai berikut:

- Agar disusun sebuah mekanisme untuk menempatkan personel TNI di BNN Pusat maupun Daerah, sehingga sinergitas dalam melakukan pemberantasan peredaran

dan penyalahgunaan Narkoba dapat terlaksana dengan baik;

- Adanya regulasi sebagai payung hukum bagi aparat Intelijen/ Babinsa di lapangan dalam rangka memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di wilayah, sehingga tidak bergantung kepada institusi lain apabila mendapatkan informasi tentang peredaran Narkoba, meskipun untuk permasalahan hukumnya bagi masyarakat pelaku pelanggar Narkoba, tetap diserahkan kepada pihak Kepolisian dan bagi Prajurit TNI yang melanggar diserahkan kepada Polisi Militer.



► TNI - Polri dan BNN bersinergi tangkap pengedar sabu jaringan Malaysia - Batam - Aceh

PERAN KOREM SEBAGAI PENGGERAK DAN KOLABORATOR PADA PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI WILAYAH

Oleh: Kolonel Inf Djon Afriandi, S.I.P, MS.DA
(Danrem 012/Teuku Umar Dam IM)



Indonesia sebagai negara dengan tipologi wilayah kepulauan, iklim tropis, zona “ring of fire”¹ dan terlebih lagi akibat efek perubahan iklim global sebagai imbas dari persoalan global *warming*² telah membuat persoalan kebencanaan menjadi persoalan abadi yang akan *inherent* dalam kompleksitas persoalan negara dan pemerintah Indonesia. Persoalan kebencanaan yang telah menjadi persoalan inheren membutuhkan bentuk penanganan yang terencana, terintegrasi, dan termanajemen dengan baik. Satuan TNI yang selama ini berfungsi sebagai salah satu eksekutor pelaksanaan penanggulangan bencana di lapangan dituntut harus mampu mengevaluasi

dan menyempurnakan sistem penanggulangan bencana yang telah dilakukan. Sistem penanggulangan bencana harus selalu di-*update* karena persoalan bencana merupakan persoalan yang sangat dinamis, dimana salah satunya akibat di namika realitas sosial masyarakat menuju jaman modern dan global yang semakin fluktuatif.

Peran TNI dalam penanggulangan bencana telah diatur dalam tata peraturan perundang-undangan, yakni UU No. 34 tahun 2004 khususnya pada bagian Tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang menyebutkan bahwa TNI juga bertugas membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan. Korem jajaran TNI AD sebagai satuan teritorial yang berada di kewilayahan yang berfungsi sebagai komando pelaksana operasi dalam setiap operasi yang dilaksanakan TNI dituntut harus mampu memahami tipologi wilayah dan potensi kebencanaan dengan seluruh sumber daya yang ada dalam cakupan wilayahnya. *Mapping* persoalan kebencanaan

secara utuh yang disinkronkan dengan fungsi-fungsi esensial dalam sistem penanggulangan bencana sangat penting untuk dilakukan guna menemukan gap yang belum terisi sempurna.

Ketajaman dalam melihat gap dalam sebuah sistem penanggulangan bencana merupakan lintasan kritis dalam proses mewujudkan organisasi kebencanaan yang profesional dalam melaksanakan kegiatan yang kompleks mulai dari level kabupaten sampai dengan level nasional. Melihat persoalan kebencanaan secara utuh, maka akan terlihat beberapa peran esensial yang sangat krusial akan tetapi tidak terartikulasi dalam struktur organisasi penanggulangan bencana.

Peran esensial tersebut adalah peran sebagai penggerak dan kolaborator pada organisasi sistem kerja penanggulangan bencana alam. Peran tersebut pada hakekatnya juga relevan dengan prinsip-prinsip umum penanggulangan bencana yakni koordinasi dan keterpaduan, kemitraan dan pemberdayaan³. Peran penggerak adalah

1. *Fact about the Ring Of Fire*, National Geographic, 2020
2. *Weather, Global warming and Climate Changes*, NASA, 2020
3. UU No 24 tentang penanggulangan bencana, 2017

peran suatu bagian dalam organisasi kebencanaan yang bertugas mengaktifkan dan menstimulasi seluruh bagian agar bergerak secara optimal guna menyelesaikan tugas yang dihadapi. Persoalan kebencanaan adalah persoalan yang sangat kompleks karena di dalamnya terdapat variabel yang tidak bisa dikalkulasi secara pasti. Beberapa variabel kritis dalam kebencanaan di antaranya adalah 1) Waktu, tempat dan eskalasi bencana; 2) Kesiapan fisik dan non fisik masyarakat; dan 3) Kesadaran dan tanggung jawab masyarakat serta aparatur. Dihadapkan dengan beberapa variabel kritis tersebut di atas kegiatan penanggulangan bencana alam akan sangat rentan terjadi stagnasi (*stuck*) sehingga tujuan akhir proses penanggulangan bencana akan susah tercapai. Dalam kondisi seperti ini peran penggerak akan sangat strategis untuk mendobrak kondisi stagnasi yang terjadi.

TNI jajaran Korem adalah satuan jajaran TNI AD yang berada pada level strategis di daerah karena Korem memiliki kapasitas dalam menentukan arah dan bentuk operasi yang berada di wilayah tanggung jawabnya meskipun Korem tidak terlibat secara langsung pada setiap operasi yang dilaksanakan termasuk di dalamnya penanggulangan bencana alam. Kegiatan penanggulangan bencana alam di daerah akan lebih dominan secara fisik di-*handle* oleh Kodim-Kodim yang terdislokasi di setiap



kabupaten dan kota madya. Hal ini merupakan gap dan ruang kritis yang bisa dioptimalkan oleh satuan setingkat Korem untuk memerankan diri sebagai penggerak dalam sistem penanggulangan bencana alam di daerah. Peran sebagai penggerak lebih jauh akan sangat ideal jika dapat dijadikan sebuah *mindset* bagi seluruh anggota TNI yang bertugas dibandingkan dominasi *mindset* eksekutor dalam setiap kegiatan penanggulangan bencana alam.

Kejadian bencana alam tsunami di Aceh tahun 2004, merupakan salah satu data fakta di mana satuan TNI merupakan satuan utama yang memerankan fungsi penggerak akibat seluruh elemen kebencanaan daerah ikut terdampak menjadi korban bencana tsunami⁴. Peran TNI sangat terlihat jelas ketika bantuan dari nasional dan internasional telah siap di daerah bencana akan tetapi karena kompleksitas persoalan di lapangan membuat TNI

menjadi organisasi kunci yang mampu menggerakkan seluruh elemen yang ada.

TNI yang secara individu maupun satuan telah dididik dan dilatih dalam spektrum kerja di bawah tekanan, telah terbukti mampu tampil sebagai peran penggerak dalam setiap kejadian bencana alam di daerah. Selanjutnya peran kolaborator adalah peran dalam suatu organisasi yang berfungsi mensinkronkan bentuk kerja sama individu dan bagian agar tercipta tingkat efisiensi dan efektifitas yang baik. Efisiensi dan efektifitas adalah dua hal krusial yang selama ini sangat sulit terwujud hampir di seluruh sistem kerja berbasis *social oriented*, kegiatan ini justru sering terlihat sangat baik dipraktikkan oleh organisasi yang berbasis *profit oriented* atau sektor-sektor bisnis.

Dalam kegiatan penanggulangan bencana alam peran kolaborator ini juga memegang kata kunci dalam kegiatan penanggulangan

4. Peran TNI dalam penanggulangan Tsunami di Aceh tahun 2004.

bencana alam secara umum. Sebenarnya peran sebagai kolaborator dalam organisasi penanggulangan bencana alam telah terwadahi dalam organisasi BPBD sampai dengan BNPB yakni salah satunya adalah dengan menempatkan TNI sebagai Komandan Operasi⁵ khususnya pada tahap tanggap darurat.

Akan tetapi persoalan terpenting adalah bagaimana peran kolaborator ini dapat tergelar di seluruh level organisasi penanggulangan bencana sampai di tingkat terkecil di lapangan. Di sinilah pentingnya membentuk *mindset* pada seluruh insan prajurit TNI di daerah yang terlibat dalam organisasi kebencanaan agar mampu menjiwai dan berperan sebagai kolaborator untuk mewujudkan kolaborasi yang baik di antara komponen dan elemen yang ada.

Sebenarnya peran kolaborator ini juga belum akan menghasilkan efek yang signifikan jika hal ini hanya tergelar pada tahap tanggap darurat saja, peran kolaborator pada tahap pra bencana juga terkadang memegang peran yang lebih *urgent* khususnya pada bencana alam yang diakibatkan oleh tindakan sosial masyarakat sendiri seperti wabah penyakit (Covid-19), kebakaran hutan, banjir, dan sebagainya. Pentingnya peran kolaborator ini sangat terlihat jelas pada contoh fakta kompleksnya proses penanganan wabah Covid-19 yang telah menjadi persoalan global saat ini, peran kolaborasi

seluruh elemen benar-benar memegang kata kunci suksesnya kegiatan percepatan penanganan wabah Covid-19.

Hal ini terjadi karena kesadaran masyarakat dalam memahami dan mentaati protokol kesehatan guna mewujudkan *social awareness* dan *social control* dalam percepatan penanganan wabah Covid-19 memegang peran dominan hampir sekitar 80% (delapan puluh persen) prasarat keberhasilan operasi yang dilaksanakan gugus tugas. Argumentasi dan deskripsi tersebut di atas yang melatarbelakangi pentingnya kehadiran TNI guna mengambil peran sebagai kolaborator pada sistem penanggulangan bencana alam di daerah.

Beberapa alasan yang melatarbelakangi kenapa TNI adalah organisasi yang paling tepat untuk memainkan peran sebagai penggerak dan kolaborator antara lain: 1) TNI adalah organisasi yang memiliki struktur organisasi yang tergelar dari level nasional sampai dengan level desa; 2) TNI merupakan organisasi dengan *typical* organisasi garis komando yang sangat cocok untuk melaksanakan tugas dengan resiko tinggi; 3) TNI adalah aparatur negara yang kehidupannya telah dijamin oleh negara dalam bentuk fasilitas seperti gaji, perlengkapan dan otoritas-otoritas lainnya; 4) TNI adalah organisasi yang memiliki tingkat kepercayaan masyarakat cukup baik; 5) Persoalan

kebencanaan di Indonesia adalah menjadi faktor kritis sistem ketahanan nasional yang juga menjadi domain TNI.

Beberapa kelemahan yang ditemukan dalam tahapan manajemen dapat kita kategorikan dalam persoalan *budgeting*, *coordinating*, dan *directing*. Persoalan *budgeting* adalah persoalan yang menyangkut pembiayaan suatu kegiatan baik berupa dana maupun sarana dan prasarana. Persoalan ini merupakan hal krusial dalam sebuah manajemen kegiatan penanggulangan bencana alam karena tanpa penganggaran kegiatan akan sangat susah terlaksana dengan baik. Esensi penganggaran pada hakekatnya adalah pola penganggaran yang tepat guna, tepat sasaran dan efisiensi.

Keadaan seperti inilah yang menjadi ciri khas dan menjadi nilai jual institusi TNI dalam meng-*handle* persoalan-persoalan besar bangsa khususnya masalah bencana alam. Kesatuan komando pada dasarnya merupakan karakter dasar organisasi TNI sebagai alat pertahanan negara yang memiliki tugas utama melaksanakan tugas profesional militer untuk perang. Akan tetapi, dalam praktik kegiatan penanggulangan bencana alam yang selama ini dilakukan, terlihat sebuah dilema yang dirasakan pihak TNI di mana meskipun TNI bukan sebagai pihak pemegang komando dan kendali yang utama, namun TNI

5. UU No.46 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD pada Tahap Tanggap Darurat, tahun 2008.

sering dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab jika ada kegagalan yang terjadi dan bahkan tidak jarang sampai dengan pemberian *punishment*. Dalam keadaan seperti ini jika institusi TNI tidak segera mengambil sikap internal khususnya dalam hal komando pengendalian, maka akan terjadi ruang semu tanggung jawab yang akan menjadikan TNI berada pada posisi sulit.

Kembali jika didasarkan pada kaca mata panjang kehidupan bernegara, hal seperti ini akan dapat memperlambat proses pendewasaan organisasi militer sendiri dan lebih khusus kepada pemerintah daerah dan bagian penanggung jawab profesional kebencanaan. Sebagai konklusi dari tulisan ini adalah bahwa TNI dalam penanggulangan bencana berfungsi sebagai komponen pendukung dan juga sebagai unsur pembantu. Perubahan *mindset* prajurit dari eksekutor menjadi penggerak dan kolaborator akan bermanfaat untuk memudahkan TNI dan elemen lain agar dapat menghindari *misleading* penanganan kebencanaan.

Penegasan kembali peran TNI dalam penanggulangan bencana juga akan mampu memudahkan dalam merumuskan strategi penanganan bencana yang lebih *smart* dan kuat baik secara sistem, regulasi sampai dengan praktik di lapangan. Keraguan dalam penegasan batas-batas peran TNI dalam penanggulangan bencana

juga akan berpengaruh pada *mindset* dan moril prajurit TNI yang bertugas di lapangan. Kondisi ini terlihat dari diskusi-diskusi internal prajurit yang mempertanyakan persoalan penganggaran, keterbatasan sarana dan prasarana, domain *leading* sektor sampai dengan pemberian *reward* dan *punishment*. Penegasan batasan peran TNI dalam keterlibatannya pada penanganan bencana bukan berarti akan mengubah apa yang selama ini dilakukan secara praktik teknis di lapangan, akan tetapi lebih pada pergeseran *mindset* prajurit yang selama ini telah terbentuk sebagai eksekutor menjadi lebih fokus pada perannya sebagai penggerak dan kolaborator.

Dengan lebih fokus pada penataan peran TNI sebagai penggerak dan kolaborator dalam kegiatan kebencanaan berarti akan memberi ruang lebih kepada instansi sipil agar lebih punya banyak ruang untuk mengembangkan diri meskipun TNI secara internal tetap berkewajiban menyiapkan Team Reaksi Cepat (TRC) sebagai⁶ satuan penindak awal pada tahap tanggap darurat. Pemikiran ini sangat relevan dengan esensi dari sebuah konsep “profesionalisme vs keterbatasan kapasitas” di mana profesionalisme adalah pembagian ruang profesi yang sempit tetapi mendalam, akan tetapi pada hakikatnya bahwa setiap organisasi memiliki keterbatasan kapasitas sehingga justru apabila

cakupan tanggungjawabnya diperluas maka akan berbanding terbalik dengan kedalaman profesionalisme yang dikuasai. Sebagai kesimpulan, persoalan bencana alam yang menjadi persoalan inherent bangsa Indonesia harus selalu mendapatkan input dan evaluasi untuk mewujudkan organisasi penanggulangan bencana alam yang lebih baik. Perubahan *mindset*⁷ satuan TNI khususnya yang berada di wilayah Korem untuk lebih fokus pada perannya sebagai penggerak dan kolaborator daripada yang selama ini lebih terkesan sebagai eksekutor semata adalah hal yang sangat tepat. Peran sebagai penggerak dan kolaborator adalah peran yang sangat vital dalam kegiatan penanggulangan bencana, akan tetapi kedua peran ini belum terartikulasi dengan jelas dalam susunan pejabat/bagian dalam organisasi penanggulangan bencana alam mulai di tingkat daerah sampai dengan nasional. Langkah penyempurnaan tahapan manajemen kebencanaan khususnya pada tahapan *budgeting*, *coordinating*, dan *directing* sangat penting dilakukan guna menghindari *misleading* dalam mengelola dan optimalisasi sumber daya yang ada. Demikian tulisan ini dibuat sebagai cara pandang untuk menstimulasi pembaca guna memunculkan ide dan terobosan baru dalam persoalan penanggulangan bencana alam.

6. Prosedur Team Reaksi Cepat, Peraturan kepala BNPB, No. 9 Tahun 2008

7. *The Power of Mindset to Transform Teaching*, Leadership and Learning, Chris Hildrew 2018.

OPTIMALISASI PERAN KOREM 082/CPYJ DALAM MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 GUNA MEMBANTU PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH

Oleh: Kol Inf M. Dariyanto
(Danrem 082/CPYJ Dam V/Brw)



Komando kewilayahan sebagai salah satu bentuk gelar kekuatan TNI AD dalam menyelenggarakan tugas Binter di daerah perlu ditingkatkan kemampuannya. Dengan demikian, penyelenggaraan Binter dapat dilakukan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya guna kepentingan pertahanan negara aspek darat. Dalam rangka mendukung tercapainya tugas pokok TNI AD, Korem 082/CPYJ sebagai badan pelaksana dari Kodam V/Brawijaya merupakan satuan komando kewilayahan yang berkedudukan di jalan Veteran No. 3 Kota Mojokerto - Jawa Timur. Korem 082/

CPYJ memiliki 6 Kodim sebagai satuan pelaksana terdiri dari Kodim 0809/ Kediri, Kodim 0811/ Tuban, Kodim 0812/ Lamongan, Kodim 0813/ Bojonegoro, Kodim 0814/ Jombang, dan Kodim 0815/ Mojokerto. Dalam pelaksanaan tugasnya, Korem 082/CPYJ memiliki tugas seperti yang tertulis dalam Undang-undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yaitu melaksanakan tugas OMP dan OMSP. Salah satu tugas OMSP adalah membantu pemerintah daerah.

Dengan melihat situasi saat ini di Jawa Timur, khususnya di wilayah Korem 082/CPYJ, proses penularan Covid-19 semakin hari semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari data perkembangan Covid-19 yang bertambah secara terus-menerus setiap harinya. Oleh sebab itu, sangat diperlukan peran Korem 082/CPYJ untuk dapat membantu Pemerintah Daerah dalam mencegah penularan dari Covid-19 yang sangat *massive* perkembangannya saat ini. Pelaksanaan upaya pencegahan proses penularan Covid-19 di wilayah Korem 082/CPYJ sudah berjalan dengan baik dan lancar kepada masyarakat. Dalam hal ini, Korem selain melaksanakan kegiatan pencegahan Covid-19

secara berdiri sendiri juga memerintahkan Kodim dalam jajaran Korem 082/CPYJ untuk dapat menggandeng Forkopimda di wilayahnya masing-masing untuk bekerja keras guna mencegah terjadinya penularan Covid-19. Namun, pada kenyataannya upaya-upaya yang dilakukan masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih banyak masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan yang sudah diberikan dan bahkan sudah sering disosialisasikan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19 di wilayah Korem 082/CPYJ.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut: **“bagaimana mengoptimalkan peran Korem 082/CPYJ dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 guna membantu pemerintah daerah di wilayah”**. Dari rumusan masalah tersebut dapat diidentifikasi menjadi beberapa persoalan, di antaranya adalah:

- Masyarakat masih belum mematuhi protokol

kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19;

- Kurangnya kepedulian dari pemerintah daerah dalam penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 di wilayah Korem 082/CPYJ.

Dihadapkan dengan persoalan di atas, penting untuk dapat mencari dan menemukan solusi yang tepat guna mengoptimalkan peran Korem dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 di wilayah. Permasalahan ini akan dicoba dicarikan solusinya dengan menggunakan metode studi kepustakaan yang diintegrasikan dengan pengalaman penulis dalam mengamati setiap perkembangan penyebaran Covid-19 yang terjadi di wilayah Korem 082/CPYJ.

Adapun nilai guna dari pembahasan permasalahan ini adalah agar didapatkan pengetahuan yang lebih tepat baik secara praktis maupun akademis sehingga nantinya dapat membantu Pemda dalam mencegah penyebaran virus Covid-19 tersebut. Penulisan ini ditulis dengan pembatasan pada penerapan protokol kesehatan penyebaran Covid-19 di wilayah Korem 082/CPYJ, khususnya di wilayah Kota dan Kabupaten Mojokerto.

PEMBAHASAN

Penerapan protokol kesehatan di wilayah Korem 082/CPYJ masih belum optimal dalam pelaksanaannya. Berdasar data dan fakta yang ada, yaitu sebagai satu contoh



di wilayah kota dan kabupaten Mojokerto, penulis mencoba dengan menampilkan data dan fakta di lapangan selama dua hari saja yaitu:

- Pada tanggal 29 Juli 2020 terdapat kasus di kota Mojokerto antara lain: *suspect* ada 19 orang; positif 232 orang; sembuh 181 orang; meninggal dunia 12 orang. Sedangkan di Kabupaten Mojokerto antara lain: *suspect* ada 118 orang; positif 484 orang, sembuh 269 orang, dan meninggal dunia 18 orang.
- Lalu, pada tanggal 30 Juli 2020 terdapat kasus di kota Mojokerto antara lain: *suspect* 19 orang, positif 237 orang, sembuh 189 orang, dan meninggal dunia 12 orang. Sedangkan di Kabupaten Mojokerto antara lain: *suspect* 118 orang, positif 494 orang, sembuh 306 orang, dan meninggal dunia 20 orang. Hal ini terjadi karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan masih sangat rendah.

Adapun harapan dan keinginan penulis berdasarkan data dan fakta tersebut di atas adalah kondisi di wilayah Korem 082/CPYJ, khususnya di wilayah kota dan kabupaten Mojokerto, bisa kembali normal dan upaya yang dilakukan Korem dalam membantu pemerintah daerah dapat lebih optimal guna mencegah penyebaran Covid-19 yang semakin *massive* itu. Dengan demikian, perlu untuk dianalisa setiap persoalan yang sudah diidentifikasi sesuai dengan rumusan masalah dalam tulisan ini, yaitu sebagai berikut.

Masyarakat masih belum mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

Dengan adanya kasus-kasus penambahan Covid-19 di seluruh wilayah Korem 082/CPYJ, yang mana di berbagai kota maupun kabupaten yang sudah menjadi zona merah, membuat situasi yang semakin rentan terhadap kelangsungan hidup suatu wilayah baik dari segi perekonomian maupun kesehatan dari setiap



Kurangnya kepedulian dari pemerintah daerah dalam penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 di wilayah Korem 082/CPYJ.

Tingkat kesadaran masyarakat yang sangat kurang dalam menjalankan dan menerapkan protokol kesehatan di wilayah Korem 082/CPYJ, khususnya di Kota dan Kabupaten Mojokerto. Mengapa demikian? Hal ini dapat dilihat dari kehidupan masyarakat yang menuju *new normal* (transisi) saat ini masih banyak yang tidak menjaga jarak, baik jarak fisik maupun jarak sosial, tidak mengenakan masker saat bepergian, serta masih senang berkumpul dalam kelompok yang ramai.

Semua ini terjadi karena masih kurangnya kepedulian dari pemerintah daerah dalam mensosialisasikan dan menerapkan protokol kesehatan dalam lingkungan masyarakat. Korem 082/CPYJ sebagai satuan kewilayahan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu pemerintah daerah dan dalam hal ini sudah dilakukan berbagai upaya untuk dapat membantu pemerintah daerah guna meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat agar dapat mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan pada diri sendiri.

Hal ini terlihat dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Korem 082/CPYJ beserta jajarannya dengan membagi jajarannya kepada pengemudi ojek *online*, membuat tempat-tempat wisata menjadi

individu. Hal ini terjadi karena serangan yang *massive* oleh virus corona, dimana tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung (tidak kelihatan), terutama bagi orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat sehingga tidak ada tanda-tanda sedang sakit atau keluhan tentang kondisi tubuhnya. Hal ini akan memberikan dampak pada penyebaran serta penularan kepada orang lain yang tanpa sadar bersentuhan dengan orang tersebut.

Banyaknya masyarakat yang masih belum mematuhi protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah daerah seperti harus memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, menggunakan *hand sanitizer*, mengukur suhu tubuh, menjaga jarak baik fisik maupun sosial. Sehingga hal tersebut memerlukan peran Korem 082/CPYJ dalam membantu pemerintah daerah guna mensosialisasikan dan melaksanakan pendisiplinan kepada masyarakat yang belum patuh kepada peraturan yang sudah dibuat oleh

pemerintah daerah. Dalam hal ini bukan hanya Korem yang memiliki peranan penting dalam menegakkan aturan pendisiplinan protokol kesehatan kepada masyarakat. Tetapi, juga diperlukan adanya sinergitas antara TNI/Polri dan pemerintah daerah dalam menerapkan pendisiplinan protokol kesehatan tersebut, sehingga timbul kesadaran dalam diri setiap individu masyarakat agar rela mematuhi protokol kesehatan yang sudah diterapkan dan disampaikan kepada semua masyarakat.

Dengan adanya upaya yang dilakukan oleh Korem 082/CPYJ dan sinergitas TNI/Polri serta pemerintah daerah dalam menerapkan pendisiplinan protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di wilayah Korem 082/CPYJ, khususnya di kota dan kabupaten Mojokerto, akan memunculkan kesadaran dari seluruh masyarakat untuk dapat mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar sehingga Kota dan Kabupaten Mojokerto akan menjadi wilayah yang bersih dari Covid-19.

wisata tangguh bersahabat, kampung menjadi kampung tangguh bersahabat, dan lain sebagainya. Ini merupakan upaya-upaya yang dilakukan guna membantu pemerintah daerah untuk dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat yang berada di wilayah Korem 082/CPYJ. Namun, semua upaya yang dilakukan oleh Korem 082/CPYJ akan menjadi lebih optimal apabila terjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dan ada kepedulian pemerintah daerah untuk selalu dan tidak bosan-bosannya mensosialisasikan dan menegakkan disiplin penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat.

Dengan begitu, diharapkan masyarakat dapat mengikuti dan mematuhi aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah, baik Pemda kota maupun kabupaten. Kepedulian pemerintah daerah sangat diutamakan dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 di wilayahnya dan semuanya juga tidak terlepas dari peran Korem 082/CPYJ membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat mematuhi dan menerapkan kehidupan yang sehat. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dalam menjamin kelangsungan hidupnya dan juga kehidupan perekonomian suatu wilayah akan kembali menjadi normal. Dengan perekonomian menjadi normal maka secara otomatis kehidupan masyarakat juga akan lebih sejahtera.



PENUTUP

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa perlu adanya sinergitas TNI/Polri dan pemerintah daerah dalam menerapkan protokol kesehatan guna mencegah dan memutus penyebaran Covid-19, kepedulian pemerintah daerah dalam mensosialisasikan secara *massive* kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga jarak, baik jarak fisik maupun sosial, serta rajin cuci tangan, memakai masker ketika bepergian dan adanya peran Korem 082/CPYJ dalam membantu pemerintah daerah guna mencegah penyebaran Covid-19 di wilayahnya, dengan melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan kepada

masyarakat serta kesadaran masyarakat yang sangat penting dalam menerapkan protokol kesehatan dalam lingkungannya, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekitarnya.

Dari kesimpulan tersebut, penulis juga menyarankan kepada pemerintah daerah untuk dapat memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang masih belum mematuhi protokol kesehatan seperti memberikan sanksi push up apabila ada yang tidak menggunakan masker, setelah diberikan sanksi diberikan juga masker kepada masyarakat tersebut sehingga dengan demikian dapat memberikan dan menimbulkan kesadaran dalam diri setiap individu masyarakat.





OPTIMALISASI LEMBAGA PENDIDIKAN DALAM MENCETAK SUMBER DAYA PRAJURIT TNI AD YANG HANDAL DI ERA 4.0

Oleh: Kol Chb M.Soleh, S.H., M.M.
(Danpusdikhub Kodiklatad)

Keberhasilan Angkatan Darat dalam mencapai tugas pokok sangatlah ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah Sumber Daya Manusia (SDM), karena pada hakekatnya SDM merupakan penggerak utama dinamika suatu organisasi. Untuk mencetak SDM yang profesional dibutuhkan suatu upaya secara sistematis serta didukung sarana dan prasarana serta peralatan yang canggih sehingga diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini berkembang cepat mengarah kepada bentuk peperangan berteknologi tinggi (*cyber warfare, network centric warfare, perang berbasis robotic dan nano technology*). Era revolusi 4.0 dalam dunia militer ditandai dengan kendaraan tak berawak (*unmanned sistem*), *Artificial Intelligence (A.I)*, *robotic*, dan *Big Data*. Dampak lain adalah adanya perubahan interaksi dalam dunia militer, yang dulunya sangat berpusat pada interaksi dari sentuhan kulit (*face to face*) menuju kepada

sentuhan layar (*screen to screen*). Relasi yang terbangun menjadi sebuah relasi virtual yang dijalankan secara otomatis dan robotik. Interaksi bisa terjadi tanpa adanya kontak sosial dan komunikasi.

Merujuk pada latar belakang tersebut di atas, khususnya dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan organisasi/ satuan serta tuntutan kompetensi yang harus dimiliki oleh prajurit TNI AD di era revolusi industri 4.0, maka permasalahan yang perlu dipecahkan adalah “Bagaimanakah optimalisasi Lemdik sebagai ujung tombak dalam mencetak prajurit TNI AD yang handal di era industri 4.0?”.

Aspek **Kurikulum Pendidikan**. Pengembangan kurikulum mutlak harus dilakukan seiring dengan kondisi lingkungan eksternal yang mengalami turbulensi dan perubahan yang sangat cepat. Kurikulum pendidikan yang ideal seyogyanya bisa menjadi solusi atas permasalahan kualitas hasil didik dihadapkan dengan tuntutan tugas di satuan. Dalam suatu penyelenggaraan pendidikan idealnya menghasilkan

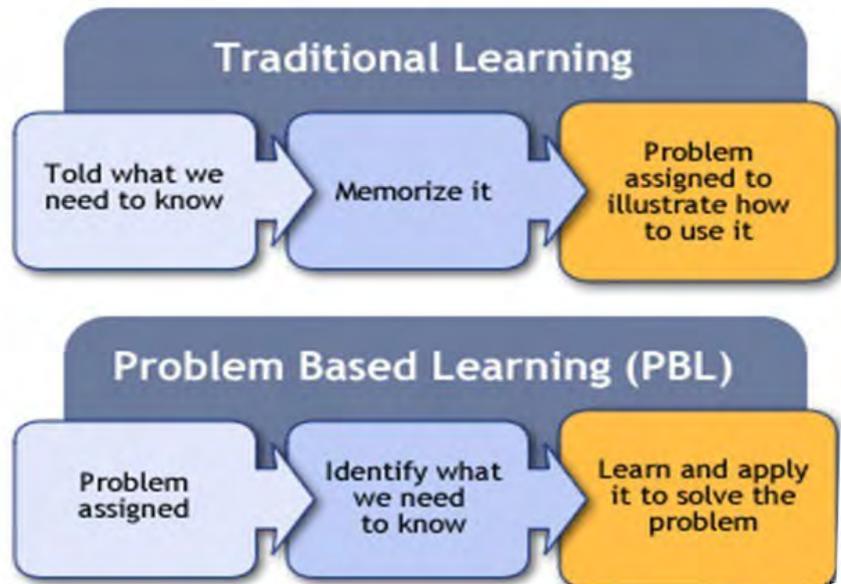
lulusan yang memiliki kompetensi mumpuni sehingga memungkinkan seseorang dapat melaksanakan segala tugas dan pekerjaan secara maksimal dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Menurut Kunandar (2007: 41) bahwa kompetensi seseorang dibagi dalam 5 (lima) bagian, antara lain:

- Kompetensi intelektual, yaitu berbagai perangkat pengetahuan yang ada pada diri individu yang diperlukan untuk menunjang kinerja;
- Kompetensi fisik, yakni perangkat kemampuan fisik yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas;
- Kompetensi pribadi, yakni perangkat perilaku yang berkaitan dengan kemampuan individu dalam mewujudkan diri, transformasi diri, identitas diri dan pemahaman diri;
- Kompetensi sosial, yakni perangkat perilaku tertentu yang merupakan dasar dari pemahaman diri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan sosial, dan
- Kompetensi spiritual, yakni pemahaman, penghayatan serta pengamalan kaidah-kaidah keagamaan. Untuk menjawab kompetensi

tersebut maka kurikulum pendidikan dikemas dalam dalam suatu kerangka pemikiran yang holistik dan komprehensif serta harus berisi konten berupa materi pelajaran yang *update* dengan perkembangan teknologi baik di bidang teknologi telekomunikasi dan informasi maupun teknologi sistem senjata.

Aspek Metode

Pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan inti dalam kegiatan proses belajar mengajar yang berisi tata cara menyampaikan materi pelajaran oleh tenaga pendidik kepada Serdik yang di dalamnya terdapat proses transfer *knowledge, skill* serta nilai-nilai kebudayaan secara teratur, sengaja dan berencana dalam situasi pendidikan. Penerapan metode pembelajaran yang tepat akan sangat membantu tercapainya tujuan dan sasaran pelajaran yang tercantum dalam kurikulum. Metode pembelajaran yang ideal adalah metode pembelajaran yang lebih terpusat kepada Serdik (*student learning center*) sehingga dapat mengeksplorasi potensi dan kemampuan Serdik. Salah satu metode pembelajaran yang dapat menjadi solusi adalah *Problem Based Learning (PBL)*. PBL merupakan model pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk mempelajari penemuan berdasarkan perencanaan dan prinsip yang sudah ditentukan atau disebut juga *discovery learning* dan sekaligus memiliki keterampilan untuk



► Pembelajaran Metode Problem Based Learning (PBL)

memecahkan masalah. Metode pembelajaran *Problem Based Learning (PBL)* dapat membangkitkan *critical thinking skill* yang sangat efektif membantu Serdik dalam menyelesaikan setiap permasalahan, karena secara sistematis *critical thinking* dapat merangsang pemikiran yang logis dan rasional untuk menghasilkan suatu ide dan kreasi serta melahirkan sebuah inovasi yang pada akhirnya akan menjadi suatu solusi (*problem solving*). Metode pembelajaran *problem based learning* dapat dioptimalkan dengan cara melibatkan partisipasi Serdik (*engagement*) berupa materi pelajaran yang dikemas dalam permainan (*gamification*) untuk merangsang pikiran Serdik tentang isi materi pelajaran dengan nuansa yang berisi tantangan (*challenge*).

Aspek Tenaga

Pendidik. Untuk dapat mengoperasionalkan kurikulum berbasis kompetensi

diperlukan tenaga pendidik (Gadik) yang profesional untuk mengajar, melatih, membimbing, serta mengarahkan peserta didik. Menghadapi tantangan perkembangan teknologi yang sangat pesat, Gadik dituntut untuk siap berubah dan beradaptasi dalam meningkatkan kualitas profesionalisme agar memiliki kompetensi sesuai dengan perkembangan. Jika Gadik hanya sebatas mentransfer ilmu pengetahuan kepada Serdik di kelas maka peran Gadik dapat tergantikan oleh teknologi, namun ada peran Gadik yang tak akan bisa tergantikan oleh teknologi adalah dalam hal mendidik karakter, moral, dan memberikan keteladanan kepada Serdik. Upaya mewujudkan Gadik yang profesional dapat dicapai melalui pendidikan formal di universitas/kampus yang sesuai dengan fungsi teknis kecabangan maupun kegiatan berupa seminar, *focus group*



► Fasilitas Pendidikan Kelas Grade A.

discussion (FGD), sarasehan, penataran/pembekalan Gumil, Studi banding dan lain-lain. **Aspek Fasilitas Pendidikan.** Dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan yang adaptif di era digital, diperlukan sarana pendukung dalam fasilitas pendidikan di Lemdik TNI AD terutama akses *internet*, *server*, dan aplikasi *big data* serta *e-learning* untuk pembelajaran dalam jaringan (*daring*). Dengan pemenuhan fasilitas tersebut diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang terampil dari segi literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Kemajuan teknologi informasi berdampak pada meningkatnya konektivitas, interaksi, dan konvergensinya batas antara manusia dan sumber daya lainnya. Untuk melangkah ke sana, tentunya konektivitas jaringan komputer dan internet menjadi tulang punggung prasarana pendidikan yang harus dipenuhi. Pemanfaatan teknologi *big data* perlu dioptimalkan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Untuk menunjang keberhasilan dalam kegiatan belajar, maka *e-learning*

harus terintegrasi dengan *e-library* yang merupakan suatu perpustakaan digital yang mampu menyimpan data dengan baik, baik itu tulisan, gambar, suara dan visual dalam bentuk file digital/elektronik dan mendistribusikannya dengan menggunakan protokol elektronik melalui jaringan komputer serta dapat diakses dengan mudah kapan pun dan dimana pun. Pembelajaran menggunakan *e-Learning*.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menghadapi perkembangan zaman di era Revolusi Industri 4.0, setiap Lemdik harus selalu melakukan perubahan. Seperti *quote* dari Winston Churchill “*To improve is to change, so to be perfect is to have changed often*”. Oleh karena itu dalam upaya menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tepat kiranya Lemdik harus dilengkapi kemampuan dan fasilitas teknologi di mana upaya pencapaian dilakukan dalam aspek pendidikan dengan beberapa inovasi dalam bidang pembinaan komponen pendidikan antara lain: 1. Penerapan kurikulum

berbasis kompetensi dengan tujuan untuk memberikan keahlian serta keterampilan sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan masing-masing kecabangan; 2. Penerapan metode pengajaran dengan model *problem based learning* untuk menghasilkan Serdik yang memiliki kreativitas, berpikir kritis, kerja sama, keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan keterampilan karakter; 3. Peningkatan kompetensi Gadik melalui peningkatan kemampuan Gadik, pendidikan dan latihan Gadik, dan 4. Pemenuhan fasilitas pendidikan yang memadai dengan memenuhi sarana internet yang aman, pemanfaatan *big data*, *e-learning*, dan *e-library*.

Demikianlah tulisan tentang Optimalisasi Lemdik dalam mencetak SDM Prajurit TN AD yang handal di era industri 4.0, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Penulis merasa masih banyak kekurangan dalam penulisannya dan masih jauh dari sempurna, sehingga diperlukan saran dan masukan guna perbaikan tulisan ini ke depan.

MENINGKATKAN PERAN AKTIF DINAS PENGADAAN ANGGARAN DARAT PADA PENYELENGGARAAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DALAM RANGKA Mendukung TUGAS POKOK TNI AD

Oleh: Kol Inf Ida Idewa Agung Hadisaputra, S.H.
(Kasubdis LPSE Disadaad)



Tugas Pokok Dinas Pengadaan Angkatan Darat (Disadaad) berdasarkan

Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 26 Tahun 2019¹ menyelenggarakan pembinaan personal dan fungsi pengadaan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Disadaad menyelenggarakan fungsi utama dan fungsi organik militer. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokoknya, Disadaad sangat ditentukan oleh sejauh mana efektif dan efisiensi pelaksanaan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pelaksanaan fungsi pengadaan. Namun pada kenyataannya saat ini apa yang ditemukan indikasi yaitu

pelaku pengadaan barang/ jasa sebagian besar masih banyak yang belum memiliki sertifikat pengadaan dan pengadaan secara elektronik di lingkungan TNI AD belum optimal serta kondisi Piranti Keras (*Hardware*) dan Piranti Lunak (*Software*) yang masih kurang. Sehingga mempengaruhi kinerja pengadaan di lingkungan TNI AD dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD. Oleh karena itu peningkatan peran aktif Disadaad pada penyelenggaraan pengadaan sangat berpengaruh terhadap pencapaian tugas pokok sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sehubungan dengan latar belakang penjelasan di atas, permasalahan pelaksanaan terutama pengadaan secara elektronik belum optimal dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang ada, seperti kepedulian para pelaku pengadaan, inovasi dan motivasi. Dari uraian di atas diambil beberapa persoalan yang harus dipecahkan, antara lain; yaitu: Pertama; Bagaimana peran organisasi Disadaad dalam penyelenggaraan pengadaan secara elektronik?;

Kedua; Bagaimana pengaruh sarana dan prasarana terhadap pengadaan secara elektronik?; Ketiga; Bagaimana pengaruh Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap pengadaan secara elektronik? Dari identifikasi persoalan tersebut, sehingga penulis akan menguraikan suatu esai yang membahas rumusan masalah yaitu “Bagaimana meningkatkan peran aktif Dinas Pengadaan Angkatan Darat pada penyelenggaraan pengadaan secara elektronik dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD”.

Untuk menjawab permasalahan ini, maka penulis mencoba menganalisa dari berbagai sudut pandang yang ada.

Pembahasan mengenai meningkatkan peran aktif Dinas Pengadaan Angkatan Darat pada penyelenggaraan pengadaan secara elektronik dalam rangka mendukung tugas pokok TNIAD dirasakan penting untuk dibahas, mengingat peran aktif Dinas Pengadaan Angkatan Darat saat ini belum memberikan hasil yang maksimal sehingga berpotensi mendapat atensi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), oleh

1. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi Disadaad

karena itu diperlukan suatu penyelenggaraan pengadaan secara elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan analisis yaitu cara menggambarkan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi data-data dan fakta yang ada, dengan menggunakan pendekatan kepustakaan yang bersumber dari referensi internet dan jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Adapun nilai guna dari penulisan esai ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai meningkatkan peran aktif Dinas Pengadaan Angkatan Darat pada penyelenggaraan pengadaan secara elektronik dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD. Maksud penulisan esai ini adalah untuk melakukan analisa secara mendalam dalam upaya meningkatkan peran aktif Dinas Pengadaan Angkatan Darat pada penyelenggaraan pengadaan secara elektronik. Sedangkan tujuan penulisan ini adalah sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan terkait guna meningkatkan peran aktif Dinas Pengadaan Angkatan Darat pada penyelenggaraan pengadaan secara elektronik dalam rangka mewujudkan pengadaan barang/jasa sesuai peraturan yang berlaku. Adapun ruang lingkup pembahasan meliputi pendahuluan,

pembahasan penutup dengan pembatasan meliputi 3 (tiga) aspek yaitu Organisasi, Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM).

Pembahasan

Tingkat kemandirian kesiapan operasional suatu kebijakan pengadaan berpengaruh terhadap peran aktif Disadaad dalam mewujudkan pengadaan sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini kebijakan yang digunakan adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018² tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan

Keputusan Kasad Nomor KEP/676NII/2019³ tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan TNIAD. Adapun upaya peningkatan peran aktif Disadaad dalam mewujudkan kebijakan tersebut terutama pengadaan secara elektronik dibutuhkan peran Organisasi Disadaad, pengaruh sarana dan prasarana yang dimiliki serta pengaruh Sumber Daya Manusia (SDM).

Kepala LKPP RI saat ini Dr. Ir. Rani Dwi Susanto.,M. Si, menyampaikan dalam paparannya bahwa belanja barang/jasa pemerintah yang terus meningkat nilai dan kompleksitasnya harus didukung oleh organisasi pengadaan yang modern serta organisasi pengadaan yang modern untuk ke depannya menjadi kebutuhan yang penting bagi proses pengadaan barang/jasa di Indonesia⁴.

Perubahan kebijakan organisasi pengadaan barang/jasa di tingkat pusat terdapat validasi organisasi penyelenggara pengadaan barang/jasa tingkat pusat yang sebelumnya melekat di organisasi Staf Logistik Angkatan Darat mulai tahun 2020 penyelenggaraan proses pengadaan barang/jasa sudah dilaksanakan di Disadaad. Permasalahan Peran Disadaad dalam penyelenggaraan pengadaan secara elektronik saat ini yaitu terdapat kondisi dimana Organisasi Disadaad masih belum optimal dikarenakan jumlah personel saat ini baru mencapai 10% dari TOP.

Organisasi Disadaad yang ada diharapkan mampu menyelenggarakan pengadaan barang/jasa khususnya pengadaan secara elektronik dapat dilaksanakan mengacu Peraturan Presiden RI 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa serta Keputusan Kasad Nomor KEP/676NII/2019 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan TNI AD.

Organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam hal ini adalah Disadaad berbentuk struktural, memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada di lingkungan TNIAD serta memiliki fungsi pengelola pengadaan barang/jasa, pengelola layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan SDM dan kelembagaan pengadaan

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3. Keputusan Kasad Nomor KEP/676NII/2019 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan TNI AD

4. <https://setkab.go.id/arah-kebijakan-kelembagaan-dan-sumber-daya-manusia-pengadaan-barangjasa/>

barang/jasa serta pelaksanaan Barang/Jasa di Lingkungan TNI AD.

Membahas permasalahan pengaruh sarana dan prasarana terhadap pengadaan secara elektronik, yaitu masih terdapatnya kondisi sarana dan prasarana yang belum siap operasional di Disadaad. Sarana dan prasarana yang ada secara garis besar memang terdapat kekurangan dari segi kuantitas dan kualitas. Sarana yang dimiliki belum terdukung secara keseluruhan dan belum sesuai standar serta prasarana yang digunakan belum ada.

Sarana dan prasarana yang ada diharapkan haruslah dalam kondisi yang baik secara kualitas dan terpenuhi secara kuantitas, dengan demikian kesiapan perasional tidak diragukan lagi untuk pelaksanaan pengadaan secara elektronik. Dengan kondisi sarana dan prasarana yang tidak siap secara kuantitas dan kualitas akan mendapat kendala dan kemungkinan keberhasilan pencapaian tugas pokok belum optimal.

Sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan pengadaan secara elektronik harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai seperti memiliki Server, Komputer, jaringan internet, perangkat *backup*, ruang server dan *bidding room* .

Membahas mengenai sarana



dan prasarana, terdapat faktor kendala yaitu Sarana yang dimiliki baru terdukung 15% dari DSPP dan belum sesuai standar. Prasarana yang digunakan belum ada. Sebagai contoh kebutuhan akan sarana antara lain: Komputer baru terdukung sebanyak 15% dari DSPP dan belum memenuhi spesifikasi teknis seperti processor i5 dan RAM 2 Gb sedangkan standar minimal processor i5 dan RAM 4 Gb, belum memiliki perangkat *backup* yang standar seperti server *backup* saat ini memiliki kapasitas 2 TB sedangkan standar kapasitas minimal 4 TB. Prasarana berupa ruangan server belum ada dan ruang khusus pelaksanaan pengadaan secara elektronik (*bidding room*) belum dimiliki.

Adapun cara mengatasi kendala dan kelemahan dalam pembinaan SDM adalah; pertama. memperbanyak kegiatan bimbingan teknis dalam rangka sertifikasi pengadaan

barang/jasa sehingga akan meningkatkan kuantitas personel pengadaan barang/jasa yang memiliki sertifikat; Kedua. Memasukan kurikulum pengadaan barang/jasa terutama pada Diklapa dan Seskoad sekaligus melaksanakan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa sehingga akan menghasilkan SDM pengadaan barang/jasa yang memiliki kemampuan serta pengetahuan pengadaan barang/jasa; ketiga. Melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan pengadaan secara elektronik seluruh satker jajaran TNI AD baik secara terpusat baik pembekalan tentang Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) maupun pelaksanaan LPSE setiap tahun secara berkala; keempat. Membuka ruang komunikasi via internet kepada semua pelaku pengadaan secara elektronik serta memberikan bimbingan teknis secara virtual tanpa dibatasi waktu untuk mengarahkan peran personel pengadaan di satker.

5 Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)



OPTIMALISASI DUKUNGAN SATUAN PERALATAN DALAM PEMELIHARAAN ALUTSISTA TNI AD GUNA KESIAPAN OPERASIONAL SATUAN

Oleh: Kol Cpl Anwar Zaelani, S.E.
(Kasubpamopster Puspalad)

TNI AD sebagai bagian integral dari TNI yang merupakan komponen bangsa dan garda depan yang bertugas menegakkan kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari setiap ancaman terhadap keutuhan bangsa dan Negara di darat.¹ Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut didukung dengan Alutsista yang lengkap dan berteknologi canggih. Saat ini Alutsista yang dimiliki satuan TNI AD sudah cukup modern dan akan terus bertambah seiring dengan pembentukan satuan dan pengembangan organisasi serta rematerialisasi Alutsista yang sudah tua/lama. Dengan demikian maka kesiapan operasional Alutsista TNI AD menjadi faktor yang sangat penting, salah satunya ditentukan oleh kemampuan pemeliharaan yang didukung oleh Satuan Peralatan yang mumpuni serta memiliki fasilitas pemeliharaan yang relatif modern dengan ditunjang oleh sistem pemeliharaan yang efektif dan efisien.

Pusat Peralatan Angkatan Darat atau Puspalad sebagai Pembina Pusat Korps Peralatan Angkatan Darat dan sebagai kekuatan yang menjalankan fungsi Bek, Har, Asnik, Intelnik, dan Litbang Peralatan.² Dalam kaitannya dengan pemeliharaan Alutsista maka Puspalad dituntut untuk lebih profesional dalam melaksanakan segenap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan penyelenggaraan sistem pemeliharaan Alutsista TNI AD yang efektif dan efisien dalam rangka kesiapan operasional Alutsista di seluruh jajaran TNI AD. Hal yang terjadi saat ini adalah belum optimalnya peningkatan sistem pemeliharaan Alutsista TNI AD berupa **kemampuan pemeliharaan (maintenance), kebutuhan Spare Parts, sarana dan prasarana pendukung serta kemampuan dukungan lainnya** yang diperlukan dari dalam negeri. Akibatnya adalah kesiapan operasional Alutsista yang masih kurang optimal untuk mendukung tugas pokok TNI AD. Oleh karena itu, maka Satuan Peralatan dituntut lebih profesional

dalam melaksanakan penyelenggaraan sistem pemeliharaan Alutsista TNI AD. Untuk itu perlunya pembahasan *Bagaimana upaya optimalisasi yang dilakukan terhadap sistem dan fasilitas pemeliharaan Satuan Peralatan guna kesiapan pemeliharaan Alutsista TNI AD?*

Hal tersebut di atas jelas merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan dengan segera, agar tidak menimbulkan kerawanan terhadap jaminan kelangsungan dan kesiapan TNI AD dalam menjaga kedaulatan negara baik dalam keadaan damai maupun perang.

Nilai guna dari penulisan tentang permasalahan ini adalah untuk memberikan gambaran kepada Pimpinan tentang bagaimana kondisi sistem pemeliharaan yang ada saat ini serta bagaimana upaya untuk mengoptimalkan kondisi tersebut. Selain itu, tulisan ini pun bertujuan agar dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pimpinan dalam menentukan kebijakan tentang bagaimana meningkatkan dukungan Satuan Peralatan

1. UU RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI Pasal 8.

2. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/184/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi (KEP) hal. 46.

dalam pemeliharaan Alutsista TNI AD guna kesiapan operasional Satuan.

Adapun ruang lingkup tulisan ini adalah membahas tentang **sistem dan fasilitas pemeliharaan** terhadap Alutsista TNI AD yang dilaksanakan oleh Satuan Peralatan guna kesiapan operasional Satuan.

Pembahasan

Sistem pemeliharaan yang diselenggarakan Puspalad adalah kegiatan yang meliputi pemeriksaan rutin sebagai pemeliharaan pencegahan, pemeliharaan ringan, perbaikan ringan, perbaikan sedang hingga berat bahkan melaksanakan *overhaul*, *repowering*, dan rekondisi.³ Sistem pemeliharaan Alutsista TNI AD saat ini pada umumnya terfokus kepada upaya pencegahan yang dilakukan oleh Satuan pengguna dengan berdasarkan Buku Petunjuk Pemeliharaan yang dimiliki. Sementara itu, di lain pihak, kemampuan Satuan pemeliharaan yang ada saat ini *dianggap masih belum maksimal dalam melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan Alutsista*. Sehingga ketika Alutsista tersebut mengalami kendala ataupun kerusakan, Satuan pemeliharaan tidak optimal dalam melaksanakan tugasnya, dikarenakan beberapa faktor yang berpengaruh antara lain;

- **Sumber Daya Manusia yang masih kurang profesional**, merupakan



penyebab hambatan utama di dalam proses pemeliharaan Alutsista. Kurangnya kemampuan personel teknisi disebabkan karena alokasi *Transfer of technology (TOT)* yang sangat minim diberikan kepada personel Satpal baik dari jumlah maupun waktu pelaksanaannya. *TOT* merupakan bagian dalam pengadaan Alutsista yang menjadi modal awal dalam pengetahuan dan kemampuan personel saat melaksanakan pemeliharaan Alutsista. Namun, tingkatan *TOT* sendiri bervariasi disesuaikan dengan prioritas dan dihadapkan pada keterbatasan anggaran, alokasi personel serta permintaan dari *user* yang juga menginginkan pemberian *TOT* untuk personel operator Alutsista.

- **Dukungan suku cadang yang diperlukan untuk pemeliharaan belum terpenuhi sesuai kebutuhan** karena beberapa faktor antara lain; pengadaan yang relatif lama dan keterbatasan anggaran di mana Indeks anggaran pemeliharaan Alutsista saat ini masih cukup rendah dan belum ada ketentuan yang mengatur secara menyeluruh.
- **Kesiapan fasilitas pemeliharaan kurang memadai** antara lain karena belum terprogram dan keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana. Sistem pemeliharaan Alutsista TNI AD dilaksanakan melalui kegiatan pemeriksaan materiil, perbaikan kerusakan, penggantian suku cadang sampai

3. Keputusan Kasad Nomor Kep/751/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Juknis Prosedur Pemeliharaan materiil Peralatan.

dengan pengujian yang dilakukan secara mendetail dan presisi sehingga memerlukan alat kerja dan sarana khusus untuk mendukung pelaksanaan tugas yaitu berupa *Special Tools and Test Equipment (STTE)*.

Optimalisasi dukungan Satpal terhadap pemeliharaan Alutsista TNI AD guna kesiapan operasional Satuan.

Dalam rangka mewujudkan optimalisasi dukungan Satpal terhadap pemeliharaan Alutsista TNI AD guna kesiapan operasional Satuan, maka diperlukan suatu kebijakan yang mendasar dalam meningkatkan kemampuan SDM personel Satpal dan sarana prasarana guna pelaksanaan sistem pemeliharaan Alutsista yang modern. Hal tersebut dengan harapan agar pelaksanaan pemeliharaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien, yang di antaranya dilaksanakan dengan melakukan hal berikut.

- **Standarisasi rekrutmen personel.** Personel Bintara, Tamtama, dan PNS diharapkan merupakan **lulusan Sekolah Teknik mesin, elektro maupun kimia atau yang terkait bidang Peralatan**, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya di Satpal akan lebih cepat menyesuaikan diri. Selain itu, perlu dilaksanakan pelatihan khusus pemeliharaan dalam rangka pendidikan di Pusdikpal, program *technical representative*

(*Tekrep*), *TOT* atau *Transfer of science* bagi personel Satpal yang harus dituangkan dalam setiap kontrak pengadaan Alutsista TNI AD dan perlunya dituangkan kewajiban penjual/ mitra untuk memberikan satu paket materiil *alat instruksi (Alins)* yang dapat digunakan untuk proses belajar mengajar di Pusdikpal Kodiklatad. Sehingga setiap siswa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang Alutsista TNI AD termasuk di dalamnya mempelajari bagaimana mengatasi setiap masalah yang mungkin terjadi terhadap materiil tersebut.

- **Pengadaan Suku Cadang Berbasis Life Cycle Cost (Biaya Daur Hidup).** *Spare parts/suku cadang* merupakan faktor yang sangat penting dari kegiatan pemeliharaan Alutsista TNI AD, sistem pemeliharaan yang saat ini berjalan sudah sesuai

aturan administrasi yang berlaku, di mana perencanaan pengadaan suku cadang di Puspalad maupun Satpal di tingkat Kotama berdasarkan penentuan kebutuhan ajuan dari Satuan pemeliharaan di lapangan. Mengingat Alutsista yang tergelar sudah digunakan dalam berbagai kegiatan dan latihan yang tentunya sudah mengalami penurunan kondisi, maka sudah menjadi suatu keharusan untuk mengupayakan sistem pemeliharaan Alutsista berjalan dengan efektif dan efisien. Adapun upaya yang dapat ditempuh adalah dengan membuat suatu perubahan dalam proses perencanaan pemeliharaan Alutsista yaitu membuat regulasi sistem pengadaan kebutuhan suku cadang menjadi *sistem stocking* persediaan gudang Peralatan, baik di pusat ataupun di daerah. Pengadaan persediaan



suku cadang dapat dihitung sesuai kebutuhan stok minimum yang diperlukan Alutsista melalui perhitungan *Life Cycle Cost* dengan pola pemeliharaan periodik lima tahunan. Hal ini tentunya membutuhkan dukungan anggaran yang memadai, karena SDM yang handal dan Sarpras yang dimiliki Satpal tentu tidak akan berarti apabila tidak diiringi dengan dukungan anggaran pemeliharaan yang memadai.

- **Peningkatan Sarana Prasarana Pemeliharaan.** Tergelarnya Alutsista TNI AD yang baru dan berteknologi tinggi yang sudah dialokasikan ke daerah tertentu dengan pertimbangan taktis dan strategis oleh Pimpinan TNI AD, maka Puspalad telah merumuskan kebijakan pada pemenuhan kebutuhan peranti keras yaitu sarana dan prasarana pemeliharaan berupa pembangunan *workshop-workshop, penambahan alat kerja berupa STTE* sesuai dengan Alutsista yang menjadi rawatan serta sarana pendukung yang diperlukan melalui program *peningkatan fasilitas bengkel*.

Kesimpulan

Mengalir dari latar belakang dan pembahasan tulisan ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

Sistem pemeliharaan Satpal yang dilaksanakan untuk

mendukung pemeliharaan Alutsista TNI AD terdiri dari beberapa bagian sistem yang saling terkait, bertingkat dan berkelanjutan sesuai dengan tingkatan pemeliharaan dan tingkatan Satpal pelaksana pemeliharaan materiil. Adapun beberapa hal penting yang menjadi sorotan dalam tulisan ini terkait sistem pemeliharaan yang dilakukan oleh Satpal adalah **SDM, Spare Parts/suku cadang, sarana dan prasarana**.

Sistem pemeliharaan Alutsista TNI AD akan berjalan dengan optimal apabila semua bagian terkait yang ada di dalamnya terpenuhi dengan baik. Kendala di bidang SDM yaitu masih kurangnya kemampuan personel teknis disebabkan karena **alokasi Transfer of Technology (TOT) yang sangat minim diberikan kepada personel Satpal**, di antaranya dengan mendorong adanya pelatihan, program OJT dan pendidikan di Pusdikpal. Kendala kebutuhan Spare Parts/suku cadang dapat diatasi melalui perhitungan *Life Cycle Cost* dengan pola pemeliharaan periodik lima tahunan. Selanjutnya untuk kendala sarana dan prasarana terutama *Special Tools and Test Equipment (STTE)*, berbagai upaya telah ditempuh oleh Puspalad dan jajarannya untuk mengatasi kendala tersebut di antaranya melaksanakan pengajuan untuk program *workshop* dan peningkatan prasarana pemenuhan alat kerja bengkel terutama *Special Tools and Test Equipment (STTE)* kepada komando atas.

Saran

Merujuk pada kesimpulan tersebut, maka dapat disarankan kepada unsur Pimpinan beberapa hal dengan pelaksanaan sebagai berikut;

- Menetapkan aturan sebagai pedoman dalam rekrutmen personel (Ba, Ta & PNS) Satpal berbasis lulusan sekolah teknik untuk diarahkan menjadi tenaga ahli atau instruktur bagi personel lainnya di Satuan.
- Dapat menerapkan Sistem pengadaan *spare parts/suku cadang* yang berbasis *Life Cycle Cost* dan *Transfer of Technology* guna mentransformasikan sistem pemeliharaan Satpal agar mampu mendukung pemeliharaan Alutsista TNI AD.
- Menetapkan aturan *Transfer of Technology (TOT)* pemeliharaan bagi personel Satpal yang harus ditaati dalam pengadaan Alutsista untuk mendukung pemeliharaan selanjutnya dan mohon dapatnya agar dalam setiap kontrak pengadaan Alutsista baru sudah *include* Alins murni dan atau tidak murni.

Demikian tulisan ini disusun, dengan harapan dapat memberikan masukan dalam mempertimbangkan kebijakan tentang bagaimana meningkatkan dukungan Satuan Peralatan dalam pemeliharaan Alutsista TNI AD guna kesiapan operasional Satuan.



DENGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI MENGUBAH KONFLIK SAPI MENJADI POTENSI PEMBERDAYAAN KEKUATAN EKONOMI MASYARAKAT MASNI, MANOKWARI

Oleh: Kol Arm Airlangga
(Dandim 0801/Kota Manokwari)

Sebagai salah satu daerah transmigrasi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari dihuni oleh masyarakat yang heterogen. Masyarakat asli Papua hidup berdampingan dengan masyarakat transmigran asal daerah lain, yang tentunya melahirkan beragam kompleksitas permasalahan sosial, budaya dan ekonomi. Namun, di balik permasalahan tersebut juga terdapat potensi ekonomi besar yang belum tergarap dengan baik. Sektor pertanian, perkebunan dan peternakan berkontribusi cukup besar bagi perekonomian masyarakat di Distrik Masni.

Salah satu contohnya adalah di Kampung Muara Prafi. Masyarakat Kampung Muara Prafi terdiri dari 240 Kepala Keluarga dengan komposisi demografi 40% Suku asal Nusa Tenggara Timur, 40% Suku Jawa, 10% suku Meag (Papua), dan 10% Campuran. Mayoritas pekerjaan mereka adalah petani dan peternak, dan sedikit warga yang bekerja sebagai aparat sipil negara (ASN).

Berdasarkan data Dinas Pertanian/Peternakan Kabupaten Manokwari jumlah ternak sapi di Kabupaten Manokwari lebih dari 25 ribu ekor dan sekitar 4000 ekor berada di Distrik Masni tempat sertu Supriyanto bertugas. Data tersebut menunjukkan pertumbuhan populasi usaha pemeliharaan ternak sapi sangat prospek untuk meningkatkan ekonomi di Distrik Masni, Kabupaten Manokwari. Dalam konteks inilah Babinsa Koramil 1801/07 yang dimotori oleh **Sertu Supriyanto** berupaya melakukan pendampingan, termasuk melakukan identifikasi dan solusi atas masalah yang dihadapi oleh para peternak sapi, termasuk didalamnya terkait dengan adanya gesekan sosial antara peternak dengan para petani sawah dan pemilik perkebunan.

Kampung Muara Prafi dikenal sebagai salah satu daerah penghasil sapi di Kabupaten Manokwari. Namun sayangnya, pola peternakan sapi oleh masyarakat setempat masih dikelola secara tradisional, yaitu dengan melepasliarkan sapi-sapi milik mereka.

Kondisi tersebut selain tidak menghasilkan produktifitas ternak yang baik, juga menimbulkan konflik sosial di antara masyarakat yang hidup berdampingan di desa tersebut. Rata-rata, satu kepala keluarga di desa tersebut memiliki 8-12 ekor sapi dan ternak mereka tersebut dilepasliarkan begitu saja. Dampaknya tentu dapat dibayangkan, ternak tersebut akhirnya masuk ke lahan pertanian dan perkebunan milik warga lainnya. Kerusakan lahan pertanian dan perkebunan ini menimbulkan friksi sosial antar warga, yang bila dibiarkan berpotensi menjadi konflik sosial yang lebih besar.

Secara umum, penyebab warga melepasliarkan ternak mereka adalah karena mereka tidak terbiasa mencari rumput, menggampangkan permasalahan, kurangnya kesadaran bahwa tetangga juga ingin mendapat penghasilan dari hasil bertani atau berkebun, kurangnya lahan pengangonan dan kurangnya lahan untuk menanam rumput.

Selain menimbulkan dampak kerugian ekonomis



► Contoh sapi warga yang ditenak 'liar' di Distrik Masni, Manokwari

bagi pemilik lahan kebun, pemilik ternak juga pada dasarnya mengalami kerugian yang sama. Akibat friksi sosial yang berlarut, masyarakat setempat menyepakati peraturan tidak tertulis untuk mengatasi masalah kerugian. Apabila pemilik kebun menangkap sapi yang merusak lahannya, maka dia dapat menjual sapi tersebut dan hasilnya dibagi dua oleh pemilik sapi.

Di sisi lain, warga pemilik sapi juga kesulitan untuk menjual sapi mereka, karena untuk menangkap sapi miliknya, membutuhkan waktu sampai 2 minggu karena keberadaannya entah di mana. Sehingga, aset ternak yang mereka miliki bukan merupakan aset yang mudah untuk dijual, belum lagi mereka juga harus menanggung ongkos menangkap sapi miliknya sebesar Rp. 500.000/ekor.

Gesekan kepentingan antar warga masyarakat tersebut merupakan pekerjaan sehari-hari yang dihadapi pihak Koramil setempat, dalam hal ini Babinsa yang ditugaskan

di wilayah tersebut untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.

Selain aspek teknis tentang upaya peningkatan dan pengembangan peternakan, serta strategi pembudidayaan dan pemasaran, tugas Babinsa yang dimotori oleh **Sertu Supriyanto** adalah menjaga dan menjamin agar potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat ini tidak tergerus oleh masalah keamanan sebagai implikasi logis karena adanya pergesekan sosial ditengah masyarakat. Tugas **Sertu Supriyanto** dan satuan lainnya adalah mengeliminir besarnya potensi konflik yang dapat bereskalasi menjadi pertikaian sosial yang lebih *massif*, yang disebabkan karena ketiadaan lahan bagi para peternak, sehingga sapi-sapi mereka digembalakan secara liar, bahkan dengan radius wilayah yang sangat jauh yang akhirnya merusak ekosistem pertanian dan perkebunan warga lainnya.

Fakta Empiris Problem Peternakan Sapi di Distrik Masni, Manokwari

Selain aspek teknis tentang upaya peningkatan dan pengembangan peternakan, serta strategi pembudidayaan dan pemasaran, tugas Babinsa yang dimotori oleh **Sertu Supriyanto** adalah menjaga dan menjamin agar potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat ini tidak tergerus oleh masalah keamanan sebagai implikasi logis karena adanya pergesekan sosial ditengah masyarakat. adalah melakukan upaya untuk mengeliminir besarnya potensi konflik yang dapat bereskalasi menjadi pertikaian sosial yang lebih *massif*, yang disebabkan karena ketiadaan lahan bagi para peternak, sehingga sapi-sapi mereka digembalakan secara liar, bahkan dengan radius wilayah yang sangat jauh yang akhirnya merusak ekosistem pertanian dan perkebunan warga lainnya.

Secara substantif, problem mendasar masalah peternakan di Distrik Masni, khususnya di Kampung Muara Prafi dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- Timbulnya konflik sosial antara pemilik sapi dan pemilik kebun terjadi

karena para peternak tidak memiliki dan menyiapkan kandang dan pakan ternak.

- Pemilik sapi dan pemilik kebun mengalami kerugian dikarenakan ada hukum adat (aturan tidak tertulis) yang disepakati. Yakni apabila pemilik kebun atau pertanian menangkap sapi tersebut, maka sapi-sapi itu dapat dijual dan hasilnya dibagi dua dengan petani atau pemilik kebun, sedangkan hasil pembagian tidak memberikan kompensasi yang memadai untuk menggantikan kerusakan kebun yang dimiliki oleh pemilik kebun. Selain itu, warga pemilik sapi juga kesulitan menjual sapi karena luasnya wilayah atau area menangkap sapi, sehingga dibutuhkan waktu sampai lebih dari dua minggu untuk mendapatkan sapi kembali. Jika menggunakan tenaga orang lain untuk menangkap sapi, maka akan dikenakan biaya ongkos sapi yang berkisar kurang lebih sebesar Rp.

500.000/ekor. Persoalan lain adalah para peternak dihadapkan pada rentenir – ijon yang menyebabkan harga sapi per ekornya menjadi di bawah harga pasar.

- Menurunnya nilai ekonomis pemilik kebun dikarenakan rusaknya perkebunan oleh sapi yang dilikarkan, dikarenakan hasil pembagian hasil dari pemilik sapi yang telah merusak kebun tidak memberikan kompensasi yang memadai untuk menggantikan kerusakan kebun.

Selain tiga problem utama tersebut diatas, problem lain terkait dengan kondisi obyektif Masalah peternakan sapi di Distrik Masni, Manokwari Papua Barat adalah mayoritas cara berternak yang masih tradisional, yakni dilikarkan di areal perkebunan kelapa sawit. Akibat dari hal tersebut menimbulkan perkawinan sedarah sehingga ternak tersebut makin lama postur tubuhnya semakin kecil.

Penyelesaian Permasalahan

Sersan Satu (Sertu) Supriyanto, adalah Babinsa yang bertugas di kampung Muara Prafi dan Kampung Meiforga. Riwayat pengalamannya sebagai bintang pembina desa telah cukup panjang. Sejak tahun 2014, dia telah mengemban tugas membina masyarakat di berbagai wilayah penugasan, seperti di Koramil 04 Distrik Sinak/Kodim 1714/Puncak Jaya, Koramil 09/Distrik Anggi Kodim 1801/BS Manokwari dan saat ini di Koramil 07/ Distrik Masni Kodim 1801/BS Manokwari.

Dengan berbekal pengalamannya yang cukup panjang dalam membina masyarakat, Sertu Supriyanto berhasil mengelaborasi permasalahan gesekan sosial yang terjadi di Kampung Muara Prafi dan menyusun langkah penanganan permasalahannya. Dia menggulirkan program sosialisasi bagi pemilik ternak dengan tema pokok “Pola Ternak Beretika”. Selain dapat menyelesaikan konflik sosial, program ini juga diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas peternakan warga masyarakat.

Sertu Supriyanto mengajak masyarakat agar tidak lagi melepasliarkan ternaknya dengan cara mengandangkan ternak dengan memberi batas pagar pada lahan yang disiapkan, serta menyiapkan pakan segar yang ditambah dengan asupan formula tambahan berupa pakan hasil fermentasi.

Agar sosialisasi program tersebut berjalan maksimal,



➤ Pembangunan kandang

dia juga berkoordinasi secara intensif dengan pemimpin pemerintahan kampung setempat dan tokoh-tokoh masyarakat. Akhirnya, berkat kegigihannya, program pembinaan warga peternak sapi tersebut masuk dalam pembahasan Musyawarah Rencana Pembangunan Kampung, dan disepakati oleh seluruh *stakeholder* masuk ke dalam anggaran program kesejahteraan yang bersumber dari anggaran dana desa. Dengan telah tercapainya dukungan dana pemberdayaan masyarakat dari pemerintahan kampung, Sertu Supriyanto kemudian membentuk kelompok ternak Sapi yang diberi nama Moskur Markus (Tingkat Markus). Penamaan ini bertujuan untuk tetap menghargai perintis Kampung atau keluarga kepala suku. Dalam konteks ini, keputusan yang diambil tetap menghargai pranata masyarakat kampung suku asli Papua, sebagai bentuk kearifan lokal.

Setelah kelompok ternak terbentuk, musyawarah kemudian berlanjut pada rencana kegiatan pembuatan kandang komunal. Disepakati juga pola pengerjaannya menggunakan asas gotong royong untuk menghemat biaya dan menambah target penyiapan kandang, sehingga program ini dapat berdayaguna maksimal bagi masyarakat.

Sentuhan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Pemberdayaan Masyarakat

Dengan terbentuknya kelompok ternak sapi Moskur

Markus, pola peternakan warga juga telah mendapat sentuhan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga proses penggemukan sapi dapat lebih terukur dan terencana hasil produksinya. Untuk mendorong peningkatan produksi penggemukan sapi, Sertu Supriyanto juga menggalakkan penggunaan formula asupan tambahan yang diberi nama ROTER (ramuan organik ternak). Bahan baku formula ini sangat mudah didapat oleh masyarakat, yang terdiri dari:

Proses pengolahan formulanya pun cukup mudah, seluruh bahan tersebut cukup diblender dan selanjutnya difermentasi dalam wadah khusus berupa jerigen. Setelah melalui proses fermentasi selama 4-7 hari, formula ROTER telah jadi dan dapat diberikan langsung kepada ternak sapi dengan cara dicampurkan dalam pakan segar yang telah disiapkan.

Dengan asupan tambahan ini secara ekonomis dapat meningkatkan nilai tambah hasil produksi ternak, mengingat dalam waktu 6 bulan berat badan sapi meningkat cukup pesat, berbeda dengan saat dilepasliarkan.

Proyeksi Target Berkesinambungan

Agar hasil pembinaan masyarakat dapat tercapai secara maksimal Kodim 1801/BS Manokwari beserta jajarannya terus mengupayakan agar program

pembangunan kandang dan penyediaan lahan pakan dapat terus dikembangkan. Upaya ini ditempuh melalui komunikasi dan sosialisasi intensif dengan pemangku wilayah setempat, yaitu pemerintah daerah dan unsur-unsur terkait lainnya..

Ke depannya akan dikomunikasikan kepada Pemerintah Daerah agar dapat mendukung memberikan bantuan sapi-sapi unggulan agar regenerasi sapi di wilayah Masni kedepannya akan memiliki sapi unggulan.

Dengan melihat fakta empiris timbulnya mutual intension dan relasi sosial serta dukungan masyarakat terhadap peran TNI, kegiatan pembinaan teritorial TNI yang dilakukan oleh para Babinsa, terbukti mampu mewujudkan bakti kemanunggalan TNI dengan Rakyat. Selain itu, juga berhasil menciptakan suasana yang memungkinkan berkembangnya potensi lokal yang dimiliki masyarakat dengan pendekatan nilai budaya masyarakat setempat.

Peran Babinsa dan unsur satuan lain, sebagai ujung tombak keberhasilan pembinaan teritorial di Distrik Masni, Manokwari, Papua Barat ini patut diapresiasi karena melalui sikap dan perilaku serta keteladanan mereka, terbukti dapat menciptakan suasana yang membangkitkan motivasi dan etos kerja masyarakat dalam mendukung seluruh program yang dilaksanakan.

KODIM 1311/MOROWALI BERSAMA PEMERINTAH DAERAH POLRES MOROWALI DAN POLRES MOROWALI UTARA BERSINERGI MENYIAPKAN DAPUR UMUM UNTUK MASYARAKAT YANG TERDAMPAK COVID-19

Oleh: Letkol Inf Raden Yoga Raharja, S.E., M.M., M.Ipol.
(Dandim 1311/Morowali)



Sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa tujuan membentuk pemerintahan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dilakukan melalui pembangunan nasional secara merata diberbagai bidang, baik pada aspek kesejahteraan maupun aspek keamanan.

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah

memiliki esensi mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat untuk peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mencermati kondisi wilayah Indonesia secara umum terdapat beberapa permasalahan yang pada eskalasi dan kondisi tertentu dapat mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dan stabilitas nasional. Permasalahan dimaksud antara lain menyangkut penanganan terhadap dampak bencana alam, aksi pemogokan, dan konflik komunal.

Pada kondisi biasa, penanganan isu-isu tersebut diatas dilakukan dengan menggunakan instrumen reguler baik yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun unsur pemerintahan di daerah. Pada kondisi khusus di mana instrumen reguler memiliki keterbatasan kemampuan dan

permasalahan yang dihadapi diluar kapasitas instrumen yang ada, dan dalam rangka mencegah kerugian lebih besar yang dapat menimpa masyarakat, diperlukan instrumen khusus yang memiliki kapasitas tertentu yang dapat digerakkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Instrumen khusus dimaksud juga diperlukan dalam membantu fungsi pemerintahan di daerah pada wilayah-wilayah tertentu seperti yang letaknya jauh dari pusat pertumbuhan dengan akses yang sulit atau wilayah yang dilanda konflik atau sering mengalami gangguan kriminal bersenjata.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah alat negara yang memiliki kemampuan dan tergelar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004, kemampuan TNI dapat didayagunakan untuk membantu pelaksanaan fungsi pemerintah dalam kondisi dan situasi yang memerlukan sarana, alat, dan kemampuan TNI.

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 4 dan Pasal 5 menyatakan bahwa

pertahanan negara bertujuan untuk menjaga, melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman, serta berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 10 menyatakan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan daerah yang menjadi kewenangannya yaitu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

TNI dan Polri bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali mendirikan dapur umum bertempat di Mapolres Morowali untuk menyediakan makanan yang akan didistribusikan kepada masyarakat terdampak COVID-19. Pendirian dapur umum ini kegiatan dilakukan oleh Kepolisian bersama TNI dan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali untuk menyediakan makanan bagi masyarakat selama masa pandemi.

Dengan adanya dapur umum sinergitas TNI/Polri ini, selain untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19, juga berdampak positif dalam meningkatkan keakraban, keharmonisan, dan kebersamaan antara aparat negara, khususnya personel Kodim 1311/Morowali dan Polres Morowali. Pemberian logistik ini merupakan bentuk perhatian bersama dari keluarga Besar Kodim 1311/Morowali, maupun Polres



Morowali, dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat terjalin hubungan yang baik antara TNI-Polri, Pemda, dan masyarakat. Selain itu, lanjut Dandim, kegiatan ini untuk menjalin silaturahmi dengan warga, meskipun sederhana namun mempunyai hikmah dan arti yang sangat luar biasa. Tetap bersatu agar masyarakat merasa aman dan nyaman. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa TNI-Polri dan Pemda tetap bersama-sama, bersatu agar masyarakat merasa aman dan nyaman.

Sementara Kapolres Morowali, AKBP Bayu Indra Wiguno SIK., M.IK., mengatakan, “Selain itu juga, ini merupakan bentuk perhatian bersama dari keluarga besar Polres Morowali maupun Kodim 1311/Morowali dan Pemda. Dengan kebersamaan ini, diharapkan dapat terjalin hubungan yang baik antara masyarakat dan anggota Polri – TNI dan juga pemda. Serta juga diharapkan akan terus terjalin sinergitas TNI-Polri dan Pemda Kabupaten Morowali.”

Bupati Morowali Drs. Taslim mengatakan bahwa

dapur umum ini diperuntukkan bagi mereka yang terdampak pandemi Covid-19, diperuntukkan kepada masyarakat yang betul-betul terdampak Covid-19 serta harus tepat sasaran. Dapur umum ini adalah bentuk sinergitas dari Pemda Morowali, Polri dan TNI dalam percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Morowali. Menurut salah satu warga yang diminta keterangannya, terkait dengan dapur umum tersebut, dikatakan bahwa ia sangat berterima kasih kepada Pemerintah Daerah, Polri, dan TNI atas perhatiannya kepada masyarakat. Dengan adanya dapur umum untuk kepentingan masyarakat, sangat dirasakan manfaatnya untuk mereka. Harapannya adalah agar kegiatan pembagian nasi ini bisa tetap berjalan di masa Covid-19 ini, karena sangat membantu mereka. Pada kondisi saat mereka tidak bisa bekerja seperti dulu lagi guna menafkahi keluarga, mereka sangat mengapresiasi soliditas Pemerintah, TNI dan Polri dalam memerangi Covid-19 di Kabupaten Morowali.

IMPLEMENTASI *LESSONS LEARNED* SUSOPSGAB AUSTRALIA MELALUI UJI COBA DOKTRIN PROSEDUR PENENTUAN SASARAN (*TARGETING PROCESS*) PADA LATIHAN POSKO 1 & 2 YONARMED-17/KOMPOSIT RENCONG CAKTI TA. 2019

Oleh: Letkol Arm Oke Kistiyanto, S.A.P
(Dandim 0103/AUT)



Pada bulan Agustus 2019, penulis mendapat kesempatan mengikuti kursus operasi gabungan, *Overseas Joint Warfare Course (OJWC)*, di Australia bersama 30 personel militer trimatra dari 15 negara lainnya yakni Brunei, Fiji, Irak, Yordania, Lebanon, Malaysia, Filipina, Singapura, PNG, Srilanka, Australia, Uni Emirat Arab, Vanuatu, dan Vietnam. Selama mengikuti pendidikan, ada beberapa pelajaran yang dapat dipetik (*lessons learned*), terutama berkaitan dengan penyempurnaan doktrin metodologi pengambilan keputusan TNI (PPKM: Proses Pengambilan Keputusan Militer) yang digunakan oleh seluruh matra TNI saat ini serta PPKT (Proses Pengambilan

Keputusan Taktis) yang dipakai oleh TNI AD.

Hasil analisis penulis saat melaksanakan OJWC, ketika dibandingkan dengan JMAP, ternyata PPKM yang dimiliki oleh TNI masih belum sempurna. Penulis berpendapat TNI perlu mengadopsi 3 doktrin lainnya agar PPKM bisa operasional dan efektif digunakan. Tanpa ketiga doktrin ini, analisis dalam proses Biltus akan kehilangan bobotnya, sehingga pada pelaksanaan operasi banyak hal yang tidak terduga akan muncul di luar dugaan kita dan kita tidak siap akan perubahan tersebut. Doktrin yang perlu diadopsi adalah: 1) **Intelligence Preparation for War/Battle**. Di Australia disebut IPOE (*Intelligence Preparation for Operational Environment*) sedangkan Amerika menyebutnya IPB (*Intelligence Preparation for Battlespace*). 2) **Operational Art**. Ini adalah “roh” dalam pengambilan keputusan di level operasional, baik itu dalam operasi gabungan maupun operasi matra. Metodologi ini menjadi jembatan antara level strategis (*ends, means, ways*) dengan level taktis. Ini terdiri 2 bagian yakni dari *operational design* dan *arrangement of operation*. 3) **Targetting Process (TP)**

atau **Prosedur Penentuan Sasaran**. Ini merupakan “roh” dari staf Korbantem. Proses metodologi ini sebenarnya penyempurnaan dari doktrin Korbantem (koordinasi bantuan tembakan) yang dimiliki oleh TNI. Doktrin ini terdiri 6 tahapan yang berlangsung selama proses JMAP/PPKM. Tahapan tersebut dikenal dengan F2T2EA (*Find-Fix-Track-Target-Engage-Assess*). Ini serupa dengan metodologi AB Amerika dengan D3A (*Decide-Detect-Deliver-Assess*) dan F3EAD (*Find-Fix-Finish-Exploit-Analyze-Disseminate*) pada level taktisnya.

Uji coba doktrin pada Latposko 1 & 2 Yonarmed-17/Komposit RC

Berkaca dari pengalaman Susopsgab (OJWC) di Australia, atas seizin Pangdam IM, Danpussenarmed, dan Danrindam IM, maka pada bulan November 2019, penulis diberikan kewenangan secara terbatas untuk menguji doktrin *Prosedur Penentuan Sasaran (Targetting Process)* ketika pelaksanaan Latihan Posko 1 & 2 Yonarmed-17/Komposit RC Kodam IM. Saat itu penulis juga berinisiatif mencoba membuat suatu korelasi mekanisme hubungan kerja antara Komandan dan Staf dalam Biltus yang

dilaksanakan di tingkat Brigade (Satuan Manuver) hingga di tingkat Yonarmed (Satuan Bantem) yang diselingi kerja staf khusus bantem di PKBT Brigade. Karena faktanya bahwa Danyonarmed bekerja di tiga Posko (Posko Brigade Tim Pertempuran [BTP], PKBT Brigade, dan Posko Yonarmed) dirasakan cukup membingungkan bagi pejabat pelaku yang mengikuti latihan. Kapan Danyonarmed berada di Posko Brig, kapan Danyonarmed berada di PKBT Brig, dan kapan Danyonarmed ada di Posko Armed. Sekaligus menyempurnakan doktrin PPKT yang digunakan TNI AD yang ternyata hanya bisa operasional di satuan infanteri dan belum bisa operasional di satuan Banpur seperti Yonarmed. Fakta ini terlihat dari wawancara kepada mantan Pasis Diklapa 1 Armed TA. 2019 (Pasiops dan Pasipers Yonarmed-17/K) yang tidak diajarkan PPKT Armed (tetapi PPKT Inf) dan wawancara kepada Kabaglat Rindam IM, Kolonel Inf Andy Mustafa, tentang sulitnya pembuatan naskah latihan Latposko 1 & 2 Armed dikarenakan tidak adanya referensi PPKT Armed.

Metodologi T3N (Tentukan Temukan Tembak Nilai)

Prosedur penentuan sasaran merupakan metodologi yang diadopsi dari FM 6-20-10 *tactics, techniques and procedures for the targeting process*. Doktrin ini merupakan bagian dari proses PPKT yang membantu Komandan untuk melaksanakan fungsi Korbantem. Dengan metodologi T3N (Tentukan Temukan Tembak Nilai), keinginan komandan bisa diterjemahkan melalui suatu proses pemilihan target, menentukan



penggunaan sarana Bantem yang tepat, bagaimana cara mencari target tersebut, kapan target tersebut dibutuhkan dan bagaimana menembak mereka sehingga menghasilkan efek yang tepat. Ini bisa dilihat pada bagan di Gambar 2.

Langkah pertama dan yang terpenting dari prosedur penentuan sasaran adalah **Tentukan**. Menentukan target yang akan diserang membutuhkan prioritas dalam pengumpulan intelijen maupun perencanaan tembakan. Beda sasaran beda pula cara penentuan sasaran. Ada 4 macam sasaran yang dikenal dalam proses ini (perhatikan Gambar 3). Prioritas tembakan harus ditetapkan di setiap tahapan atau waktu kritis dalam operasi. Keberhasilan penentuan sasaran akan langsung berhubungan dengan rencana operasi/perintah operasi Dansat manuver. Ini bisa dilihat dari skema korelasi pada Gambar 2 yang mana proses Biltus (PPKT) semuanya berkaitan dengan langkah pertama dari prosedur penentuan sasaran. Pada langkah ini, staf PKBT bersama S1 dan S2 Brigade bersama-sama menentukan sasaran yang akan ditembaki dengan

cara membuat daftar sasaran. Daftar sasaran bisa didapat dari data intelijen awal S1 atau yang dinamakan IPB (*intelligence preparation for battlefield*). Data tersebut diidentifikasi dan dikelompokkan sasaran mana yang mempunyai nilai tinggi yang dinamakan TNT (*target nilai tinggi*) atau HVT (*High Value Target*) dan sasaran mana yang mempunyai dampak terbesar jika dihancurkan yang dinamakan THT (*Target Hasil Tinggi*) atau HPT (*High Payoff Target*).

Dampak kehancuran yang diharapkan dinamakan efek. Terminologi ini digunakan pertama kali pada Perang Teluk (Perang Irak 1) 1990, untuk mendeskripsikan dampak operasi (efek) yang dilakukan sehingga memiliki pengaruh terhadap operasi, sasaran, tujuan lainnya. Jika dianalogikan seperti efek domino. Satu domino jatuh, maka domino yang lain akan jatuh. Biasanya efek berkaitan dengan CoG (*Center of gravity*) dengan terminologinya yakni CC (*Critical Capability*) atau Kemampuan Kritis (PK), CR (*Critical Requirement*) atau kebutuhan kritis (BK), dan CV (*Critical Vulnerability*) atau Kerawanan Kritis (RK).

Tujuannya untuk melihat *outcome* (hasil/keluaran) dari kegiatan dalam operasi yang dilakukan, sehingga dengan penggunaan kekuatan minimal akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dari keluaran tersebut dapat disusun prioritas sasaran. Dalam tahap ini ada beberapa produk yang dihasilkan PKBT di antaranya: Daftar Sasaran yang merupakan adopsi dari *Target List Worksheet*, DTHT (Daftar Target Hasil Tinggi) yang merupakan adopsi dari HPTL (*High Payoff Target List*), MPS (Matriks Panduan Sasaran) yang merupakan adopsi dari AGM (*Attack Guidance Matrix*), Folder Sasaran yang merupakan adopsi dari *Target Spreadsheet*, SST (Standar Seleksi Target) yang merupakan adopsi dari TSS (*Target Selection Standard*), Matriks Sinkronisasi Target (MST) yang merupakan adopsi dari TSM (*Target Synchronization Matrix*), dan lain-lain.

Langkah kedua prosedur penentuan sasaran yakni **Temukan**. Langkah ini dilaksanakan sebelum PO/RO dilaksanakan, bisa pada tahap PPKT bisa juga pada tahap persiapan. Pada tahapan ini ada dua tugas yang harus diselesaikan oleh PKBT yakni **Cari** dan **Kunci**. Proses pencarian dilaksanakan oleh aset pencari dan penemu sasaran, bisa itu aset tradisional seperti kelompok peninjau maupun intel manusia (*human intelligent: HUMINT*) maupun aset modern seperti radar, *drone*, maupun intel udara. Pada proses ini rencana pengumpulan keterangan diperlukan untuk menentukan aset pencari

dan penemu sasaran mana yang bisa digunakan. UUK (Unsur Utama Keterangan) yang dinamakan PIR (*Priority Intelligence Requirement*) dibutuhkan untuk mendapatkan CCIR (*Commander Critical Information Requirement*) atau KIUK (Kebutuhan Info Utama Komandan). Memang ada beberapa istilah yang tidak ada di terminologi militer TNI, sehingga untuk mengoperasionalkan metodologi ini, beberapa istilah seperti CCIR harus diserap untuk mewedahi kekosongan atau gap dalam prosedur penentuan sasaran. Selain itu, militer barat sangat mengandalkan *SIGINT* (*signal intelligent*) dalam hal ini radar lawan artileri seperti AN-TPQ 36/37 sebagai sarana badan pengumpul (Bapul) dalam kolom Renpulket (rencana pengumpulan keterangan). Penggunaan radar lawan artileri sangat efektif dibandingkan dengan penggunaan kelompok peninjau dan HUMINT karena lebih akurat dalam mendeteksi lokasi sarana bantem musuh. Namun disayangkan sampai dengan saat ini, belum ada satuan Armed TNI AD yang mengoperasionalkan radar lawan artileri. Proses pencarian ini mempunyai tujuan lain untuk mengkonfirmasi sasaran-sasaran yang telah ditentukan untuk ditembak, sehingga bisa dikunci.

Tugas kedua, **Kunci**, memiliki tujuan untuk memelihara identifikasi sasaran terutama target nilai tinggi yang telah ditemukan. Tugas ini juga berguna untuk menyempurnakan lokasi sasaran yang telah ditentukan dalam RBT. Karena musuh tidaklah statis (diam), mereka juga berpikir untuk menjaga aset vital mereka dari

kehancuran. Oleh karena itu, setelah sasaran ditemukan, ketika target terkonfirmasi dan tervalidasi, sasaran tersebut harus dikunci. Juga ketika ditemukan target bergerak, maka sasaran tersebut harus selalu diikuti dan dikunci hingga pelaksanaan penembakan. Staf satuan manuver, PKBT maupun satuan bantem harus memahami bahwa alutsista yang digunakan untuk mengikuti dan mengunci sasaran mungkin tidak bisa efektif digunakan lagi untuk mencari dan menemukan sasaran dalam operasi lawan artileri sehingga manajemen penggunaan sarana pencari dan penemu sasaran harus diatur sesuai dengan prioritas tembakan.

Langkah ketiga prosedur penentuan sasaran yakni **Tembak**. Pada langkah ini ada dua tugas yang dilaksanakan yakni **Hancurkan** dan **Eksplorasi**. Penghancuran sasaran memedomani apa yang sudah dibuat dalam MPS (Matriks Panduan Sasaran) yang merupakan adopsi dari AGM (*Attack Guidance Matrix*) sedangkan eksploitasi sasaran tergantung dari efek yang diinginkan. Menurut FM 3-90 *field artillery operations and fire support*, ada delapan efek yang menjadi pedoman Pakorbantem dalam pelaksanaan Korbantem yakni

- Mengelabui (*deceive*),
- Melumpuhkan (*defeat*),
- Menunda (*delay*),
- Menghancurkan (*destroy*),
- Mengganggu (*disrupt*),
- Mengalihkan (*divert*),
- Menetralkan (*neutralize*), dan
- Menekan (*suppress*).

Langkah terakhir prosedur penentuan sasaran yakni **Nilai**. Pada langkah ini ada

dua tugas yang dilaksanakan yakni **Analisa** dan **Laporkan**. Analisa memiliki tujuan untuk memberikan informasi mendalam tentang musuh apakah serangan yang dilakukan perlu rekomendasi untuk serangan ulang ataupun dinyatakan selesai dan lanjut ke sasaran selanjutnya. Hal-hal tersebut dilaporkan oleh PKBT ke Dansat manuver agar mendapat keputusan. Jika keputusannya adalah serangan ulang maka roda perputaran prosedur penentuan sasaran akan kembali ke metodologi T3N dan CA-KU-CUR-E-NA-LA (Gambar 2). Demikian implementasi 4 langkah metode T3N prosedur penentuan sasaran yang diujicobakan ketika Latposko 1 & 2 Yonarmed-17/Komposit RC.

Metodologi TELIT-TEN untuk Target Sensitif Waktu

Pelaksanaan Korbantem terhadap “target yang direncanakan” (Gambar 3) tetap menggunakan metodologi T3N (Gambar 2), baik itu “target terjadwal” (tertuang dalam jadwal tembakan pada sub-sub lampiran RTA) maupun “target AP (atas perintah)”. Namun jika sasaran berupa “target dinamis”, maka Danyonarmed selaku Pakorbantem bisa menggunakan dua metodologi Korbantem yakni T3N (Gambar 2) dan TELIT-TEN (Gambar 4). Jika sasaran tersebut merupakan “target tak terencana”, yakni target yang sudah diketahui berada di daerah operasi tetapi tidak terdeteksi kekuatan maupun lokasinya atau tidak sempat diplot karena kurangnya waktu maka tetap menggunakan metodologi T3N. Sedangkan jika sasaran termasuk “target tak diantisipasi”, yakni

target yang tidak diketahui keberadaannya namun tiba-tiba muncul, maka digunakanlah metodologi prosedur penentuan sasaran TELIT-TEN (Gambar 4). Metodologi ini hanya digunakan pada “target sensitif waktu” yakni target yang harus cepat penanganannya jika tidak (melewati waktu) maka target tersebut akan hilang.

Dikarenakan membutuhkan waktu cepat untuk eksekusi, maka setelah sasaran ditemukan oleh sarana pencari dan penemu sasaran segera dilokalisasi. Setelah itu segera diidentifikasi oleh PKBT apakah masuk ke dalam DTHT (Daftar Target Hasil Tinggi) yang telah ditentukan ataupun tidak. Proses ini dilaksanakan pada tahap persiapan maupun saat pelaksanaan operasi. “Target AP (atas perintah)” bisa juga menjadi target sensitif waktu di beberapa kasus.

Hasil Uji coba Doktrin pada Latposko 1 & 2 Yonarmed-17/ Komposit TA.2019

Dari uji coba doktrin prosedur penentuan sasaran yang dilakukan pada Latihan Posko 1 dan 2 Yonarmed/17 Komposit RC dapat disimpulkan bahwa teori ini **sesuai dan bisa** digunakan untuk memperkaya doktrin Korbantem yang sudah ada sekaligus sebagai

penyempurnaan metode latihan posko bagi Yonarmed dalam hubungan tugas taktis BL (Bantuan Langsung), BU (Bantuan Umum), PT (Perkuatan Tembakan) maupun BU-PT (Bantuan Umum Perkuatan Tembakan). Dikarenakan banyak terminologi yang disampaikan penulis yang merupakan serapan dari doktrin US Army dan tidak familiar di kalangan kecabangan Armed, maka penulis **menyarankan** agar dibentuk suatu Pokja untuk menindaklanjuti penelitian dan uji coba doktrin yang dilakukan penulis ketika menjadi pelaku pada saat pelaksanaan Latposko 1 & 2 Yonarmed-17/Komposit RC TA.2019. Keberhasilan dalam pembentukan doktrin ini akan berdampak pada kemampuan Pakorbantem dalam melaksanakan Korbantem baik itu dalam hubungan operasi maupun latihan gabungan dan antar kecabangan. Akhir kata, seperti kata bijak yang dicetuskan oleh George Santayana: *“those who fail to learn the lessons of history are doomed to repeat it”*. Semoga kita semua tidak terjebak dalam kesalahan sejarah berulang-ulang.

(Penulis sebelumnya menjabat Danyonarmed-17/Komposit Rencong Cakti)



KETAHANAN PANGAN KODIM 1302/MINAHASA DALAM RANGKA MEMBANTU PEMDA DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



Oleh : Letkol Inf Slamet Raharjo, S.Sos., M.Si.
(Dansecaba Rindam XIII/Merdeka)

Banyaknya prediksi berbagai kalangan tentang adanya kemungkinan krisis pangan akibat pandemi Covid-19, menimbulkan kekhawatiran sebagian besar penduduk dunia. Tak terkecuali di negara Indonesia, kekhawatiran tersebut sudah dirasakan oleh sebagian besar masyarakat dihadapkan dengan situasi dan kondisi ekonomi saat ini. Pemerintah telah berupaya dengan berbagai cara dan strategi untuk menghadapi krisis pangan, salah satunya dengan membangun food estate di Kabupaten Kapuas dan Pulau Pisang di mana Kemenhan sebagai *leading sector* didukung Kementan dan Kementerian PUPR. Lebih lanjut, Presiden Jokowi memberikan pernyataan secara tegas pada saat pertemuan dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/07/2020) bahwa Pertahanan bukan hanya urusan Alutsista. Akan tetapi,

juga di bidang pangan menjadi salah satu bagian darinya. Itu berarti bahwa ketahanan pangan menjadi bagian yang tidak terlepas dari Pertahanan Nasional Negara Indonesia. Suatu Pertahanan Nasional yang kuat akan terbentuk apabila didukung/ditopang oleh kondisi ketahanan pangan rakyat yang baik.

Beranjak dari hal tersebut, program ketahanan pangan wilayah, sebenarnya telah lama dilakukan oleh TNI AD dalam rangka mendukung program Pemerintah Daerah. Banyak program dan strategi ketahanan pangan yang telah dilakukan dengan *leading sector* Satuan Komando Kewilayahan mulai dari Kodam, Korem, hingga Kodim. Keberhasilan program tersebut cukup dirasakan, baik di tingkat nasional sampai di wilayah pedesaan sejak adanya MOU antara TNI AD dan Kementerian Pertanian dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional. Stok pangan meningkat, harga meningkat, para petani pun semakin semangat dalam bekerja.

Kepercayaan pemerintah melalui Kementerian Pertanian

yang bekerja sama dengan TNI AD merupakan suatu hal yang wajar. Hal itu karena TNI AD memiliki fungsi pembinaan teritorial di masyarakat yang mengena sampai kalangan bawah terutama masyarakat petani di pedesaan. Fungsi pembinaan teritorial menjadi pedoman bagi semua Apkowil dalam mengajak dan menghimbau masyarakat untuk meningkatkan hasil pangan. Dalam hal ini peran Babinsa sangat penting karena harus selalu melekat di masyarakat binaannya. Peran serta dan dukungan semua pihak juga sangat penting khususnya Pemda itu sendiri dan kalangan akademisi, sehingga dibutuhkan kolaborasi, integrasi dan sinergitas di lapangan. Ibarat bersatunya pemikir dan pelaksana, bersatunya ilmu teori dan ilmu lapangan di bidang ketahanan pangan akan menghasilkan sesuatu yang berharga bagi masyarakat.

Kodim sebagai ujung tombak Satuan Komando Kewilayahan harus mampu menunjukkan peran dan fungsinya untuk membantu Pemda khususnya bidang ketahanan pangan. Semua kemampuan dan potensi

yang dimiliki oleh Apkowil harus diberdayakan secara maksimal. Tentunya diperlukan beragam inovasi dan terobosan di lapangan sebagai bentuk peran aktif tersebut. Fungsi dari Pembinaan Teritorial (Binter) dalam membantu Pemda di bidang ketahanan pangan akan berjalan baik apabila ada semangat, tekad, dan komitmen bersama antara Satkowil (Kodim), Pemda, masyarakat dan semua kalangan di wilayah tersebut. Wujud dari itu adalah adanya tindakan saling mendukung dan saling melengkapi kekurangan.

Terkait hal ini, peran, pola pikir dan pola tindak dari Komandan Kodim sangat menentukan, di mana semua kegiatan bermuara dari perintah dan kebijakan yang diambil oleh Dandim kepada seluruh Apkowil di satuannya. Koordinasi yang baik dengan Kepala Daerah akan memberikan stimulus kepada semua bawahannya, sehingga semua program yang dijalankan oleh Kodim dalam membantu ketahanan pangan akan di-support penuh oleh dinas terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas PMD, dan dinas lainnya. Semua potensi wilayah seperti SDA, SDM, maupun Sumber Daya buatan lainnya dapat dimanfaatkan dengan kolaborasi semua pihak.

Tindakan nyata di lapangan dalam fungsi Binter dapat terlihat dari peran dan fungsi Babinsa sebagai pembina masyarakat dan sekaligus sebagai penghubung/ penyambung lidah masyarakat

dengan pemerintah. Peran dan fungsi Babinsa di sini difokuskan untuk aktif dalam kelompok-kelompok tani di antaranya membantu mengorganisir Gapoktan, memecahkan masalah dalam proses pertanian, transfer ilmu pertanian untuk saling melengkapi kekurangan, pendampingan dan pemberi motivasi. Beberapa contoh terkait fungsi Binter TNI AD untuk membantu Pemerintah Daerah dalam rangka ketahanan pangan telah dilakukan oleh Kodim 1302/Minahasa dengan menggali potensi-potensi di wilayah sehingga menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

PEMANFAATAN LIMBAH ECENG GONDOK DARI DANAU TONDANO

Danau Tondano merupakan salah satu potensi wilayah dan aset nasional di Kodim 1302/Minahasa. Namun sangat disayangkan, sebagian danau tersebut tertutupi eceng gondok sekitar 315 hektar

dari luas keseluruhan 4.666 hektar. Dampaknya adalah terjadi pendangkalan dan berkurangnya sumber mata air. Hingga ini telah diupayakan Pemda bekerja sama dengan Kodim 1302/Min untuk mengangkat gulma tersebut secara bertahap.

Guna memanfaatkan eceng gondok tersebut, Dandim 1302/Min membuat suatu terobosan dengan mengolah limbah menjadi energi, pupuk cair dan pupuk kompos yang dapat berguna bagi petani. Inovasi ini dilakukan berkolaborasi dengan Universitas Samratulangi Manado khususnya Fakultas Pertanian.

Beberapa manfaat bisa didapatkan hanya dengan satu alat modifikasi sehingga bisa menghasilkan energi yang dapat mengurangi beban biaya hidup masyarakat. Selain itu, juga dapat dihasilkan pupuk cair sekaligus yang dapat digunakan dalam pertanian tanpa membeli pupuk kimia.



► *Penyiapan bahan eceng gondok*



➤ Pengecekan hasil fermentasi limbah eceng gondok

BIO SISTEM TERPADU ANTARA TAMBAK IKAN DENGAN AQUA PONIK

Masyarakat di Kabupaten Minahasa, khususnya di seputaran Danau Tondano, sebagian besar memanfaatkan pinggir danau sebagai tambak ikan untuk penghasilan keluarga.

Melihat kondisi ini, Pelda Langi, Plh. Danramil 1302-02/ Eris yang menaungi wilayah teritorial tersebut merasa tergerak untuk membantu masyarakat petani tambak dengan membuat suatu inovasi yang cukup menarik perhatian yaitu biosistem terpadu dengan *aquaponik*. Di atas tambak ikan yang telah dibuat oleh masyarakat dibuatkan suatu media aquaponik yang dibuat dari serabut kelapa yang bisa untuk menanam berbagai tanaman sayuran seperti sawi, cabai, seledri, bawang dan lainnya. Budi daya tanaman aquaponik di atas kolam/tambak ikan ini cukup mudah dibuat disertai pemeliharaan yang tidak sulit,

tidak memerlukan penyirangan, terbebas dari hama tanah, dan tidak memerlukan penyiraman.

Inovasi ini telah banyak ditularkan kepada masyarakat dan mendapat respons positif. Banyak dari sebagian petani tambak yang mencobanya sehingga dapat memberikan penghasilan tambahan bagi keluarga. Saat ini para Babinsa setempat terus memberikan edukasi dan pendampingan dalam media yang diciptakan tersebut guna meningkatkan

tingkat kesejahteraan masyarakat.

PEMBUATAN PUPUK ORGANIK BAGI PERTANIAN KHUSUSNYA GAPOKTAN.

Pupuk kimia masih menjadi primadona para petani dalam meningkatkan kesuburan tanah pertanian meskipun harga pupuk tersebut tergolong mahal. Banyak modal yang harus dikeluarkan untuk pembelian pupuk kimia seperti pupuk Urea, NPK, Ponska dan lainnya. Hal itu berdampak pada berkurangnya pendapatan petani karena tidak sebanding dengan hasil penjualan hasil pertanian. Dari kondisi tersebut, seorang Babinsa dari Koramil 1302-16/Tumpaan yaitu Serda Haryono berupaya menciptakan metode penanaman efektif untuk membantu para petani di wilayah binaannya.

Berbekal ilmu dan keterampilannya dalam bertani, Serda Haryono berupaya untuk membuat Pupuk Organik Cair atau POC dari berbagai macam bahan limbah buangan



➤ Penyiapan bekas botol air mineral untuk tempat penyesuaian tanam sayur

masyarakat seperti air bekas cucian beras, air kelapa, batang pohon pisang, serabut kelapa maupun pupuk kandang. Kualitas dari semua jenis pupuk buatan atau POC tersebut sama efektifnya sehingga petani tinggal memilih dari bahan mana yang tersedia di sekitar lingkungannya.

Penyiapan bahan limbah (kiri), Serda Haryono mensosialisasikan pupuk cair yang dihasilkan dari bahan limbah kepada Kelompok Tani yang dihadiri oleh Dandim 1302/Minahasa (Kanan).

Dandim 1302/Minahasa didampingi Danramil dan Babinsa Serda Hariono beserta Kelompok Tani memanen sayur terong dari hasil pupuk cair bahan limbah.

CARA PEMBUATAN DEMPLOT KODIM MENGGUNAKAN PUPUK ORGANIK SEBAGAI CONTOH DAN MOTIVASI BAGI PETANI

Pembuatan demplot pertanian Kodim dilakukan semata-mata untuk memberikan contoh dan motivasi bagi para petani untuk mengolah lahan pertanian secara alami dengan hasil melimpah. Pupuk organik menjadi unsur utama pemupukan sehingga dapat mengurangi biaya pengolahan. Kenyataan di lapangan, sebagian besar petani mengeluhkan tentang mahalnya biaya pemupukan sehingga perlu ditekan untuk menambah penghasilan.

Berbagai inovasi dan terobosan terkait ketahanan pangan di

wilayah terus dilakukan oleh Kodim 1302/Min semata-mata untuk membantu Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan koordinasi yang baik antara semua pihak terkait dan sosialisasi kepada masyarakat akan semakin terlihat peran dan fungsi Binter Kodim serta meningkatnya kemandirian TNI – Rakyat.

Peltu Lafajar melakukan penyemprotan sayur di demplot

Kodim 1302/Min (kiri). Tanaman sayur di demplot Kodim 1302/Min menggunakan pupuk Organik (kanan).

Tanaman Jagung di demplot Kodim 1302/Min menggunakan pupuk Organik (kiri). Dandim 1302/Min di damping Peltu Lafajar bersama masyarakat melaksanakan panen jagung di demplot Kodim 1302/Min (kanan).

(Penulis sebelumnya menjabat Dandim 1302/Minahasa)



► Penyiapan bahan limbah



► Panen jagung di demplot Kodim 1302/Minahasa



OPTIMALISASI SATUAN TERHADAP ANCAMAN DI ERA MODERN KHUSUSNYA DI WILAYAH PAPUA

Oleh: Letkol Inf Rofi Irwansyah, S.I.P., M.Si.
(Danyonif RK 751/VJS)

Globalisasi telah membawa sumber dan jenis ancaman baru bagi bangsa-bangsa di dunia, baik berupa ancaman militer dan nonmiliter. Pada hakekatnya, ancaman merupakan setiap upaya dan kegiatan yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Sesuai dengan yang tercantum dalam Doktrin Tri Dharma Eka Karya (Tridek):

“Ancaman dan gangguan dapat bersumber dari dalam negeri dan luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung (proxy war), sedangkan aktornya dapat berupa negara dan bukan negara, serta dalam perkembangannya dapat dilakukan oleh aktor bukan negara yang didukung negara.”¹

Ancaman tersebut dapat dilakukan musuh dan/atau lawan dengan menggunakan perpaduan antara berbagai macam metode, aktor, skenario, dan taktik yang dikenal dengan hibrida. Kompleksitas ancaman hibrida ini menjadi tantangan

bagi TNI maupun komponen bangsa lainnya untuk selalu meningkatkan kemampuan yang adaptif dengan perkembangan teknologi.

Dari segi ancaman militer saat ini TNI AD juga masih menghadapi konflik dengan KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) khususnya yang berada di daerah rawan seperti pegunungan di Papua yang mengatasnamakan dirinya TPNPB yang melakukan aksi-aksi kejam dan pembantaian terhadap masyarakat Papua dan TNI-POLRI. Untuk itu, Satuan Infanteri saat ini khususnya Raider perlu mengembangkan kemampuannya untuk menghadapi ancaman ini.

Pengembangan Kemampuan Satuan di lingkungan TNI AD merupakan suatu proses pemberdayaan komponen-komponen sumber daya satuan, guna mencapai kesiapan satuan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok. Untuk menghasilkan suatu kemampuan satuan yang siap operasional dengan mempunyai daya tempur yang tinggi dan tangguh, maka pelaksanaan Pengembangan

Kemampuan Satuan harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, terarah terkendali, dan dilakukan terus menerus.

PENGEMBANGAN IT DAN INTEL TERBATAS

Dengan adanya ancaman perkembangan situasi dan potensi ancaman di wilayah, tentunya perlu adanya pengembangan latihan IT dan intel dasar salah satunya dengan menambah kemampuan pengembangan materi intel terbatas dan pengembangan kemampuan IT bagi bintara dan perwira di satuan. Pengembangan kemampuan intel terbatas dalam bidang penggalangan ditujukan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berpengaruh di sekitar wilayah.

Dalam ancaman-ancaman fisik dan nonfisik yang ada dalam militer yang di dalam ini ditunjukkan dalam ancaman nonfisik (nirmiliter), yang ada dalam kemampuan pengelolaan IT yang ada dalam satuan-satuan di wilayah Papua banyak sekali yang kurang menguasai kemampuan IT. Hal ini menunjukkan perlunya pemantapan bagi anggota militer yang dalam hal ini

1. Kep 555 Tahun 2008 Tentang Doktrin Tridek hal. 12



khususnya kemampuan di bidang operator, penyuntingan yang harus dipahami, dan juga dapat mengoperasikan Ms Office yang dipakai sehari-hari dalam pembuatan produk, paparan, dan laporan yang ada. Dalam hal ini kita dapat melakukan pendalaman kemampuan IT dan dalam penerimaan SDM, yang dapat mengoperasikan komputer.

Kemampuan intel terbatas yang ada dalam hal ini penggalangan terhadap tokoh-tokoh agama, masyarakat, dan tokoh yang berpengaruh dalam wilayah Batalyon itu sendiri. Hal itu bertujuan guna mengurangi ancaman-acaman yang ada dalam lingkup wilayah sekitaran Batalyon. Daerah binaan Batalyon yang ada saat ini pun telah menjadi suatu sumber informasi yang dapat melaporkan perkembangan situasi di wilayah sekitaran Batalyon.

Di dalam hal untuk menyelidiki suatu kebiasaan dan menggali suatu komponen masyarakat haruslah dilaksanakan penggalangan yang hal ini

telah dapat dilaksanakan oleh Batalyon. Dalam hal ini yang dilakukan staf intel dan personel yang berada di Batalyon khususnya di Batalyon Papua yang menjadi Kotama Ops dan Kotama Bin.

MODERNISASI ALUTSISTA DI SATUAN

Modernisasi alutsista yang ada di satuan yang sesuai dengan daerah satuan apabila daerah rawan di Papua yang harusnya dilengkapi alat perlengkapan dan senjata yang relevan dan tepat ditinjau dari segi medan dan lawan yang akan dihadapi. Dalam mendukung tugas yang dihadapi di daerah operasi perlu didukung alat perlengkapan yang memadai dan memudahkan dalam pergerakan prajurit di antaranya:

NVG (*Night Vision Google*).

Alat ini sangat membantu anggota yang sedang bertugas untuk membantu penglihatan saat malam hari. Namun, saat ini dukungan NVG masih terbatas dan kualitasnya masih kurang baik. Ke depannya perlu

adanya dukungan NVG yang terbaru dengan kualitas yang lebih baik.

GPS. GPS di satuan Infanteri khususnya Yonif di wilayah Papua yang kami miliki sangat berguna sebagai pemandu arah dalam kegiatan patroli maupun ambus. Namun, saat ini dukungan GPS memiliki kendala ketika memasuki hutan yang rapat. Sinyal yang diterima GPS tidak maksimal bahkan hilang sinyal dari GPS tersebut.

Dalam hal senjata bantuan seperti Senjata Penembak Runduk perlu banyak yang dikaji ulang yaitu untuk senjata yang dipakai untuk gerak dalam tugas kurang dapat dapat melaksanakan mobilitas tinggi dikarenakan bobot yang berat serta besar dan senjata yang kurang fleksibel dalam gerak saat di medan tugas. Senjata tersebut tidak seperti senjata AX 308 yang dapat popor senjatanya dapat dilipat, untuk teropong dengan senjata AX 308 juga terbilang masih jauh dibanding senjata SPR. Senjata SPR yang ada sekarang juga memiliki kelemahan yaitu *bipod* depan yang mudah lepas, pengait kelongsong yang mudah memuai apabila digunakan menembak secara berturut-turut atau menembak dalam jumlah banyak, dan teropong SPR 3 Pindad belum dilengkapi dengan *illumination control*. Teropong yang ada dalam SPR 3 Pindad yang ada saat ini masih baik tetapi kurang dilengkapi dengan *illumination control* dan perlunya dilengkapi dengan teropong bidik malam.



Dalam meningkatkan pergerakan yang mobilitas dalam medan penugasan perlunya didukung dengan kendaraan taktis, yang dapat bergerak dengan cepat untuk melaksanakan infiltrasi yang memungkinkan untuk melaksanakan kemampuan daya kejut yang tinggi sehingga dapat menambah moril anggota.

KEMAMPUAN KHUSUS PRAJURIT

Dilihat dari sudut tugas pokok, pasukan yang bertugas di wilayah Papua haruslah mempunyai kemampuan para dasar bagi anggota pasukan Raider yang bertugas di Papua untuk menunjang kemampuan infiltrasi di udara, melihat ancaman yang berkembang di era modern di mana informasi dapat cepat tersebar melalui media sosial. Hal ini dapat ditinjau dilihat dari Batalyon yang terletak dekat dengan Pangkalan Udara yang memudahkan pergerakan apabila diperlukan untuk melaksanakan infiltrasi melalui udara dengan cepat.

Sampai saat ini kemampuan pasukan Raider yang memiliki kemampuan mobud atau mobil udara belum bisa dimaksimalkan, dilihat dari banyaknya kota-kota besar yang berada di wilayah Papua seperti Wamena, Timika, dan Biak yang apabila diperlukan dapat melaksanakan *dropping* pasukan dengan cepat di wilayah tersebut. Pergerakan kelompok separatis bersenjata pun dapat cepat ditekan apabila ada suatu penonjolan wilayah mereka.



Kemampuan *dropping* pasukan yang cepat sangat diperlukan melihat masalah masalah yang cepat timbul di Papua ini, dalam hal ini kemampuan para dasar yang sangat di relevan di lihat dalam permasalahan yang ada.

PENUTUP

Sesuai pembahasan tentang “Optimalisasi Satuan Terhadap Ancaman di Era Modern Khususnya di Wilayah Papua” maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Pengembangan Kemampuan Satuan perlu ditingkatkan melalui materi tambahan di bidang IT bagi bintara maupun perwira dalam menghadapi ancaman nonfisik dan kemampuan penggalangan terhadap tokoh-tokoh yang berpengaruh di wilayah tersebut.

Kedua, perlunya modernisasi alutsista sesuai dengan karakteristik wilayah di mana satuan tersebut berada.

Ketiga Perlu adanya kemampuan khusus prajurit khususnya Prajurit Raider saat

menjalankan tugas menghadapi ancaman militer salah satunya Para Dasar.

Dalam rangka Optimalisasi Satuan Terhadap Ancaman di Era Modern Khususnya di Wilayah Papua, maka terdapat beberapa saran yang perlu disampaikan kepada satuan atas antara lain: **Pertama**, mohon dimasukkan materi Intel, Teritorial Terbatas serta Ilmu pengetahuan dan Teknologi bagi golongan bintara ke atas; **Kedua**, mohon adanya modernisasi Alutsista sesuai dengan topologi wilayah satuan tersebut; **Ketiga**, mohon untuk Prajurit Raider diberikan pendidikan Para Dasar untuk menunjang kemampuan infiltrasi.

Demikian tulisan tentang Optimalisasi Satuan Terhadap Ancaman Di Era Modern Khususnya di Wilayah Papua sebagai sumbang pikiran dan saran kepada pimpinan TNI AD dalam menentukan kebijakan selanjutnya.



SATUAN KAVALERI TNI AD MENYONGSONG KONSEP “ARMY FUTURES COMMAND”

Oleh: Letkol Kav Yudhi Prasetyo Purnomo, S.Sos., M.I.Pol.
(Danyonkav-1/Kostrad)

Perkembangan Alutsista era Revolusi Industri 4.0 mempengaruhi konsep pertahanan di masa depan.

Dengan berubahnya sistem persenjataan dalam sektor pertahanan yang sangat pesat pada akhirnya akan mengubah konsep pertahanan sebuah negara dalam rangka perlombaan senjata (*arms race*), termasuk di antaranya negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Cina. Munculnya *Revolution in Military Affairs* (RMA) yang terutama disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi (IT) dan komunikasi menimbulkan dorongan kepada *US Army* dalam hal ini *Army Futures Command* (AFC) untuk mengembangkan konsep pertempurannya agar efektif dan efisien dengan implementasi dari IT yang berkembang saat ini. *Army Futures Command* memiliki titik berat pengembangan terutama pada perubahan konsep lingkup perang di masa yang akan datang, yaitu *Long-Range Precision Fires*, *Next Generation Combat Vehicle*, *Future Vertical Lift*, *Army Network*, *Air and Missile Defense*, dan *Soldier Lethality*. Alutsista *US ARMY* saat ini terfokus pada

penggunaan *Drone* seperti *MQ-9 Reaper*, *Holo Lens*, dan *Hypersonic Missile* untuk memperkuat pertahanannya. “Ini tidak seperti organisasi pada umumnya, tetapi tim fungsional lintas teknologi. Kami memikirkan konsep masa depan dengan melibatkan teknologi,” jelas Jenderal John Murray, Komandan Jenderal *Army Futures Command* mengatakan kepada *The National Interest*.

Dengan perkembangan tersebut di atas, adalah suatu hal yang menarik bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk kemudian melakukan kuantum atau lompatan menuju TNI AD yang siap menyongsong konsep *Army Future Command* tersebut, khususnya Korps Kavaleri TNI AD. Berdasarkan latar belakang penjelasan tersebut, perlu dirumuskan sebuah persoalan yang menjadi inti pembahasan yaitu: **Bagaimana pengembangan Satuan Kavaleri TNI AD guna menyongsong konsep Army Futures Command?** Diharapkan Satuan Kavaleri Angkatan Darat dapat bertempur dengan lebih modern, menemukan musuh lebih cepat dan akurat, bermanuver lebih cepat, memiliki daya hancur yang

besar dengan jarak capai senjata yang lebih jauh dan akurasi tinggi, serta memiliki kesatuan kodal dengan unsur kesenjataan lainnya di setiap dimensi pertempuran. Ruang lingkup yang dipaparkan adalah meliputi latar belakang dan landasan pemikiran, konsep pengembangan yang diharapkan meliputi **kekuatan, kemampuan dan gelar Satkavad**, serta kesimpulan dan saran. Pembahasan dipaparkan dengan menggunakan metode deskriptif empiris analisis melalui pendekatan studi kepustakaan dan pengamatan di lapangan.

Landasan pemikiran yang digunakan penulis adalah: **Pertama**, UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, termuat di dalamnya tugas pokok TNI khususnya dalam Operasi Militer untuk Perang (OMP); **Kedua**, Peraturan Kasad Nomor Perkasad / 105 / XII / 2011 Tanggal 6 Desember 2011 tentang Revisi Kekuatan Pokok (*Essential Force*) TNI AD Tahun 2010-2029. **Ketiga**, Kebijakan Kasad tentang hasil paparan medium tank Danpussenkav Kodiklatad kepada Kasad tanggal 31 Desember 2018, tentang Konsep Perang Modern, *Air Cavalry* (*Kavaleri Udara*), dan

Fungsi Ranpur Pengintai. Dalam sejarah reformasi militer dunia, telah tercatat serangkaian pengembangan Alutsista sebagai alat tempur utama menjadi lebih praktis, efektif, dan efisien. Namun, perkembangan teknologi informasi sangat mempengaruhi proses tersebut, sehingga kini pertempuran sudah tidak lagi dibatasi ruang dan waktu, kapan saja dan di mana saja pertempuran dapat dilakukan. Hal inilah yang menjadi dasar penulis untuk lebih dalam menyusun konsep pengembangan Alutsista pada masa depan.

Konsep yang ingin dikembangkan guna menyongsong Army Future Command adalah menjurus kepada terwujudnya Long-Range Precision Fires, Next Generation Combat Vehicle, Future Vertical Lift, Army Network, Air and Missile Defense, dan Soldier Lethality. Sehingga konsep pengembangan Satkavad dari sisi kekuatan secara spesifik adalah:

Pertama, Satkavad harus dilengkapi dengan **Satuan Yonkav Pengintai dan Pengaman**. Kemampuan yang diharapkan dari satuan ini adalah Satuan Pengintai dan Pengaman dengan lindung lapis baja, mampu melaksanakan pertempuran yang tidak menentukan, mampu memberikan berbagai data dan informasi intelijen khususnya tentang disposisi, komposisi, dan kekuatan musuh secara dini dan akurat guna mendukung setiap operasi yang dilaksanakan, baik sebelum maupun selama pertempuran. Yonkav Pengintai dan Pengaman memiliki 3



unsur utama yaitu Kompi Pengintai Darat Ringan, Kompi Pengintai Darat Berat, Kompi Pengintai Udara (Jarak dekat, sedang, dan jauh).

Kompi Pengintai Darat Ringan adalah unsur pengintai yang menggunakan kendaraan pengintai ringan roda empat dan roda dua sebagai alat angkut, diawaki oleh *dismounted personel* yang dilengkapi dengan almatsus intel perorangan seperti **Mini Drone Black Hornet** dengan jarak jangkau 1.500 m dalam durasi 25 menit, melakukan pengintaian secara tersembunyi secara perorangan, seksi dan regu. Contoh kendaraan pengintai ringan yang digunakan oleh AD Amerika Serikat adalah kendaraan Humvee, memiliki mobilitas yang tinggi, mampu melintasi berbagai bentuk medan, dilindungi dengan senjata mesin yang memberikan perlindungan tembakan secara terbatas. **Kompi Pengintai Darat Berat** adalah unsur pengintai yang menggunakan Alutsista lapis baja, baik yang diawaki personel seperti Fennek yang saat ini digunakan oleh AD Jerman, dilengkapi dengan *thermal imager, daylight*

camera, dan laser rangefinder, mengkombinasikan GPS dan *inertial navigation sistem* sehingga dapat mendeteksi sasaran dan memasukkannya dalam BMS, dan juga dilengkapi dengan pesawat tanpa awak (*Unmanned Aerial Vehicle/ UAV*) ringan jenis Aladin. Dapat pula menggunakan tank tanpa awak (*Unmanned Ground Vehicle/ UGV*) yang juga mampu memberikan perlindungan sekaligus bantuan tembakan bagi unsur pengintai lainnya. Contoh UGV yang saat ini ada adalah Milrem Themis UGV buatan negara Estonia, adalah tank tanpa awak yang dapat dilengkapi dengan senjata mesin berkaliber 7,62 mm; 12,7 mm; 40 mm *automatic grenade launcher* dan CIS 50MG *machine gun*. Dikendalikan dengan *remote control* jarak jauh, menembak sasaran statis dan bergerak tanpa membahayakan personel, khususnya untuk mengatasi musuh di daerah yang sulit dijangkau dan berbahaya.

Kompi Pengintai Udara (Jarak dekat, sedang, dan jauh). Kemampuan utama yang dapat dilakukan oleh kompi ini adalah pengintaian dan penginderaan udara dengan menggunakan pesawat



tanpa awak (UAV) guna memberikan informasi intelijen tentang cuaca, medan, dan musuh secara dini dan akurat dalam rangka mendukung keberhasilan operasi yang dilaksanakan. Kompi Pengintai Udara ini dapat dilengkapi dengan UAV jenis **Aladin** memiliki kecepatan 45-90 km/jam dengan daya jelajah kurang lebih 15 km dalam durasi 30-60 menit; UAV jenis **Mikado** yang menggunakan sistem rotor, dilengkapi 3 kamera, memiliki kecepatan 16.7 m/detik, jarak jelajah kurang lebih 1 km dalam durasi 20 menit; UAV jenis **LUNA** dengan daya jelajah yang mencapai 80 km dalam durasi 6 jam, ketinggian terbang maksimal 4.000 m, dikendalikan oleh pilot/operator di stasiun pengendali darat.

UAV jenis **KZO** dengan daya jelajah mencapai 140 km dalam durasi 4,5 jam, ketinggian terbang maksimal 3.500 m di atas tanah dan dikendalikan oleh sebuah tim berjumlah 4 orang di stasiun pengendali darat. Sedangkan UAV dengan daya jelajah yang lebih jauh dan dilengkapi dengan misil seperti jenis UAV **RQ-1 Predator** dengan misil **AGM-114 Hellfire** dapat diawaki oleh satuan Penerbad dalam rangka mendukung operasi darat lain dalam hubungan yang lebih besar. Berbagai Alutsista tersebut di atas diharapkan dapat mewujudkan semboyan "**first round kill**", mengoptimalkan daya gerak, daya tembak dan daya kejut Satkavad sebagai satuan manuver dalam mendukung tugas pokok Komando Atas.

Kedua, Satkavad harus dilengkapi dengan **Satuan Yonkav Penggempur**. Kemampuan yang diharapkan

adalah melaksanakan pertempuran darat yang bersifat mobil dan menentukan, dengan daya gerak, daya tembak dan daya kejut. Mendekati dan menghancurkan sasaran; merebut, menguasai dan mempertahankan medan serta memperbesar daya gempur satuan manuver lainnya. Yonkav Penggempur harus dilengkapi setidaknya dengan tank medium atau **Main Battle Tank (MBT)**. Adapun jenis Tank Medium yang dapat dicontohkan adalah Tank Medium Harimau yang merupakan kerja sama PT Pindad (Persero) dengan Pabrikan Turki dan Tank Marder Evolution dengan senjata kaliber 105 mm.

Kubah tank tersebut terbuat dari komponen plat baja dan aluminium alloy dengan proteksi balistik sesuai standar NATO yang dipercaya mampu menahan serangan proyektil RPG, peluru APFDS-T dan rudal anti tank dengan tandem *shaped charge*. Dilengkapi dengan teknologi *self stabilized day & night infrared thermal camera* dan didukung dengan *integral eye safe laser rangefinder*. Jenis Tank MBT yang kita miliki saat ini yaitu Tank Leopard 2A4 dan 2RI, adalah tank terbaik dunia dengan mobilitas yang tinggi, daya hancur yang besar dengan senjata utama Kanon kaliber 120 mm L44 *smoothbore* dengan jarak tembak efektif 3.000 m, didukung dengan senjata Coax/ PSU 7,62 mm. Diawaki oleh 4 orang kru ranpur, tank ini memiliki aksi radius 550 km dan menggunakan teknologi *AMAP (Advanced Modular Armour Protection)* dan terbukti mendukung konsep TNI AD

yang memiliki kemampuan **Long-Range Precision Fires** dan **Next Generation Combat Vehicle**.

Ketiga, guna mewujudkan **Soldier Lethality** maka setiap prajurit Satkavad harus "*well trained, well equipped, dan well paid*". Setiap prajurit harus dilengkapi dengan berbagai alkap yang menunjang profesionalismenya sebagai prajurit TNI AD pada umumnya dan prajurit mekanis pada khususnya. Prajurit harus dilengkapi dengan kaporlap dan alkapsus yang modern, seperti senjata perorangan, *drone*, alat komunikasi, *Battle Management Sistem (BMS)*, alat optik, helm, dan rompi anti peluru yang menjamin *force protection*, penggunaan perangkat dengan berbasis **Nano Technology** dan **Robotic** yang pada akhirnya akan menjadikan prajurit TNI AD bergerak lebih cepat, membawa beban lebih berat, menembak lebih akurat dan mampu menghadapi berbagai kondisi cuaca dan medan. Sarana prasarana latihan dan pendidikan seperti **Tank Simulator** menjadi suatu tuntutan yang menjadi prioritas, karena akan sangat menunjang profesionalisme prajurit untuk mengawaki senjata, ranpur, dan alkom secara terintegrasi dalam sebuah skenario pertempuran. Simulator harus tersedia di lembaga pendidikan dan Satuan Operasional baik Yonkav Penggempur maupun Yonkav Pengintai dan Pengaman.

Keempat, organisasi Yonkav Pengintai dan Pengaman serta Yonkav Penggempur harus dilengkapi dengan **Peleton Cyber dan IT**, mengapa? Karena dengan digunakannya berbagai

Alutsista modern seperti UAV dan UGV, maka satuan-satuan tersebut akan sarat dengan perangkat digital, *software* dan perangkat elektronik lainnya yang apabila tidak diawaki oleh personel yang menguasai di bidangnya, akan sangat mempengaruhi kesiapan operasi Alutsista tersebut. Sistem komunikasi yang terintegrasi juga adalah hal lain yang tidak kalah penting, kesatuan kodal akan sangat menentukan keberhasilan operasi. Saat ini Satuan Kavaleri telah memiliki alkom modern yang dipadukan dengan *Battle Management Sistem (BMS)*. Namun, perangkat ini belum dimiliki satuan dari kesenjataan lain, sehingga pada kenyataannya belum dapat mewujudkan **Army Networking** yang tersinergi.

Kelima, Satuan Kavaleri dibangun dengan 3 sistem utama, yaitu otomotif, senjata, dan alat komunikasi. Ketiganya harus disiapkan dengan baik, dipelihara dan ditingkatkan secara terus menerus guna mencapai kesiapan operasi yang diharapkan. Keberadaan Alutsista modern yang digunakan oleh Satkavad harus diiringi dengan dukungan logistik yang memadai, terbatasnya dukungan logistik akan menjadi batas kemampuan Satkavad, sehingga tidak ada pilihan lain, selain melengkapi masing-masing Yonkav Penggempur dan Yonkav Pengintai dan Pengaman dengan **Workshop Terintegrasi**.

Keenam, Alutsista modern harus yakin dapat dikerahkan dengan cepat dan mudah guna mencapai kesiapan operasi yang maksimal. Mobilitas dan kecepatan adalah kunci keberhasilan setiap operasi yang digelar. Dalam operasi

yang lebih besar, TNI AD suatu saat harus dapat memobilisasi Tank-Tank MBT dan Medium tersebut melalui jalur udara (*Future Vertical Airlift*). Ini penting untuk dilakukan mengingat secara geografis Indonesia adalah negara kepulauan, dan satuan-satuan terpusat harus dapat dikerahkan dengan cepat guna mengatasi beberapa *trouble spot* dalam waktu yang bersamaan.

Ketujuh, dengan kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan, maka Satuan Terpusat dan Satuan Kewilayahan harus memiliki gelar yang cukup dan dilengkapi dengan Alutsista modern untuk menghadapi berbagai kemungkinan ancaman di seluruh wilayah tanah air. Satuan Kewilayahan harus dapat memerankan dirinya sebagai *first responder* dan Satuan Terpusat harus mampu dikerahkan dengan cepat ke segala penjuru tanah air untuk mengatasi *trouble spot* tersebut. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa daya gempur yang besar, dukungan logistik yang besar, *force protection* serta informasi intelijen yang valid dan akurat menjadi kata kunci. Berbagai *software* dan *hardware* dalam UAV dan UGV menjadi salah satu peluang dalam mendukung konsep yang diinginkan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat

disarankan beberapa hal sebagai berikut: **Pertama**, disarankan agar dapatnya TNI AD mengembangkan konsep organisasi dan gelar Yonkav Pengintai dan Pengaman, Yonkav Penggempur dan Brigade Kavaleri yang modern dengan berbagai unsur pendukungnya guna mendukung konsep *Army Future Command* dan menghadapi perang modern; **Kedua**, disarankan agar dapatnya TNI AD melakukan pengkajian secara mendalam tentang berbagai alutsista dan alkap modern yang akan melangkapi organisasi Yonkav Pengintai dan Pengaman serta Yonkav Penggempur, seperti UAV, UGV, Tank Medium, *Tank Simulator*, *Tank Transporter*, *special tools*, *workshop*, alkom dan BMS, penggunaan perangkat dengan berbasis **Nano Technology** dan **Robotic** yang pada akhirnya akan menjadikan prajurit TNI AD bergerak lebih cepat, membawa beban lebih berat, menembak lebih akurat dan mampu menghadapi berbagai kondisi cuaca dan medan yang akan mendukung kesiapan operasi Satkavad; **Ketiga**, disarankan agar dapatnya TNI AD menjadikan dukungan logistik menjadi prioritas utama dalam mendukung keberadaan berbagai alutsista modern yang telah, sedang dan akan dimiliki, agar benar-benar siap operasional dan efektif digunakan.





PERAN YONPOMAD DALAM MENDUKUNG SATUAN POMAD YANG BERSINERGI DENGAN POLRI

Oleh: Letkol Cpm Laksono Puji Lisdyanto
(Danyonpomad)

Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI serta Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan POLRI, maka pada tanggal 30 September 2004 RUU TNI disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 19 Oktober 2004 yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sejak saat itu, TNI hanya mengemban tugas bidang pertahanan yang dibagi menjadi tugas Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Lebih lanjut masih berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menjelaskan bahwa TNI masih tunduk pada Peradilan Militer dan sebagai Penyidik yang berwenang di lingkungan TNI salah satunya adalah Polisi Militer. Setelah pemisahan Polri dari organisasi TNI maka berdasarkan keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/1/III/2004 tanggal 26 Maret 2004, penyelenggaraan tugas dan fungsi kepolisian militer di lingkungan TNI dilaksanakan oleh Polisi Militer TNI Angkatan Darat (POMAD), Polisi

Militer TNI Angkatan Laut (POMAL), dan Polisi Militer TNI Angkatan Udara (POMAU) yang wewenang komando dan pengendalian operasional Kepolisian Militer berada pada Panglima TNI, dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Staff Angkatan masing-masing.

Puspomad sebagai organisasi penegak hukum yang menjalankan fungsi kepolisian militer khususnya di lingkungan TNI AD memiliki tugas pokok menyelenggarakan pembinaan kecabangan, pembinaan personel, dan fungsi Polisi Militer dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat. Fungsi utama meliputi Lidpamfik, Gakkum, Penyidikan, Pengawasan, dan Bintahmil. Dalam pelaksanaannya Puspomad memiliki unsur pelaksana yaitu Batalyon Polisi Militer Angkatan Darat yang keberadaannya langsung di bawah Danpuspomad.

Dalam melaksanakan tugas bidang Kepolisian Militer, Yonpomad tidak dapat berdiri sendiri karena bukan merupakan satuan operasional Polisi Militer wilayah. Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya Yonpomad selalu mem-BKO-kan (mem-Bawah-Kendali-Operasi-kan) personelnnya ke

satuan Polisi Militer wilayah atas perintah Danpuspomad. Sebagai contoh, Yonpomad mem-BKO-kan satu Pleton untuk diperbantukan di Pomdam XVII/Cendrawasih dan Pomdam XVIII/Kasuari, mem-BKO-kan dua regu untuk diperbantukan di Pomdam Jaya untuk melaksanakan pengamanan Wisma Atlet. Kemudian mem-BKO-kan personel ke Denpom Bogor yang di mana terdapat Istana Negara sehingga memiliki intensitas kegiatan yang padat.

Di dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut personel Polisi Militer selalu bersinergi dengan Polri, baik dalam kegiatan pengamanan maupun pengawasan, atau dalam kegiatan razia gabungan, baik diminta perbantuan oleh Polri maupun kegiatan yang sifatnya gabungan seperti pengamanan VVIP. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa salah satu tugas TNI adalah memberikan perbantuan kepada Polri, terkhusus bagi satuan Polisi Militer yang memiliki kesamaan dalam penugasan yaitu, bidang pengamanan, pengawasan, dan penegakan hukum. Walaupun telah berjalan namun masih terdapat kendala di lapangan, yaitu belum ada Juklak atau ketentuan secara detail terkait

perbantuan TNI, khususnya bagi personel Polisi Militer Angkatan Darat kepada Polri. Sehingga tidak dipungkiri, bahwa masih banyak gesekan yang terjadi di lapangan, baik itu karena kesalahpahaman ataupun tumpang tindih tugas di lapangan. Selain itu, TNI-Polri, khususnya Pomad dan Polri, belum memiliki MOU berkaitan dengan perbantuan Pomad kepada Polri sehingga tidak ada batasan yang jelas tentang pelibatan satuan Polisi Militer dalam suatu tingkat eskalasi di mana Polri perlu melibatkan Pomad dalam menjalankan tugasnya. Dengan berbagai keterbatasan ataupun kendala di lapangan diharapkan satuan Polisi Militer khususnya Yonpomad tetap harus dapat menjalankan tugas perbantuan terhadap satuan operasional Polisi Militer wilayah dan bersinergi Polri. Satuan Yonpomad diharapkan tetap profesional dan fokus dalam menjalankan tugas kepolisian militer bersama dengan Polri dalam rangka harmonisasi hubungan TNI-Polri. Sehingga **bagaimana satuan Yonpomad dalam menjalankan tugasnya dapat bersinergi dengan Polri dalam rangka menjaga hubungan baik antara TNI-Polri?** Tentunya hal itu harus bisa dilaksanakan, karena penugasan Polisi Militer sendiri banyak bersinergi dengan Polri sehingga menjadikan keuntungan bagi Polisi Militer untuk menjadi contoh bagi prajurit lainnya dalam menjalin hubungan baik dengan Polri.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan Yonpomad bersinergi dengan Polri sebagai upaya yang telah dilakukan untuk membangun harmonisasi TNI-Polri yaitu di antaranya:



Pertama, pengamanan Wisma Atlet yang merupakan kegiatan pengamanan pada saat pandemi Covid-19 yang diselenggarakan oleh BNPB untuk merawat pasien positif Covid-19. Dalam pelaksanaannya personel Yonpomad ditugaskan dalam perbantuan satuan Pomdam Jaya/Jayakarta. Tugasnya itu terbagi pada tiap-tiap pos antara lain Pos 1, Pos 6, Pos 8, dan Pos 5. Tertua dari satgas Pom dari Kasiwal Pomdam yang menerima perintah langsung dari Asops Kodam Jaya. Penanggung jawab dari Satuan tugas Wisma Atlet adalah Kasdam Jaya. Kasdam Jaya membentuk Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) yang terdiri atas BUMN, Menkes, PUPR, Mabes TNI, dan Polda Metro Jaya. Setiap bagian mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing, kemudian setiap 1 dalam seminggu diadakan rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Kasdam Jaya untuk melaporkan hasil evaluasi dan kegiatan selama 1 minggu. Untuk tugas pada tiap-tiap pos berbeda beda. Untuk Pos 1 adalah pos untuk pengamanan keluar masuknya

Pejabat TNI-Polri yang ingin keluar/masuk Kawasan RSD Wisma Atlet Kemayoran. Selain itu, Pos 1 merupakan tempat melintasnya bantuan dari Donasi. Kemudian, penjagaan Pos 1 harus menyalurkan ke bagian seksi Logistik untuk didata dan dilaporkan kepada Asops Kodam Jaya. Untuk Pos 6 merupakan akses masuk ambulans yang mengantarkan pasien positif Covid-19. Setelah dikonfirmasi dari tim dokter IGD, barulah kendaraan dapat dipersilakan masuk. Khusus Pos ini, ada Perwira yang mengawasi, mengontrol, dan melaporkan jumlah pasien yang masuk. Lalu, pada pos ini, TNI-Polri bersinergi untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dari kendaraan pasien. Setelah itu, terdapat Pos 8 yang merupakan pos untuk kendaraan yang telah selesai mengantarkan pasien positif Covid-19 untuk kembali ke rumah sakit rujukan awal. Terakhir, Pos 5 merupakan pos yang mengawasi dokter, relawan, dan anggota yang berdinasi di RSD Wisma Atlet Kemayoran. Tugas dari Pos 5 yaitu mengawasi dan mengingatkan protokol kesehatan secara ekstra

dikarenakan untuk menghindari kerawanan tertular Covid-19. Tidak jarang personel TNI Polri melaksanakan apel bersama dipimpin Asops Kodam Jaya, dalam hal ini untuk melaksanakan evaluasi pada satgaspam TNI–Polri.

Kedua, penertiban penggunaan masker bersama Polsek Jonggol dan kecamatan Jonggol. Dalam hal ini sebagai bentuk kewajiban dan kepedulian masyarakat untuk selalu mengingatkan protokol kesehatan pada masa PSBB bersama Polri, Kecamatan, Satpol PP, dan Dishub. Dikarenakan masih minimnya kesadaran masyarakat akan menjaga kesehatan diri sendiri dan orang lain dengan tetap mengikuti anjuran pemerintah. Banyak oknum masyarakat yang menyepelekan penggunaan masker, misalkan menurunkan masker ke dagu setelah berpergian dari rumah, sedangkan hal tersebut sangat berbahaya karena semua virus menempel pada dagu orang tersebut. Lalu, sering melepas-memasang masker, hal ini juga berbahaya bagi orang yang melaksanakan hal tersebut, apabila tangan tidak steril maka virus akan berpindah tempat ke bagian dalam masker.

Ketiga, sebelum terjadinya pandemi Covid-19, TNI–Polri sudah melaksanakan kegiatan bersama dalam rangka menjaga keharmonisan dan kekompakan. Kegiatan untuk mewujudkan sinergitas yang dilakukan oleh Polisi Militer dan Propam. Pada umumnya merupakan kegiatan yang disesuaikan dengan fungsi utama Polisi Militer salah satunya penegakan hukum. Kegiatan ini biasanya satuan Yonpomad perbantuan

kepada satuan seperti Pomdam XVII/Cendrawasih dan Pomdam XVIII/Kasuari dalam melaksanakan PPL, Razia Malam, dan kegiatan Pengamanan lainnya yang bersinergi dengan Polri khususnya Propam. Agar menghindari adanya gesekan antara TNI–Polri. Karena banyak sekali terjadi kejadian oknum TNI atau Polri melaksanakan pelanggaran di tempat hiburan malam, dan berdampak pada kerugian materil maupun juga personel.

Dari uraian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan yaitu: Pertama, Polisi Militer khususnya satuan Yonpomad telah melaksanakan tugas bersinergi dengan Polri dalam rangka harmonisasi hubungan antara TNI dan Polri yaitu di antaranya dalam kegiatan Pengamanan seperti Wisma Atlet, pengamanan Pos PSBB, dan Penertiban penggunaan masker pada saat PSBB. Kedua, Polisi Militer khususnya satuan Yonpomad ikut berperan dalam mendukung personel ke satuan Operasional seperti Pomdam XVII/Cendrawasih dan Pomdam XVIII/Kasuari dalam bersinergi dengan Polri pada tugas-tugas sesuai fungsi Polisi Militer.

Dalam rangka mengoptimalkan peran Polisi Militer satuan Yonpomad dalam mendukung tugas satuan Pomad kewilayahan yang bersinergi dengan Polri, penulis menyarankan: pertama, agar dibuat aturan/SOP/Juklak Polisi Militer yang mengacu kepada kegiatan gabungan TNI–Polri. Kedua, agar dibuat MOU antara Pomad dan Polri dalam rangka menentukan tingkat eskalasi di mana personel Polisi Militer yang dibutuhkan dalam perbantuan Kegiatan Polri, misalkan kegiatan razia mandiri Polri di dekat ksatrian TNI.

Demikian esai tentang Peran Yonpomad dalam mendukung satuan Pomad Kewilayahan yang bersinergi dengan Polri ini dibuat. Semoga mampu menjadi solusi terhadap kondisi atau permasalahan yang ada dan menjadi sumbangan saran bagi Komando atas dalam menentukan kebijakan ke depannya. Juga, semoga penulisan esai ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terakhir, saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan tulisan ini tentunya akan sangat penulis hargai. Demikian disampaikan semoga bermanfaat.



PEMANFAATAN TEKNOLOGI DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PRAJURIT TNI AD



Oleh : Mayor Inf Didik Dwi Utomo
(Kainfolaha Divif-1/Kostrad)

Dalam perkembangan Revolusi Industri 4.0, ada berbagai teknologi yang akan menjadi pilar utama yang berpengaruh besar terhadap kehidupan digitalisasi di antaranya adalah: 1) *Internet of Things (IoT)*. Adalah sebuah konsep dimana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia; 2) *Big Data*. Adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur; 3) *Simulation dan Argumented Reality (AR)*. Adalah simulasi keadaan untuk pengujian dengan dukungan teknologi seperti AR yang menggabungkan benda maya dua dimensi dan ataupun tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata tiga dimensi, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata; 4) *Cyber Security*. Adalah upaya untuk melindungi informasi dari adanya *cyber attack* dalam operasi informasi seperti mengganggu kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) informasi; 5) *Artificial Intelegence (AI)*.

Merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan buatan seperti manusia; 6) *Addictive Manufacturing*. Merupakan terobosan baru di industri manufaktur seperti menggunakan printer 3D untuk membuat produk lebih cepat dan efisien; 7) *System Integration*. Merupakan rangkaian yang menghubungkan beberapa sistem bagi secara fisik maupun fungsional secara terintegrasi; dan 8) *Cloud Computing*. Adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer diberikan hak akses (*login*) mengakses *server virtual* untuk bisa konfigurasi server melalui internet.

Sumber Daya Manusia (SDM). Alutsista

Perkembangan Revolusi Industri 4.0 telah menghasilkan teknologi persenjataan, teknologi informasi dan intelijen, Alutsista canggih serta sistem digitalisasi di dalamnya untuk memudahkan interoperabilitas. Alutsista yang dihasilkan terus berkembang dengan pesat dari waktu ke waktu. Pilar teknologi Alutsista yang banyak

dikembangkan saat ini berbasis pada digitalisasi, komputerisasi, otomatisasi, kecepatan jelajah dan daya hancur yang lebih efektif. Berbagai contoh bentuk persenjataan era revolusi industri 4.0 tersebut seperti sistem peralatan tanpa diawaki oleh tenaga manusia atau *unmanned sistem*, seperti *Unmanned Aerial Vehicle (UAV)*, *Unmanned Surface Vehicle (USV)* dan *Unmanned Sub-Survace Vehicle (USSV)*. Begitupula dengan senjata-senjata laser, seperti yang dimiliki oleh Amerika Serikat berupa *LaWS (Laser Weapon Sistem)* yang telah beroperasi di kapal logistik amfibi USS Ponce, dengan kecepatan jelajah dan daya rusak yang sangat tinggi. Contoh lainnya pengembangan Tank Armata oleh Rusia dengan memiliki *turret* sepenuhnya otomatis dan tanpa awak yang dilengkapi dengan meriam 125 milimeter yang mampu mencapai target dengan jarak tujuh kilometer dengan kecepatan tembak 12 peluru per menit.

Taktik dan Strategi Militer.

Perkembangan teknologi militer di era revolusi industri 4.0 berpengaruh pada perkembangan taktik dan

strategi militer yang aplikatif dengan teknologi tersebut, seperti contohnya perang informasi dan penerapan peperangan berbasis jaringan (*Network Centric Warfare*).

Pertama; Strategi Perang Informasi. Pada era revolusi industri 4.0 yang ditandai digitalisasi data, maka informasi merupakan senjata yang dapat mematikan musuh dan dapat pula menghancurkan diri sendiri sehingga penguasaan terhadap informasi adalah langkah utama dan penting untuk meraih keunggulan informasi (*information superiority*).

Peluang dan Tantangan Perkembangan Teknologi Peluang.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini memunculkan berbagai bentuk peluang bagi militer khususnya TNI AD dalam mengembangkan kekuatan dan kemampuan yang lebih handal, mengefektifkan pelaksanaan tugas serta memberikan kemudahan-kemudahan dalam penyelesaian permasalahan yang ada. Berbagai bentuk peluang tersebut, di antaranya: 1) Perkembangan Teknologi informasi dan komunikasi yang didukung internet akan memudahkan prajurit untuk mendapat data dan informasi yang dibutuhkan. Hal ini dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan prajurit sekaligus dapat mendukung tugas-tugas; 2) Penetrasi alat-alat elektronik di era industri 4.0 seperti komputer dan handphone yang telah menjadi sarana umum bagi militer menjadi peluang untuk memberikan kemudahan dalam berbagai pelaksanaan



Gambar 1. Teknologi Informasi dalam bidang militer

berbagai tugas dan kegiatan TNI AD. 3) Kemajuan persenjataan dan peralatan militer khususnya Alutsista canggih dapat diadopsi untuk menjadikan TNI AD yang modern berbasis kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan teknologi tersebut seperti hadirnya *robotic*, *bigdata* dan *artificial intelligence* dapat menggantikan beberapa tugas manusia yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan kekurangan personel atau menjawab efisiensi penggunaan personel; 4) Digitalisasi Alutsista dan sistem operasi militer yang terintegrasi akan memudahkan prajurit TNI AD dalam pelaksanaan operasi gabungan untuk mendukung pencapaian tugas pokok secara efektif. 5) Hadirnya berbagai jenis perangkat lunak yang dapat memberikan berbagai kemudahan dalam penyelesaian tugas atau permasalahan di TNI AD seperti aplikasi *e-planning* and *e-budgeting* yang dapat membantu efektivitas, efisiensi, dan transparansi

dari proses perencanaan dan penyusunan anggaran untuk mencegah inefisiensi, *overlapping*, dan pemborosan anggaran; aplikasi manajemen perbekalan dan aset yang memudahkan pendataan, pengawasan, pelacakan dan pengkategorisasian aset fisik seperti senjata, kendaraan atau perlengkapan militer lainnya yang ada di TNI AD. 6) Hadirnya teknologi seperti UAV atau *drone* yang berukuran besar atau kecil yang berkemampuan multi fungsi sebagai pengintai (*Reconnaissance*), Pengawasan (*Surveillance*), Pengiriman logistik atau yang dipersenjatai (*lethal autonomous weapon*) sebagai penyerang akan dapat meningkatkan daya gempur (*firepower and mobility*), perlindungan (*protection*) dan keamanan (*secure*) bagi satuan-satuan TNI AD di medan pertempuran; 7) Perkembangan teknologi di segala bidang baik di bidang informasi, elektronik ataupun persenjataan memberikan sebuah kemungkinan untuk membentuk

satuan yang *multi domain* termasuk berkemampuan siber (*cyber capability*) yang mampu bertempur di segala medan tempur termasuk di dunia siber (*cyberspace*).

Sumber Daya Manusia (SDM)

Saat ini TNI AD memiliki kekuatan SDM yang cukup besar dan para prajurit yang tergabung dalam TNI AD tersebut telah mendapatkan berbagai bentuk Pendidikan dan pelatihan yang berjenjang, termasuk kursus-kursus di bidang teknologi. Secara umum gambaran kemampuan SDM TNI AD dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 adalah sebagai berikut: **Pertama**, Kesiapan SDM TNI AD dalam hal penggunaan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sudah memiliki kapasitas *basic skill* dan *knowledge* yang cukup memadai dalam pelaksanaan tugas sehari-hari; **Kedua**, Kesiapan SDM TNI AD dalam hal teknologi komputerisasi saat ini sudah beradaptasi dalam operasional *hardware* dan *software* serta teknologi elektronika lainnya yang modern. Walaupun demikian sebagian prajurit masih terbatas pada kemampuan *basic* dalam mengoperasikan peralatan komputer; **Ketiga**, Kesiapan SDM TNI AD dalam hal adaptasi terhadap teknologi Alutsista modern baik manual maupun sistem digitalisasi dan integrasi cukup memadai. Namun masih cukup terbatas di tengah kondisi kesiapan Alutsista yang terbatas pula; **Keempat**, Kesiapan SDM TNI

AD dalam hal inovasi teknologi sejalan perkembangan revolusi industri 4.0 masih belum memadai di tengah pesatnya perkembangan teknologi tersebut serta terbatasnya sarana riset dan litbang yang ada.

Tuntutan

Untuk dapat memanfaatkan peluang sekaligus menjawab tantangan tersebut, maka setiap prajurit TNI AD dituntut untuk memiliki kemampuan khusus di bidang teknologi di samping kekuatan fisik dan mental. Kemampuan khusus tersebut berupa kompetensi dan kapabilitas sebagai berikut: **Pertama**, setiap prajurit wajib memiliki kapabilitas untuk menggunakan teknologi informasi, komunikasi dan komputerisasi sesuai perkembangan teknologi saat ini, teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi kebutuhan penting dalam mendukung kegiatan maupun tugas operasional prajurit. Peralatan seperti *smartphone*, komputer dan layanan internet saat ini sangat berguna bagi kepentingan militer, baik untuk kebutuhan informasi maupun komunikasi.

Kedua, setiap prajurit harus memiliki kemampuan bidang kepemimpinan dan manajerial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini, TNI AD membutuhkan sosok prajurit yang memiliki kapabilitas sebagai pemimpin sekaligus sebagai manajer untuk menghadapi perkembangan

teknologi informasi, komunikasi, komputerisasi, otomatisasi serta jaringan-jaringan Siskodal di era revolusi industri 4.0 yang begitu pesat. **Ketiga**, memiliki kapabilitas untuk dapat beradaptasi dan mengaplikasikan perkembangan teknologi militer. TNI AD harus mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi militer yang begitu cepat dan masif. **Keempat**, memiliki kapabilitas untuk berinovasi di bidang teknologi militer. Perkembangan teknologi militer yang begitu pesat saat ini, dipengaruhi pula oleh adanya perlombaan negara-negara maju, sehingga semakin mempercepat terciptanya produk teknologi-teknologi yang baru dari waktu ke waktu.

Taktik dan Strategi Militer

Perkembangan teknologi pertahanan di era Revolusi Industri 4.0 akan terus berjalan dengan cepat dan masif, sehingga diyakini sangat berpengaruh terhadap perubahan taktik dan strategi militer. Hal ini tidak dapat dipungkiri menjadi tantangan tersendiri bagi TNI AD untuk selalu menyesuaikan taktik dan strategi militer, khususnya dalam menghadapi perkembangan ancaman dan bentuk perang di masa datang. Sejalan dengan perkembangan perang masa datang, maka teori RMA (*Revolution in Military Affairs*) tetap akan berjalan seiring dengan mengandalkan kekuatan senjata dengan kendali jarak jauh dan terintegrasi.

TANK
LEOPARD
SALAH SATU
ALUTSISTA
TNI AD





MERDEKA

Dirgahayu



**INDONESIA
MAJU**

REPUBLIK INDONESIA
17 AGUSTUS 1945 17 AGUSTUS 2020